

**STUDI EKONOMI POLITIK:
PENGELOLAAN PARIWISATA DI KABUPATEN
WAKATOBI**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Politik Pada Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik**



**MARWAN
E 111 08 389**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

HALAMAN PENGESAHAN

STUDI EKONOMI POLITIK: PENGELOLAAN PARIWISATA DI KABUPATEN WAKATOBI

Nama : MARWAN
Nim : E11108389
Jurusan : Ilmu Politik dan Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Politik

Skripsi Ini Dibuat Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Ilmu Politik Pada Program Studi Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik
dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Makassar, Juni 2014

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



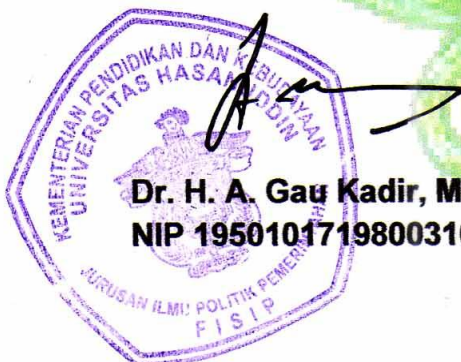
Prof. Dr. Kausar Bailusy, MA
NIP 130 936 998



A. Naharuddin, S.IP, M.Si
NIP 197311222002121001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Politik
dan Pemerintahan

Ketua Program Studi
Ilmu Politik



Dr. H. A. Gau Kadir, MA
NIP 195010171980031002



Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si
NIP 197308131998032001

HALAMAN PENERIMAAN

STUDI EKONOMI POLITIK: PENGELOLAAN PARIWISATA DI KABUPATEN WAKATOBİ

Nama : MARWAN
NIM : E11108389
Jurusan : Ilmu Politik dan Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Politik

Telah diterima dan disetujui oleh Panitia ujian sarjana Ilmu Politik pada
program studi ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Panitia Ujian Sarjana

Ketua : Prof. Dr. Kausar Bailusy, MA

(.....)
(.....)

Sekretaris : Sakinah Nadir, SIP.,M.Si

Anggota : A. Naharuddin, S.IP, M.Si

(.....)

Drs. H. Andi Yakub, M.Si

(.....)

Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si

(.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas begitu banyak kasih sayangnnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “STUDI EKONOMI POLITIK: Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Wakatobi”. Skripsi ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan dalam jenjang strata satu (S1) pada program studi ilmu politik, jurusan ilmu politik dan pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Tidak lupa salam dan salawat kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW atas ajaran-ajaran beliau sehingga mampu memberikan pencerahan atas kebenaran-kebenaran Islam yang dibawanya. Semoga segala keteladanan beliau menjadi inspirasi bagi segala aktivitas kita semua. Amin

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, tentunya penulis menghadapi tidak sedikit tantangan. Namun, atas kerja keras dan bantuan banyak pihak sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan penghargaan dan rasa terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B, Sp. BO, selaku Rektor Universitas Hasanuddin periode 2004 hingga masa jabatan 2014 yang belum terlalu lama ini berakhir masa jabatannya. Bagaimanapun penulis adalah salah satu generasi mahasiswa yang lahir dalam era kepemimpinan beliau.
2. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, selaku rektor baru Universitas Hasanuddin periode 2014-2019. Beliau adalah rektor yang mewisudah penulis di awal jabatannya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Hamka Naping, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya.
4. Bapak Dr. H. A. Gau Kadir, M.A, selaku ketua jurusan ilmu politik dan pemerintahan FISIP UNHAS beserta seluruh staffnya.
5. Ibu Dr. A. K. Gustiana, M.Si, selaku ketua program Studi Ilmu Politik FISIP UNHAS beserta seluruh staffnya.
6. Bapak Prof. Dr. Kausar Bailusy, MA, selaku pembimbing I dan Bapak A. Naharuddin, S.IP, M.Si, selaku pembimbing II yang tidak bosan-bosan memotivasi serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak.

7. Seluruh dosen yang pernah memberikan ilmunya terutama para staff pengajar di program studi ilmu politik, yang disini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Kedua orangtuaku, Ayahanda Jufri dan Ibunda Nurmala yang telah mencurahkan cinta dan kasihnya yang tidak terhingga kepada penulis. Adik-adik serta kepada seluruh keluarga besar penulis yang tidak sempat penulis lampirkan di sini.
9. Semua informan yang telah bersedia menjadi nara sumber penulis serta pihak-pihak terkait yang telah membantu.
10. Teman-teman dalam organisasi mahasiswa sederhana penulis, Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Tomia (HIPPMAT) Makassar.
11. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang merupakan bagian dari tempat saya berdiakletika ilmu pengetahuan.
12. Kepada seluruh teman-teman di program studi ilmu politik, terkhusus lagi yang mengatasnamakan “genealogi 10” meskipun isitilah ini penulis tidak tahu filosofinya.
13. Kepada semua tempat dan orang-orang pernah aku temui dimanapun dan kapanpun. Kalian semua telah menjadi bagian dari dialektika pemikiran penulis.

Masih banyak lagi pihak-pihak yang berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini, yang penulis tidak sebutkan satu persatu namanya. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi substansi. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga merasa sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Jika ada hal yang membuat pembaca atau pihak-pihak yang kurang berkenan, penulis ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, semoga semua yang berpartisipasi mendapatkan pahala yang melimpah di sisi_Nya. Amin.

*Billahi Taufik Walhidayah
Wassalamu alaikum Wr. Wb,*

Makassar, Juni 2014

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI ABSTRAKSI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Peneltian.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pariwisata	
1. Definisi pariwisata.....	14
2. Industri Pariwisata.....	16
B. Liberalisme dan Neoliberalisme.....	17
C. Privatisasi.....	27
D. Globalisasi.....	31
E. Perspektif Ekonomi Politik.....	35
F. Kerangka Pemikiran.....	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Dasar Penelitian.....	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian... ..	45
C. Informan.....	46
D. Jenis dan Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Analisis Data.....	49

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografis.....	51
B. Topografi.....	53
C. Pemerintahan.....	54
D. Industri Pariwisata.....	58
E. Balai Taman Nasional Wakatobi.....	60

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah	
1. Pembangunan Bandara Udara.....	63
2. Promosi.....	66
3. Peningkatan SDM.....	70
4. Mendukung Sanggar Seni Budaya.....	72
5. Peran Taman Nasional Wakatobi.....	75
B. Kepentingan Swasta	
1. PT WDR.....	82
2. Patuno Resort.....	88
C. Kepentingan Masyarakat	
1. Menjadi Buruh Resort	97

2. Membangun Dive Center.....	101
3. Hoga Resort.....	104
D. Implementasi Terhadap Kepentingan Masyarakat Wakatobi	
1. Dominasi PT WDR dan Patuno Resort.....	116
2. Minimnya Partisipasi Masyarakat Lokal.....	124
3. Kepentingan Nelayan.....	128

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	132
B. Saran.....	133

DAFTAR PUSTAKA.....	135
----------------------------	------------

ABSTRAKSI

MARWAN (E11108389). *STUDI EKONOMI POLITIK: Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Wakatobi*. Dibimbing oleh Prof. Dr. Kausar Bailusy, MA selaku pembimbing I dan A. Naharuddin, S.IP, M.Si sebagai pembimbing II.

Wakatobi memiliki kekayaan alam berupa pariwisata yang sangat baik sehingga mendapat predikat taman nasional wakatobi dan cagar biosfer dunia. Potensi besar ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Apalagi di tengah sistem ekonomi yang terintegrasi dalam pasar bebas, maka peluang para investor berinvestasi cukup besar. Di satu sisi masyarakat sebagai tujuan pembangunan sangat diharapkan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pariwisata ini. Tidak kalah pentingnya, pemerintah sebagai wakil rakyat diharuskan memainkan peran yang penting dalam pengelolaannya. Ketiga aktor ini memiliki kepentingan masing-masing namun idealnya harus dalam peran yang seimbang sehingga pemanfaatan kekayaan pariwisata dapat menciptakan keadilan ekonomi. Penelitian ini akan mefokuskan pada studi ekonomi politik: pengelolaan pariwisata di Kabupaten Wakatobi.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian dilakukan di Wakatobi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi pustaka. Data-data yang diperoleh akan direduksi sesuai keperluan. Kemudian dikumpulkan dan diorganisasikan. Terakhir akan disimpulkan untuk disajikan.

Pemerintah memiliki peran yang sentral dalam pengembangan pariwisata. Untuk memperkenalkan pariwisata Wakatobi, pemerintah melakukan promosi. Bandara udara juga tidak lupa dibangun sebagai infrastruktur untuk pendukung kemajuan pariwisata. Selain itu pemerintah melakukan upaya-upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) serta melakukan perlindungan ekosistem melalui taman nasional Wakatobi (TNW). Kebebasan pasar serta minimnya intervensi negara sehingga hadirnya beberapa investor swasta baik lokal maupun asing yang mengelolah potensi alam Wakatobi dengan konsep yang monopolis. Modal yang besar dengan mudah keduanya menguasai persaingan sehingga dominasi ekonomi dengan mudah dimenangkan. Tidak dapat dimungkiri terdapat beberapa kelompok masyarakat lokal juga mencoba membuka peluang bisnis di bidang kepariwisataan, misalnya dengan membangun resort atau dive center tapi itupun masih sangat minim apalagi dengan skala modal yang minim pula. Pemerintah diharapkan maksimal dalam berperan dalam menyejahterahkan rakyatnya, ternyata kurang begitu dirasakan. Selain itu, menjadi buruh-buruh juga menjadi hal yang lumrah terjadi pada masyarakat lokal. Di era desentralisasi ini, masyarakat Wakatobi yang harusnya mendapat imbas positif yang lebih baik, malah masih kurang merasakannya.

Kata kunci: Pariwisata

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka pada tahun 1945. Secara *de jure* telah melepaskan diri dari penjajahan, namun kemerdekaan itu tidak secara serta merta diakui oleh negeri penjajah dan bahkan ada upaya untuk melakukan pendudukan kembali. Instrumennya pun mulai berubah, jika sebelumnya Indonesia dijajah secara fisik, maka setelah Indonesia merdeka kontrol ideologi ekonomi politiklah yang dominan dilakukan. Ideologi neoliberalisme kemudian menjadi ideologi yang menghegemoni dan menjadi patron dari penguasa Indonesia. Hal ini tampak ketika rezim orde baru berkuasa di tangan presiden Suharto yang lebih terbuka terhadap kepentingan pasar. Dengan slogan “pembangunan” (*developmentalisme*) maka proyek penguasaan ekonomi oleh para kapital global mulai dijalankan, misalnya dengan lahirnya UU No 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Konsekuensinya distribusi ekonomi hanya teralokasi lebih banyak kepada elite tertentu baik di lingkaran kekuasaan maupun para pemilik modal baik asing maupun dalam negeri.

Selama lebih dari tiga dekade, orde baru berkuasa maka selama itu pula kita berada di bawah kontrol sistem ekonomi. Kita berada dalam cengkraman kekuasaan pasar bebas (*free market*) dimana negara tidak lagi berfungsi melayani dan memenuhi kebutuhan sosial rakyatnya melainkan negara hanya menjadi *penjaga malam* bagi kepentingan kaum

kapitalis (pemodal). Di bawah kekuasaan pasar bebas, negara cenderung lepas tangan dari urusan rakyatnya dan hanya menyiapkan sistem regulasi untuk memuluskan kekuasaan para pemilik modal untuk lebih menanamkan pengaruhnya di Indonesia. Negara kemudian dikuasai oleh para pemilik modal dengan industri-industri yang dimilikinya untuk mengeksploitasi hasil alam yang ada. Sayangnya dalam pembagian keuntungan, para pemilik modal lah yang lebih mendapatkan keuntungan yang besar sedangkan rakyat hanya menjadi penonton bahkan menjadi pembantu di negeri sendiri, dengan segala implikasi negatif lainnya.

Masuknya korporasi-korporasi asing yang mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia menjadi bukti nyata. Padahal konstitusi telah tegas melindungi hak-hak ekonomi rakyat melalui keharusan penyelenggaraan ekonomi yang mandiri. Konsep *trisakti* yang diungkapkan bapak pendiri bangsa, Soekarno yang mengatakan harus mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik dan berkarakter secara budaya telah dikhianati oleh sistem kapitalisme yang digunakan pemerintah Indonesia. Sistem regulasi yang meliberalkan atau melemparkan dalam mekanisme pasar bebas hampir semua sektor strategis menjadikan rakyat Indonesia terjebak dalam ketergantungan pada pasar. Pasar menjadikan para pemodal bebas bergerak tanpa hambatan menjadi domain utama dalam perekonomian bahkan mampu mengintervensi politik dalam negeri bahkan hingga ketingkat lokal. Negara menjadi entitas yang lemah bahkan tidak

kuasa berada dalam dominasi pasar. Justru para kapital global kini menjadi raja dalam sistem ekonomi neoliberal.

Ekonomi politik pasar sejalan dan saling menopang dengan sistem demokrasi liberal yang dijalankan negara Indonesia. Bahkan keduanya merupakan dua hal integral yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi liberal yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk berkompetisi dalam ekonomi maupun politik. Hal ini menjadi lahan empuk bagi pemilik modal untuk terlibat dalam kontestasi politik yang ada. Apalagi demokrasi liberal menghadirkan biaya politik yang mahal sehingga menjadi momentum yang baik bagi pemilik modal sebagai jalan untuk menanamkan pengaruhnya. Di sinilah terjadi perselingkuhan antara pemilik modal yang biasanya berasal dari pengusaha pemilik korporasi dengan penguasa atau calon penguasa yang akan terlibat dalam kontestasi pemilu atau pilkada di tingkat daerah. Pemilik modal menginginkan pengaruh ekonominya semakin luas ketika penguasa telah duduk di tampuk kekuasaan. Salah satu modusnya adalah dengan mengintervensi regulasi bahwa penguasa yang terpilih menciptakan regulasi yang mendukung hasratnya untuk menanamkan pengaruh ekonominya. Penguasa memanfaatkan momentum kekuasaannya untuk mencari keuntungan baik politik maupun ekonomi. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara, tidak menjadi prioritas utama dalam kebijakan ekonomi maupun politiknya. Selain ditingkat

nasional, realitas ini telah lumrah terjadi di daerah-daerah di Indonesia, pada era desentralisasi sekarang.

Selama 32 tahun kita berada dalam era sentralistik orde baru, yang cukup mendominasi pembangunan ekonomi. Kini memasuki era reformasi, desentralisasi menjadi pilihan kebijakan demi pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Desentralisasi diharapkan memberikan kesejateraan secara merata keseluruh daerah di Indonesia karena selama ini tersisihkan oleh kebijakan orde baru yang sentralistik. Kue pembangunan hanya terpusat, sementara banyak daerah di Indonesia hanya bertugas menyuplai kekayaan. Kebijakan penting pun termasuk pengelolaan sumberdaya alam, tidak bisa dikeluarkan begitu saja oleh pemerintah daerah melainkan berada di pusat kekuasaan. Tidak mengherankan jika ketertinggalan banyak daerah di Indonesia menjadi hal yang lumrah, termasuk Wakatobi yang secara geografis terletak di ujung Sulawesi Tenggara.

Sebagaimana disebutkan, desentralisasi sesungguhnya bertujuan untuk memberikan pemerataan kesejateraan bagi masyarakat secara keseluruhan, demikian pula di Wakatobi. Sebagai daerah yang memiliki kekayaan pariwisata, maka sangat diharapkan sebagai sumber pemerataan ekonomi masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik sehingga masyarakat akan mendapatkan efek positif. Masyarakat akan mendapat kesejateraan yang baik dalam daerahnya sendiri. Masyarakat tidak perlu lagi merasakan sulitnya mencari lapangan kerja sehingga tidak perlu

bersusah-susah bermigrasi mencari lapangan kerja di luar daerah demi menyambung hidup atau kesejahteraan akan tersemat pada masyarakat Wakatobi.

Banyak fakta bahwa watak orde baru yang sentralistik pada kekuasaan, tidak serta merta ditinggalkan oleh rezim desentralisasi. Sebagaimana disebutkan di atas, dalam sistem ekonominya orde baru sangat mengintegrasikan ekonomi Indonesia dalam mekanisme pasar bebas. Fungsi negara (pemerintah) seminimal mungkin bahkan ditiadakan dalam melakukan aktifitas perekonomian untuk menyejahterahkan rakyat. Adapula intervensi negara hanya sebatas pembuatan regulasi demi terciptanya suasana perekonomian kondusif yang mendukung sistem pasar bebas. Ekonomi kemudian diserahkan pada mekanisme pasar bebas. Fenomena ini kemudian dikenal dengan neoliberalisme.

Tidak mengherankan desentralisasi selalu melahirkan raja-raja kecil sebagai penguasa daerah baru, baik secara politik maupun ekonomi. Kekayaan alam daerah yang melimpah dimanfaatkan oleh para elite lokal baik elite ekonomi maupun politik untuk lebih memperkaya dan memperluas serta mempertahankan dominasinya. Mereka berlomba-lomba dengan segala cara untuk menguasai kekayaan alam di sebuah daerah. Perilaku ini secara implisit, terkesan mengkhianati cita-cita desentralisasi yakni memberikan pemerataan kesejahteraan ekonomi dan hak-hak politik bagi masyarakat di setiap daerah. Regulasi menjadi cara untuk melahirkan serta melindungi kepentingan pihak tertentu. Dengan

regulasi yang tidak adil akan menjadi alat kontrol yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menguasai sumber daya ekonomi maupun politik di sebuah daerah. Watak ini tidak jauh berbeda sejak Indonesia berada pada rezim orde baru, dimana para negara maju serta kapital global menggunakan regulasi untuk mengontrol ekonomi dan politik Indonesia. Cara itu kemudian, masih berlaku di era desentralisasi saat ini.

Konteks Wakatobi sebagai daerah yang kaya akan keindahan pariwisata, realitas ini dapat dilihat dalam beberapa peraturan daerah (perda) maupun UU (undang-undang). Sebagaimana peraturan daerah pemerintah Wakatobi nomor 4 tahun 2006 tentang retribusi izin usaha industri dan usaha perdagangan¹. Dalam perda ini menjelaskan semua orang/badan usaha baik lokal, nasional maupun asing dibebaskan berkompetisi untuk membuka usaha industri dan perdagangan barang maupun jasa. Perda ini cukup baik bagi pembangunan usaha serta memberikan kebebasan bagi siapa saja untuk mendirikan industri dan perdagangan barang maupun jasa. Tapi jika dilihat lebih dalam, perda ini tidak secara tegas mengatur tentang bagaimana secara rinci kompetisi yang adil serta retribusi yang adil bagi masyarakat dalam hal ini diwakili oleh pemerintah daerah. Persaingan yang bebas di pasar (*free market*), memberikan kepada pemilik modal yang lebih besar untuk berkesempatan memenangkan kompetisi untuk meraup untung yang sebesar-besarnya

¹ <http://www.wakatobikab.go.id/regulasi/1/>

sedangkan pemodal atau pengusaha kecil dan menengah akan tersingkirkan.

Perda nomor 4 tahun 2006 ini, sesungguhnya sejurus UU nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing yang mengarah pada privatisasi. Dalam banyak kasus di daerah-daerah di Indonesia pada era desentralisasi, para pemodal besar selalu lebih diuntungkan dibanding para pelaku usaha kecil dan menengah. Meskipun dalam perda ini, setiap orang dibebaskan untuk mendirikan usaha industri maupun perdagangan serta jasa. Namun, UU maupun perda di atas, telah melegalkan privatisasi atas kepemilikan umum (*public*) yang harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk hajat hidup orang banyak. Sedangkan dalam hukum pasar yang bebas tanpa kontrol negara akan membuat pemilik modal besar selalu menjadi pemenang dan pemodal yang lebih kecil akan kalah bersaing. Bahkan tidak jarang pemilik modal yang besar dapat mengendalikan dinamika perpolitikan sebuah pemerintahan (negara).

Kompetisi dalam pasar yang bebas (*free market*) ini juga semakin mendukung keberadaan industri pariwisata yang dikelola oleh swasta, dengan lahirnya perda nomor 9 tahun 2005 tentang retribusi objek dan antraksi wisata². Sebagaimana dijelaskan dalam perda ini, retribusi objek dan antraksi wisata didefinisikan sebagai retribusi atas pelayanan dan pemanfaatan kesediaan tempat obyek dan antraksi wisata yang bersifat buatan atau alamiah yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah

² <http://www.wakatobikab.go.id/regulasi/1/>

daerah. Artinya selain yang dikelola pemerintah daerah, retribusi tersebut tidak diwajibkan. Hal ini dipertegas dalam pasal 3 nomor 2 yang berbunyi “Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan obyek wisata dan antraksi wisata yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta”.

Secara komprehensif melihat Wakatobi dengan sistem regulasi yang berlaku maka indikasi penguasaan oleh pemilik modal besar sedang terjadi. Seperti yang dijelaskan di atas perda maupun undang-undang merupakan saluran untuk mempermudah masuknya para pemilik modal sebagai pemain utama dalam pasar yang bebas. Seperti juga dikatakan sebelumnya, bermula dari UU nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Regulasi inilah merupakan awal mula masuknya investasi asing di Indonesia dengan penguasaan ekonomi yang lebih mengutamakan kelompoknya. Regulasi ini memang bersifat umum, tapi inilah yang mendukung serta saling menyokong lahirnya regulasi lain tentang dominasi peran pemilik modal atas perekonomian.

Aturan-aturan inilah yang menjadi payung hukum sehingga terjadinya praktek-praktek neoliberalisme dimana kepemilikan pribadi atas milik publik di segala bidang menjadi hal yang lumrah, tidak terkecuali di bidang pariwisata. Dalam banyak kasus neoliberalisme telah meninggalkan banyak kerugian terutama di bidang ekonomi bagi rakyat di sebuah daerah, terlebih pada era desentralisasi. Era desentralisasi merupakan sebuah pertarungan elite dalam masyarakat. Bahkan jika dianalisa lebih dalam lagi, hadirnya sebuah daerah pemekaran tidak lepas

dari peran elite-elite dalam daerah tersebut. Bukannya tanpa alasan, karena daerah tersebut akan menjadi ladang baru untuk meraih modal kekuasaan politik dan ekonomi untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya meskipun berdalih demi terciptanya kesejahteraan ekonomi yang merata bagi seluruh masyarakat. Dalam perjalanannya dapat dilihat dengan lahirnya pemimpin-pemimpin lokal yang memiliki watak orde baru yang kapitalistik. Mereka menguasai sumber daya-sumber daya alam (ekonomi) di daerah tertentu dengan payung hukum sebagaimana disebutkan di atas maupun dengan melahirkan berbagai peraturan daerah yang mendukung.

Selain sistem regulasi/payung hukum di atas, ternyata saling mendukung dengan kehadiran predikat *taman nasional Wakatobi* dan *cagar biosfer dunia*. Dua predikat ini secara berturut-turut diberikan melalui SK. Menhut RI No. 7651/Kpts-II/2002³ dan untuk cagar biosfer dunia melalui penetapan oleh UNESCO sebuah badan di bawah naungan PBB, dimana di Indonesia baru delapan daerah yang memiliki label cagar biosfer dunia, salah satunya adalah di Wakatobi. Kedua predikat ini bukanlah tanpa alasan karena kabupaten ini memiliki keindahan laut dan bawah laut yang cukup mencengangkan. Wakatobi memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Terdapat 750 dari total 850 spesies koral yang ada di dunia. Lebih dari 112 jenis karang dari 13 famili. Kekayaan ikan yang dimiliki taman nasional ini sebanyak 93 jenis. Tidak

³ <http://wakatobinationalpark.com> (website resmi Taman Nasional Wakatobi)

hanya itu, perairan wakatobi juga di kenal sebagai taman bermain bagi paus-paus sperma yang melintas dua samudra, pasifik dan hindia. Fakta-fakta ini menjadikan pemerintah wakatobi menggunakan visi surga nyata bawah laut di pusat segitiga karang dunia. Hal inilah yang menjadikan Wakatobi semakin memiliki daya tarik tersendiri bagi para investor maupun para wisatawan baik nasional maupun mancanegara.

Sangat wajar, jika Wakatobi menjadi tujuan wisata maupun tujuan para investor untuk menanamkan modalnya. Demikian halnya terjadi pada beberapa daerah lain pada era desentralisasi di Indonesia. Dalam cita-cita desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan menjadi salah satu pemain penting dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Jika selama ini tersisihkan oleh kebijakan orde baru, sekarang peran yang lebih besar telah dimandatkan kepada pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk membangun daerahnya dengan segala potensi yang dimiliki serta yang terpenting adalah pemerataan ekonomi bagi masyarakatnya. Selain negara, masyarakat daerah juga merupakan komponen yang penting dalam pembangunan di era desentralisasi. Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, tidak kalah pentingnya dengan pemerintah daerah (negara), dalam pembangunan di daerahnya. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dan partisipatif untuk menentukan masa depannya. Dalam bidang ekonomi masyarakat daerah harus dilibatkan dalam pengelolaan sehingga kesejahteraan ekonomi dapat tercapai. Namun, beberapa aktor penting ini, tidak bisa berjalan sendiri-

sendiri. Butuh sinergitas yang partisipatif dan adil dalam membangun ekonomi.

Dalam banyak fakta di banyak daerah di Indonesia, ketika desentralisasi digulirkan, telah melahirkan penguasa-penguasa di daerah layaknya di era orde baru. Mereka menguasai kekayaan alam di daerah tersebut secara *privat*. Penguasaan secara privat sumber daya alam di Indonesia sangat bertentangan dengan konsep negara Pancasila yang menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 pasal 33 bahwa bumi dan air dan segala kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk hajat hidup orang banyak. Bunyi konstitusi ini, sesungguhnya sebagai bentuk penolakan terhadap praktek neoliberalisme yang menganut mekanisme pasar bebas, dimana segala hal dapat dijadikan komoditas yang dapat diperjual belikan tak terkecuali pariwisata, sehingga kepemilikan negara akan tereduksi oleh kepemilikan individu. Konsekuensinya negara tidak mendapat keuntungan yang diharapkan melainkan kepentingan individu yang diutamakan. Padahal konstitusi dimaksudkan agar kedaulatan ekonomi dapat tercipta secara merata dan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Terlebih di Wakatobi yang kaya akan keindahan pariwisata, sangat rentan untuk dikuasai oleh swasta dengan manajemen pengelolaan secara privat. Apalagi mekanisme *check and balances* terhadap roda pemerintahan di Wakatobi, tergolong masih kurang oleh masyarakat sipil

maupun oleh parlemen daerah. Harusnya dengan pariwisata bawah laut yang merupakan kekayaan daerah utama di Wakatobi yang memiliki wilayah laut kurang lebih 97 persen, bisa memberikan kesejahteraan ekonomi. Disinilah dibutuhkan sinergitas para pemangku kepentingan terutama pemerintah daerah, masyarakat juga swasta dalam membangun daerah dengan potensi wisata yang dimiliki. Berdasarkan fakta-fakta di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **“Studi Ekonomi Politik: Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Wakatobi”**

B. Rumusan Masalah

Melihat luasnya masalah yang akan diteliti dalam *Studi Ekonomi Politik: Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Wakatobi*, maka penulis memberi batasan penelitian pada konsep pengelolaan pariwisata tersebut serta peran masyarakat setempat.

1. Bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Wakatobi?
2. Bagaimana kepentingan swasta dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Wakatobi?
3. Bagaimana implementasi terhadap kepentingan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Wakatobi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Menggambarkan peran pemerintah dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Wakatobi.

2. Menggambarkan kepentingan swasta dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Wakatobi.
3. Implementasi terhadap kepentingan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Wakatobi

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis:

1. Manfaat akademis

Untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Wakatobi dan implementasi terhadap kepentingan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Wakatobi.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai media sosialisasi untuk memahami peran pemerintah, kepentingan swasta dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Wakatobi dan implementasi terhadap kepentingan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Wakatobi
- b. Sebagai tambahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan studi ekonomi politik terkait pengelolaan pariwisata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan kerangka teoritis atau kerangka konsep. Pada bagian ini akan memuat uraian tentang konsep dan teori pemikiran yang terkait penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini terkait dengan studi ekonomi politik dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Wakatobi.

A. Pariwisata

Pariwisata merupakan sebuah sektor yang penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Tidak mengherankan sektor ini menjadi perhatian yang cukup penting bagi pemerintah. Selain dapat memberikan kontribusi keuangan pada APBN/APBD, juga dapat menciptakan lapangan kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

1. Definisi pariwisata

Sebagaimana menurut undang-undang nomor 9 tahun 1990, pariwisata didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan bidang tersebut. Sedangkan wisata adalah setiap kegiatan manusia yang berpergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ketempat lain dengan menikmati perjalanan dari kunjungan itu. Hal inilah kemudian di lihat

sebagai peluang ekonomi untuk menyediakan jasa serta industri perdagangan lain yang terkait dengan kepariwisataan.

Para ahli keparawisataan juga memiliki definisi tentang pariwisata. Yoeti (dalam La Ode Aydin M, 2011) mendefinisikan pariwisata sebagai upaya melakukan perjalanan kesuatu tempat dalam waktu yang sementara, bukan untuk tujuan bisnis melainkan untuk tujuan rekreasi atau kegiatan sejenisnya⁴. Sebagai pelaku pariwisata (wisatawan), aktivitas berwisata bukanlah sebuah aktivitas untuk mencari keuntungan ekonomi. Ini berbeda dengan para pelaku industri yang mengelolah pariwisata dengan tujuan bisnis. Artinya industrialisasi pariwisata oleh bukanlah sebuah kegiatan wisata, melainkan hanya sekedar bisnis terkhusus di bidang pariwisata.

Lebih lanjut Yoeti mengatakan suatu objek wisata harus memenuhi kriteria sehingga bisa dijadikan tempat berwisata. Kriteria itu adalah objek wisata harus dapat memanjakan mata pengunjungnya sehingga dapat membuat pengunjung betah di tempat tersebut. Selain itu, objek wisata harus memiliki sesuatu yang dapat memberikan rasa senang kepada pengunjung. Misalnya tersedianya tempat bermain, rumah makan terutama yang menjual makanan khas daerah tersebut. Terakhir adalah objek wisata harus menyediakan tempat belanja di sekitarnya. Biasanya

⁴La Ode Aydin M. *Strategi Pengelolaan Pariwisata Bahari Secara Terpadu dalam Rangka Pendapatan Asli Daerah Wakatobi*. (Jakarta: UT, 2011) hal. 10

yang membuat para pengjung tertarik adalah adanya barang-barang yang merupakan ciri khas dari daerah yang dikunjungi⁵.

Pariwisata memang tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan manusia. Terlebih pada era moderen yang segala aktivitas manusia selalu penuh dengan dinamika serta kompetisi. Tidak jarang hal ini menjadi pemicu lahirnya kejenuhan hidup, sehingga wisata menjadi pilihan yang tepat untuk dilakukan oleh setiap manusia terutama yang hidup dalam masyarakat perkotaan.

2. Industri pariwisata

Seperti dijelaskan sebelumnya, pariwisata merupakan sektor yang penting dalam memajukan perekonomian suatu negara. Alasan inilah pariwisata dijadikan komoditas untuk menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pengelolahnya. Maka lahirlah konsep tentang industri pariwisata.

Menurut Oka A. Yoeti (1996), menjelaskan industri pariwisata adalah perusahaan yang bekerja sendiri maupun bekerja sama untuk menghasilkan barang atau menyediakan jasa bagi para wisatawan⁶. Artinya jika aktornya adalah perusahaan berarti prioritas kinerjanya adalah untuk menghasilkan keuntungan ekonomi. Bahwa barang maupun jasa diubah menjadi keuntungan ekonomi.

⁵Ibid, hal. 11-12

⁶ Oka A. Yoeti. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. (Bandung: Angkasa, 1996), hal. 33

Tidak jauh berbeda dengan *Kusudianto* yang dikutip oleh La Ode Aydin M (2011), menjelaskan industri pariwisata sebagai organisasi yang dikelola oleh swasta maupun pemerintah yang berhubungan dengan produksi hingga pemasaran untuk kebutuhan wisatawan⁷.

Jika pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan wisata (rekreasi) dan industri adalah kegiatan bisnis untuk mencari keuntungan ekonomi. Maka jika keduanya (pariwisata dan industri) digabungkan menjadi industri pariwisata, A. Han Karyono (1997) mengartikannya sebagai keseluruhan kegiatan menjual barang dan jasa kepada wisatawan selama mereka berwisata⁸. Dengan kata lain industri pariwisata adalah sebuah kegiatan bisnis yang menjual barang maupun menyediakan layanan jasa serta segala kegiatan ekonomi yang terkait dengan pariwisata untuk melayani para wisatawan.

B. Liberalisme dan Neoliberalisme

Bermula dari istilah liberal, sebuah teori ekonomi politik yang menjadi terkenal di Eropa ketika Adam Smith, seorang pakar ekonomi Skotlandia, menerbitkan buku pada 1776 berjudul *The Wealth Of Nations*⁹, hingga kemudian bermetamorfosis menjadi neoliberalisme.

1. Liberalisme

⁷ Ibid, hal. 15

⁸ A. Han Karyono. *Kepariwisataan*. (Jakarta: Gramedia, 1997), hal. 49

⁹ Ian Bremmer. *Akhir pasar bebas (The end of the free market)*. (Jakarta: PT Gramedia, 2010) hal. 24.

Menurut Jill Steans & Lloyd Pettiford (2009) kaum liberal percaya bahwa seluruh umat manusia adalah makhluk rasional yang harus diberikan kebebasan. Mereka menganggap kebebasan individu di atas segala-galanya¹⁰.

Menurut Ian Bremmer (2011), dengan mengutip pendapat Kenneth Minogue mendefinisikan liberalisme sebagai sesuatu yang dikerjakan oleh orang banyak ketika kita membiarkan mereka berbuat sesuka hati. Artinya kebebasan yang diberikan kepada orang akan mendatangkan kemakmuran yang berkelanjutan¹¹.

Dalam arti luas *liberalisme* memiliki arti sebagai usaha perjuangan menuju kebebasan. Dalam perkembangannya liberal memiliki makna tersendiri. Liberal jika ditarik dalam politik akan bermakna bahwa kemajuan bernegara atau berdemokrasi akan tercapai jika diberikan kebebasan pada individu, sedangkan liberalisme ketika ditarik dalam ekonomi, disebut dengan ekonomi pasar (kapitalisme). Hal ini diperjelas oleh Mansour Fakih (2009) bahwa jika ditarik kebelakang, ekonomi liberal/klasik (ekonomi pasar) dapat rujuk dari ajaran Adam Smith dalam karyanya *Wealth Of Nation* (1776). Selain Adam Smith, terdapat pemikir lain juga seperti David Ricardo dan James Mill. Tokoh-tokoh ini membangun pemikiran ekonominya di atas landasan filsafat liberalisme¹².

¹⁰ Jill Steans & Lloyd Pettiford. *Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 111

¹¹ Ibid, hal. 23

¹² Mansour Fakih. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. (Yogyakarta: INSISTPress, 2009), hal. 40

Ian Bremmer kembali menjelaskan sistem ekonomi liberal (kapitalisme murni) menghilangkan campur tangan pemerintah (*laissez-faire capitalisme*), artinya ketika pihak pembeli dan penjual melakukan transaksi jual beli, negara cukup memikirkannya sendiri. Terkait sebagian besar alat-alat produksi seperti tenaga kerja, tanah dan modal dikelola oleh pihak swasta (individu)¹³. Penjelasan ini menegaskan bahwa peran negara, tidak diperlukan dalam mengatur transaksi ekonomi antara penjual dan pembeli. Negara cukup mengurus urusannya sendiri.

Dipertegas kembali oleh *Ian Bremmer* bahwa ekonomi liberal atau disebut dengan kapitalisme murni, berpendapat bahwa kepercayaan pada 'tangan tersembunyi' harus dibiarkan mendatangkan keajaiban, sedangkan campur tangan pemerintah dalam perekonomian hanya akan mengganggu kinerja pasar. Akan tetapi menurutnya, dalam dunia nyata sesungguhnya liberalisme ekonomi tidak pernah terjadi secara sempurna. Kebutuhan manusia tidak bisa menjamin bahwa pasar bisa bekerja secara sempurna¹⁴.

Tidak jauh berbeda dengan Revrisond Baswir (2009), menjelaskan sistem ekonomi liberal meyakini akan mampu mengurus diri sendiri. Negara hanya akan menjadi penghambat sehingga campur tangan negara tidak diperlukan sama sekali. Akan tetapi, pada tahun 1930-an sistem ekonomi liberal mengalami depresi berat yang menyebabkan kemiskinan

¹³ Ibid, hal. 24

¹⁴ Ibid, hal. 25

serta pengangguran yang cukup massif, sehingga kepercayaan atas sistem ini mulai berkurang¹⁵.

Depresi atas liberalisme ini, *Ian Bremmer* berpendapat bahwa dukungan kepada negara untuk terlibat dalam perekonomian semakin meluas. Dalam hal ini negara harus menjadi penengah (wasit) bagi perilaku individu-individu yang terlibat dalam kompetisi di pasar serta menyediakan kebutuhan-kebutuhan umum seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan lingkungan, mengatasi kemiskinan dan lainnya. Lebih lanjut lagi, *Ian Bremmer* mengatakan kondisi ini adalah bentuk perpaduan antara mekanisme pasar bebas dan intervensi negara¹⁶. Alasan inilah melahirkan alternatif lain yang mengharuskan campur tangan negara dalam perekonomian. Meskipun sistem pasar dan kebebasan individu masih menjadi prinsip yang tidak bisa dihilangkan. Negara hanya sebatas pembuat regulasi bagi terciptanya sistem pasar yang kondusif, dalam hal ini dikenal dengan neoliberalisme.

1. Neoliberalisme

David Harvey (2009) menjelaskan bahwa neoliberalisme mengalami dinamika tersendiri mengalami metamorfosis dengan berganti-ganti nama sesuai dengan dinamika yang dihadapinya, meskipun substansinya sama.

¹⁵ Revisond Bawir. *Bahaya Neoliberalisme*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 2

¹⁶ Ibid, hal 25.26

Misalnya sebelum tahun 1930-an, dikenal dengan istilah liberalisme, kemudian liberalisme mengalami krisis yang membuat dunia berada di titik nadir kehancuran ekonomi bahkan sebagai pemicu perang dunia pertama. Para pakar ekonomi dunia pun berkumpul untuk mencari solusi terkait krisis ekonomi ini. Hingga menjelang peralihan tahun 1979 menuju tahun 1980, menemukan formulasi baru yakni neoliberalisme. Sistem ini mulai dikampanyekan secara massif oleh negara-negara maju terutama Inggris dan Amerika Serikat sejak terpilihnya Margaret Thacker dan Ronald Reagan, berturut-turut sebagai perdana menteri Inggris 1979 dan presiden AS tahun 1980. Kedua pemimpin negara maju ini menganjurkan bahkan memaksakan agar negara-negara di dunia, terutama negara dunia ke tiga yang kaya akan sumber daya alam untuk mengadopsi sistem neoliberalisme¹⁷.

Lebih lanjut *David Harvey*, menjelaskan neoliberalisme sebagai suatu alternatif solusi terhadap penyakit-penyakit yang menimpa kapitalisme yang mempengaruhi ranah kebijakan publik. Pada tahun 1947 terdapat sekelompok kecil yang menganjurkan segera diterapkannya sistem neoliberalisme sebagai solusi atas krisis liberalisme (kapitalisme)¹⁸.

Neoliberalisme merupakan sebuah sistem ekonomi politik yang mengurangi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Hal ini dipertegas dalam paket Konsensus Washington (*Washington Consensus*)

¹⁷ David Harvey. *Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalisme*. (Yogyakarta: Resist Book, 2009) hal. 2.

¹⁸ Ibid, hal. 32

yang disederhanakan Stiglitz menjadi (i) pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi, (ii) liberalisasi sektor keuangan, (iii) privatisasi BUMN yang dibarengi kebijakan regulasi dan deregulasi, dan (iii) liberalisasi perdagangan (Revrison Baswir, 2009: 4).

Jika diceremati lebih dalam, seperti yang dikatakan Mansour Fakih (2008), neoliberalisme pada substansinya adalah sama dengan kapitalisme. Pada prinsipnya keduanya sama, hanya konteks kemunculan dan strateginya yang berbeda. Bahkan hanyalah bagian penyempurnaan dari paham kapitalisme yang sangat mengagungkan pasar bebas¹⁹. Neoliberalisme meyakini pertumbuhan ekonomi akan terjadi dengan sendirinya jika negara tidak melakukan intervensi. Biarkanlah pasar bekerja dengan sendirinya. Campur tangan negara justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Tugas negara hanya menyiapkan seperangkat aturan agar praktek-praktek neoliberalisme dengan mudah terjadi.

Masih *Mansour Fakih* yang secara spesifik menyebutkan pokok-pokok pendirian neoliberalisme. *Pertama*, perusahaan harus di jauhkan dari pemerintah. Artinya perusahaan sebisa mungkin untuk diswastanisasikan sehingga pemerintah tidak memungkinkan untuk melakukan intervensi. *Kedua*, kurangi atau cabut subsidi kepada rakyat. Subsidi merupakan penyalahan konsep neoliberal karena subsidi dapat

¹⁹ Mansour Fakih. *Jalan Lain, Manifesto Intelektual Organik*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 192

diartikan bagian dari intervensi pemerintah dalam pasar bebas²⁰.

Demikian juga dengan Revrison Baswir (2009) menjelaskan kapitalisme yang merupakan bentuk lain dari neoliberalisme dibangun dalam dua prinsip. *Pertama*, pengakuan dan melindungi kepemilikan hak-hak individu meskipun kepemilikan publik harus dikorbankan. *Kedua*, perlindungan bagi pelaku usaha (pemodal) dalam pasar bebas²¹. Dengan kata lain sangat diperlukan dukungan dari sistem regulasi yang mengatur negara agar tidak campur tangan dalam pasar. Maka deregulasi yang merupakan upaya mereduksi peran negara tersebut, menjadi pilihan yang tepat. Sebagaimana kita ketahui, deregulasi merupakan upaya mengurangi bahkan ingin menghilangkan sama sekali peran negara dalam perekonomian. Caranya adalah mereduksi sistem aturan yang melegalkan negara berperan dalam pasar sehingga pasar akan bebas bergerak sendiri tanpa intervensi.

Sistem regulasi yang sebelumnya telah ada, dimana memberikan negara wewenang untuk mengatur perekonomian, harus segera diminimalisir bahkan dihentikan. Lahirlah kemudian regulasi-regulasi kontra terhadap campur tangan negara. Konsekuensi lain yang secara otomatis akan muncul adalah privatisasi. Privatisasi secara garis besarnya memberikan kebebasan atas hak milik individu untuk memiliki apa saja. Sumber daya alam yang harusnya milik umum, atas nama privatisasi

²⁰ Ibid, hal. 190-191

²¹ Revrison Baswir. *Bahaya Neoliberalisme*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 145

sehingga dapat dimiliki oleh pribadi (swasta). Ketiadaan intervensi negara membuat privatisasi lebih mudah merajah lelah, dengan swasta menjadi pemain utamanya.

Subsidipun demikian, akan sedikit diberi ruang oleh negara penganut neoliberalisme. *Mansour Fakih* menjelaskan bahwa subsidi dalam paham neoliberalisme sebagai salah satu sarana intervensi negara dalam mencampuri urusan ekonomi sehingga melanggar prinsip neoliberalisme²². Dalam negara neoliberal mengharuskan negara menghilangkan proteksi terhadap kegiatan-kegiatan perekonomian. Pasar dibiarkan bebas bergerak karena diyakini secara otomatis akan melahirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Campur tangan negara justru menjadi penghambat bagi tujuan itu. Subsidi dianggap sebagai salah satu bentuk campur tangan negara yang dapat mengganggu persaingan dalam pasar bebas sehingga harus diminimalisasi bahkan dihilangkan.

Era globalisasi, neoliberalisme semakin mendapatkan dukungan. Jika dilihat lebih dalam, globalisasi dengan segala perangkatnya telah dijadikan oleh para pemilik modal (kapital global) untuk lebih mengendalikan perekonomian maupun dinamika politik sebuah negara bahkan dunia. Seperti yang dijelaskan oleh *Mansour Fakih* dalam bukunya *Jalan Lain, Manifesto Intelektual Organik* (2011) melalui globalisasi sistem

²² Ibid, hal.191.

ekonomi politik negara-negara maju yang menganut neoliberal, diintegrasikan keseluruhan negara-negara termasuk negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam, sehingga para pemilik modal yang mampu mendapatkan keuntungan yang besar di tengah ketiadaan negara dalam memainkan fungsinya²³. Hal ini sangat beralasan, karena negara yang merupakan institusi milik rakyat yang bertugas memberi pelayanan sosial terhadap rakyatnya, harus dihilangkan perannya. Sistem ekonomi kemudian dilemparkan kepasar bersatu padu dengan sistem ekonomi global yang neoliberal. Dengan kemampuan ekonomi dalam negeri yang masih terseok-seok karena bangunan dasar ekonomi yang masih rapuh, negara justru melepas tangan. Para pemilik modal dengan korporasi-korporasinya menjadi pemain utama sehingga merekalah yang mengendalikan ekonomi dunia tak terkecuali negara-negara dunia ketiga.

Eko Prasetyo (2004) juga memberikan penjelasan yang sama, bahwa neoliberalisme adalah upaya membatasi negara untuk mengatur perekonomian. Biarlah pasar yang menjadi aktor dalam mengendalikan transaksi-transaksi ekonomi²⁴. Disaat negara sudah dibatasi fungsinya secara otomatis, negara tidak memiliki tanggung jawab terhadap nasib ekonomi rakyatnya. Kemiskinan pun semakin merajalelah karena pemerataan ekonomi tidak seimbang. Jurang kepemilikan ekonomi semakin lebar karena kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang saja

²³ Ibid, hal. 195-198

²⁴ Eko Prasetyo. *Islam Kiri*. (Yogyakarta: INSIST Press, 2004), hal. 111

dan mayoritas rakyat berada pada keprihatinan ekonomi.

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa neoliberalisme hanyalah sistem ekonomi politik yang pemeran utamanya adalah para pemilik modal. Negara hanyalah institusi yang kurang memiliki kekuatan dalam menjalankan fungsinya untuk memberi kesejateraan kepada rakyatnya secara umum. Negara terkesan sebagai alat pemberi legitimasi dengan menciptakan sistem regulasi yang mendukung bagi terjadinya sistem neoliberalisme. Penganut paham ini menganggap negara sebatas entitas yang dapat menghambat keberlangsungan sistem pasar bebas. Dengan kata lain globalisasi sengaja dimanfaatkan oleh para pemillik modal untuk mengintegrasikan seluruh sistem ekonomi dan politik dunia dalam satu bentuk, karena globalisassi dengan perangkat yang di milikinya telah mampu mengaburkan batas-batas negara. Garis demarkasi negara bisa dikatakan tereduksi menjadi sebuah sistem yang homogen. Pergerakan barang, jasa, uang serta ekonomi pun menjadi semakin cepat. Para pemilik modal akan berlomba-lomba untuk menguasai sumber-sumber produksi terutama kekayaan alam untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya, bukan untuk rakyat secara umum.

Dalam prinsipnya, liberalisme dan neoliberalisme tidak jauh berbeda. Kebebasan individu menjadi hal yang penting. Jika liberalisme sangat mengagung-agungkan kebebasan hingga menolak campur tangan negara sedangkan neoliberalisme tetap berlandaskan pada kebebasan

individu namun negara juga mendapat tempat sebagai aktor untuk membuat regulasi yang mendukung pasar bebas dan membenahi kelemahan-kelemahan yang terjadi pada liberalisme.

C. Privatisasi

Privatisasi merupakan bagian dari syarat dalam negara neoliberal. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa kepemilikan individu sangat dihargai bahkan bisa mereduksi kepemilikan publik. Sebagaimana dikatakan oleh David Harvey (2009), privatisasi secara garis besarnya merupakan sektor-sektor yang sebelumnya dijalankan atau diatur oleh negara haruslah diserahkan kepada swasta atau dideregulasikan (dibebaskan dari setiap campur tangan negara)²⁵.

Lebih lanjut *David Harvey* menjelaskan bahwa ketiadaan hak-hak milik pribadi yang tegas sebagaimana yang terjadi di banyak negara sedang berkembang, dianggap sebagai salah satu hambatan bagi kemajuan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan²⁶. Kepemilikan negara dalam mengontrol kekayaan alam merupakan hambatan yang besar bagi keberlangsungan perekonomian. Privatisasi sesungguhnya merupakan solusi untuk membebaskan rakyat dari lilitan kemiskinan, karena ketika individu (swasta) dibebaskan untuk bermain dalam pasar maka dengan sendirinya akan memberikan efek tetesan kebawah (*trickle down effect*)

²⁵ David Harvey. *Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalisme*. (Yogyakarta: Resist Book, 2009) hal. 109

²⁶ Ibid, hal. 108

yang memberi kesejateraan kemasyakarat kelas bawah. Jika negara diberikan peran yang lebih dalam mengurus mengelolah kekayaan alam atau terlibat dalam perekonomian justru menjadi penghalang bagi kemajuan dan kemakmuran.

Terkait privatisasi, Coen Husain Pontoh (2005) juga menjelaskan salah satu doktrin negara neoliberal adalah adanya privatisasi dimana adanya tatanan dunia baru yang dikendalikan oleh pasar dan kekuatan modal, sebuah tatanan yang bergerak tanpa aturan negara dan meninggalkan peran negara²⁷. Negara seminimal mungkin direduksi perannya dalam mengatur perekonomian. Hal ini sejurus dengan terbangunnya sistem politik liberal (demokrasi liberal) yang menjadikan modal (uang) sebagai pemain utama dalam penyelenggaraan negara. Negara kemudian terkesan hanyalah simbol dan aktor utama adalah uang (korporasi). Dengan kata lain privatisasi bukanlah kekuasaan negara dalam menjalankan fungsinya melainkan kemenangan korporasi melalui jalur privatisasi.

Neoliberal memang tidak dapat dipisahkan dari privatisasi. Kebebasan korporasi (swasta) dalam mengendalikan aset-aset sebuah negara menjadi hal yang lumrah terjadi. Ahmad Erani Yustika (2009) menjelaskan dalam pandangan sempit, privatisasi merupakan pemindahan aset milik negara kepada swasta sedangkan dalam arti yang

²⁷Coen Husain Pontoh. *Malapetaka Demokrasi Pasar*. (Yogyakarta: Resist Book, 2005), hal. x-xi

luas privatisasi dapat diartikan terjadinya pemindahan pengelolaan perusahaan milik negara kepada swasta tanpa terjadi pemindahan kepemilikan²⁸.

Dalam dinamika ekonomi politik dunia, *Ahmad Erani Yustika* kembali menjelaskan, privatisasi merupakan bagian dari konsep ekonomi politik yang dimainkan oleh lembaga-lembaga donor internasional seperti IMF dan bank dunia yang salah satu tugasnya adalah merangsang terjadinya praktek-praktek neoliberalisme dengan mendorong terjadinya pengalihan kegiatan ekonomi dari negara ke swasta²⁹. Banyak kalangan yang menganggap privatisasi merupakan kebijakan yang kurang populis bahkan melanggar konstitusi negara Indonesia, sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 33.

Tidak jauh berbeda dengan Eko Prasetyo (2004) menjelaskan privatisasi digerakan oleh kekuatan individualisme untuk menghilangkan peran negara. Negara akan tunduk sepenuhnya pada pasar, karena pasar begitu berkuasa atas negara³⁰. Seperti metafora “tangan-tangan tersembunyi”, privatisasi meyakini akan terjadi secara otomatis kemakmuran ekonomi jika individu dibiarkan berkompetisi secara bebas dalam pasar. Negara cukup menyiapkan instrumen berupa perangkat aturan yang mendukung kebebasan dalam pasar tersebut.

²⁸ Ahmad Erani Yustika. *Ekonomi Politik, kajian teoritis dan analisis empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 186

²⁹ *Ibid*, hal. 179

³⁰ *Ibid*, hal. 113

Berbeda dengan *Munday* (dalam Ahmad Erani Yustika, 2009) menjelaskan privatisasi setidaknya terdapat beberapa tujuan, diantaranya sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi kinerja yang buruk oleh perusahaan milik negara³¹. Tujuan ini memang cukup ideal, namun dalam prakteknya terutama di negara-negara dunia berkembang, tujuan seperti yang disebutkan oleh *Munday* tidak terjadi. Justru, akumulasi kekayaan hanya terjadi pada pemilik modal. Privatisasi hanyalah dijadikan instrumen terselubung untuk melancarkan kepentingan ekonomi dan politik para korporasi swasta.

Secara gamblang, privatisasi dalam konteks keindonesiaan cukup merugikan negara dibanding jika negara mengelolah perekonomiannya secara mandiri. Kepemilikan rakyat secara umum harus dikorbankan demi kepentingan perusahaan swasta sehingga rakyat tidak mendapatkan keuntungan yang lebih dibanding swasta yang meraup keuntungan yang besar. Konsep ini sangat bertentangan dengan konsep kedaulatan ekonomi maupun politik, sebagaimana secara tegas konstitusi negara kita (Indonesia) menegaskan bahwa bumi, air dan segala kekayaan alam lainnya dikelola oleh negara dan digunakan untuk hajat hidup orang banyak³².

D. Globalisasi

³¹ *Ibid*, hal 180

³² Lihat UUD 1945 Pasal 33

Globalisasi bukanlah sesuatu yang hadir begitu saja di ruang hampa, tanpa sebab yang melatarbelakanginya atau agenda apa yang teralir padanya. Sebagaimana Ahmad Erani Yustika (2009) melihat globalisasi merupakan sebuah konsep ekonomi yang berlandaskan pada teori klasik/neoklasik yang merupakan bentuk lain dari neoliberalisme sehingga dengan kata lain, globalisasi pada akhirnya merupakan proyek negara-negara tertentu untuk menaklukkan negara lain³³.

Secara historis, Stiglitz (dalam Ahmad Erani Yustika, 2009) menjelaskan bahwa fenomena globalisasi terhitung dimulai sejak konsep *Bretton Woods*³⁴ pada 1944, di New Hampshire AS, dimana dalam pertemuan itu disepakati untuk dibangunnya dua lembaga moneter dan keuangan dunia dengan tujuan membantu perekonomian negara-negara eropa akibat perang dunia II dan untuk menyelamatkan ekonomi dunia kedepannya³⁵. Hal ini sejalan terlebih dengan fakta-fakta yang terjadi, bagaimana peran negara maju dalam melancarkan wacana globalisasi. Negara maju sebagai aktor terpenting karena neoliberal merupakan ideologi ekonomi politik yang diusung. Melalui globalisasi kemudian ideologi tersebut dialirkan untuk kepentingan mereka.

Sejalan dengan itu, Coen Husain Pontoh (2005) menjelaskan bahwa neoliberalisme merupakan sebuah kendaraan yang mengusung

³³ *Ibid*, hal. 84

³⁴ Konferensi keuangan dan moneter yang diselenggarakan PBB di AS untuk mengatasi krisis ekonomi dunia. Lihat, Revrison Baswir. *Bahaya Neoliberalisme*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 3

³⁵ *Ibid*, hal. 72

globalisasi³⁶. Memang tidak dapat dimungkiri, globalisasi memiliki pengaruh positif pada pergerakan informasi, barang, jasa dan ekonomi, akan tetapi jika dicermati globalisasi memiliki agenda terselubung yang dimanfaatkan oleh rezim neoliberalisme global untuk lebih mencengkram ekonomi dunia. Ketika ekonomi dunia sudah tertakluk maka akan dengan mudah untuk mengendalikan arah kebijakan politik yang berlaku di negara tersebut. Tidak lain, globalisasi merupakan sebuah konsep ekonomi politik yang terselubung oleh rezim neoliberal global dengan segala perangkanya.

Semakin jelas, globalisasi adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dari neoliberalisme. Mansour Fakih (2011) mendefinisikan globalisasi sebagai proses pesatnya neoliberalisme yang ditandai dengan globalisasi pasar. Lebih lanjut, *Mansour Fakih* melihat agenda neoliberalisme dalam globalisasi didukung oleh beberapa perangkat pendukung. Negara-negara maju memanfaatkan perangkat-perangkat dalam globalisasi terutama PBB untuk menguasai ekonomi dunia. Diantaranya yang paling berperan adalah lembaga donor yang memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara berkembang, organisasi perdagangan dunia dan *multinational corporation (MNC)* atau perusahaan lintas negara³⁷.

³⁶ *Ibid*, hal. x

³⁷ *Ibid*, hal. 192

Untuk lebih memahami mekanisme kerja ketiga perangkat globalisasi tersebut, oleh negara-negara maju untuk bagaimana menanamkan pengaruh ekonomi dan politiknya. Mengutip kembali *Mansour Fakih* dalam bukunya *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi (2009)* menjelaskan³⁸:

Pertama, lembaga donor keuangan. Kita mengenal bank dunia (*World Bank*), bank pembangunan asia (*Asian Development Bank*) dan lembaga moneter dunia (*IMF*). Setidaknya ketiga lembaga ini menjadi contoh bagaimana kiprah lembaga donor internasional yang bertugas untuk memberikan pinjaman ekonomi (uang) kepada negara-negara berkembang. Pinjaman itu bukan diberikan begitu saja, melainkan melalui sejumlah kesepakatan-kesepakatan yang ternyata lebih menguntungkan pihak negara maju diantaranya adalah adanya deregulasi yang mengarahkan sebuah negara terjebak pada mekanisme privatisasi.

Kedua, organisasi perdagangan dunia. Salah satunya adalah WTO yang belum lama ini (akhir 2013) mengadakan pertemuan tingkat tingginya di bali. WTO yang merupakan organisasi yang mengatur perdagangan termasuk sanksi perdagangan antara negara yang tergabung dalamnya. Terlepas dari itu jika dianalisis lebih dalam, WTO juga tidak lepas dari dikte negara-negara maju untuk menciptakan aturan perdagangan yang lebih menguntungkan mereka.

³⁸ Mansour Fakih. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. (Yogyakarta: INSISTPress, 2009), hal. 187-190

Ketiga, perusahaan lintas negara/multinational corporation (MNC).

Perusahaan ini merupakan kaki tangan atau pelaksana lapangan negara-negara maju untuk lebih mencenggram ekonomi dunia. Perusahaan yang berpusat di negara-negara maju ini, telah berkolaborasi dengan lembaga donor serta organisasi perdagangan dunia yang dikendalikan negara maju untuk menguasai ekonomi dunia. Merekalah (MNC) yang ditugaskan oleh negara maju untuk masuk mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di negara berkembang. Mereka tidak masuk begitu saja melainkan telah dilindungi atau dilegitimasi oleh seperangkat regulasi yang telah dibuat oleh wakil rakyat yang ada di negara berkembang, tak terkecuali Indonesia.

Semakin jelas bahwa globalisasi memiliki agenda yang terselubung yakni untuk menjalankan agenda neoliberalisme. Agenda besar yang dimiliki oleh negara-negara maju dan para pemilik modal untuk menguasai negara secara ekonomi maupun politik.

E. Perspektif Ekonomi Politik

Ekonomi politik merupakan sebuah pendekatan lain dalam kajian ekonomi maupun politik. Meskipun keduanya adalah dua kajian yang berbeda namun keduanya tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Ekonomi tidaklah berada dalam ruang hampa yang bebas dari pengaruh dinamika politik, demikian juga politik tidak bisa lepas dari dinamika perekonomian.

Sama halnya dijelaskan oleh Ahmad Erani Yustika (2009) bahwa meskipun analisis ekonomi dan analisis politik berbeda karena memiliki dasar yang berbeda namun dalam pendekatan ekonomi dapat mengaitkan penyelenggaraan politik baik yang menyangkut proses, aspek maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat maupun pemerintah. Artinya mekanisme pasar, investasi dan kegiatan ekonomi lainnya dipengaruhi dinamika politik yang sedang terjadi³⁹.

Lebih lanjut *Ahmad Erani Yustika*, ekonomi politik percaya struktur kekuasaan memiliki pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sedangkan pendekatan ekonomi murni menganggap struktur kekuasaan terjadi begitu saja (*given*)⁴⁰. Hal ini dapat dilihat bagaimana sistem politik yang menganut liberalisasi sehingga membuat kita terperosok dalam demokrasi liberal. Demokrasi yang memberi keleluasaan pada siapa saja untuk berkompetisi, asalkan memiliki kemampuan terutama finansial karena mahal biaya politik. Momentum ini kemudian dimanfaatkan oleh para elite ekonomi (pengusaha) untuk ikut berkontestasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung mereka bisa mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Ada juga yang melakukannya secara tidak langsung dengan menunjuk atau mendukung salah satu kandidat wakil rakyat dengan sokongan dana yang besar.

³⁹ *Ibid*, hal. 7-8

⁴⁰ *Ibid*, hal. 2

Dalam kajian ekonomi politik, ketika kebijakan ekonomi dikeluarkan bukanlah tanpa ada kepentingan kekuasaan. Ada agenda lain kekuasaan tertentu dari sistem ekonomi yang berlangsung, sehingga *Ahmad Erani Yustika* mengatakan pendekatan ekonomi politik dalam prakteknya selalu mempertimbangan dan memperhatikan struktur kekuasaan dan sosial yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian wajar jika kebijakan selalu mendapatkan pro dan kontra di masyarakat⁴¹. Apalagi sekarang, Indonesia memasuki fase perpolitikan era desentralisasi. Sistem politik yang terbuka dan lemahnya kontrol masyarakat lokal terhadap pemerintahan sehingga kebijakan ekonomi sangat rentan dengan kepentingan politik. Terlebih sejalan dengan konsep demokrasi kita yang liberal dan ekonomi yang neoliberal, maka politik akan terjebak pada biaya politik yang mahal. Tak pelak lagi, kekuasaan pemodal yang memainkan peran besar dalam kebijakan ekonomi. Hingga berujung pada pendiktean institusi politik maupun ekonomi yang diarahkan pada kepentingan para pemilik modal.

Menurut Mochtar Mas'oed (2008) mendefinisikan ekonomi politik sebagai keterkaitan antara fenomena politik dan ekonomi, antara negara dan pasar atau antara negara dan masyarakat⁴². Dua aspek ini memang tidak bisa dipisahkan bahkan setiap kebijakan politik yang menjadi prioritas utama yang selalu ditemukan adalah kepentingan ekonomi.

⁴¹ *Ibid*, hal. 9-15

⁴² Mochtar Mas'oed. *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 4

Demikian pula, kebijakan ekonomi, jika ditelusuri maka akan bermuara pada kepentingan politik. Dalam konteks desentralisasi Indonesia terutama dalam pengelolaan pariwisata di Wakatobi, pasar justru menjadi dominan mempengaruhi negara dan masyarakat. Negara (pemerintah) seolah menjadi institusi simbolik yang tidak memiliki peran yang kuat dalam mengatur ekonomi masyarakatnya. Pasar dengan industri-industri pariwisata yang dikelola oleh swasta menjadi pengendali utama dalam perekonomian. Bukan untuk kepentingan masyarakat secara umum melainkan lebih untuk kepentingan pemilik industri.

Dalam kasus pengelolaan pariwisata, *Mochtar Mas'oe*d menegaskan bahwa pariwisata tidak bisa dilepas dalam perspektif ekonomi politik. Banyak yang melihat pariwisata hanya sekedar aktivitas ekonomi, namun sesungguhnya kepentingan politik pun terjadi padanya. Masalah yang harus dilihat adalah siapa aktor-aktor yang berperan dalam industri pariwisata ini. Tentunya yang utama dari aktor-aktor itu adalah korporasi dalam hal ini pemilik modal. Dalam banyak negara yang memiliki industri pariwisata, peran korporasi masuk melalui jalur neoliberalisme. Para pemodal ini melakukan privatisasi dengan membangun industri pariwisata yang merupakan kekayaan alam milik publik sebuah negara⁴³.

Berbagai fasilitas serta sarana pendukung lain pun berasal dari impor. Jaringan perhotelan semisal hilton, perusahaan penerbangan carteran seperti donaldson. Belum lagi fasilitas perhotelan seperti AC,

⁴³ *Ibid*, hal. 207-208

escalator, banyaknya buah impor serta produk-produk multinasional lainnya seperti coca-cola, mcdonald, pizza hut dan lainnya, adalah produk impor, bukan produksi asli dalam negeri Indonesia. Artinya jika masyarakat negara maju datang berwisata ke Indonesia, secara tidak langsung sebagian besar mereka menggunakan fasilitas yang ada di negaranya. Tidak hanya sampai disitu, dalam beberapa contoh seperti yang diungkapkan kembali *Mochtar Mas'ood* mengutip penelitian *Turner*, korporasi pariwisata milik asing dapat mempengaruhi pemerintah sebuah negara agar memihak pada kepentingannya. Misalnya pemerintah Yunani menurunkan pajak hotel dan pemerintah Spanyol membatalkan upaya pribumisasi operator wisata⁴⁴.

Watak seperti ini tidak jauh berbeda dengan kepemilikan kepemilikan swasta lokal atau nasional yang mengelolah pariwisata. Dukungan politik yang berbiaya mahal dan menganut neoliberalisme, maka para pemilik modal yang menginvestasikan uangnya untuk industri pariwisata. Sama halnya dengan kasus di atas, negara hanya menjadi pelayan bagi para korporasi karena negara tidak memiliki kemampuan yang lebih dalam mengatur perekonomian. Tidak mengherankan para pemilik industri pariwisata lebih memperkaya diri dengan dukungan regulasi dari pemerintah. Terlebih konsep pengelolaan pariwisata tersebut sangat monopolis dan tertutup sehingga masyarakat setempat tidak mendapat efek positif yang besar.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 211

Sebagaimana juga *Martin Staniland* (dalam Mawardin, 2011) menyebutkan ekonomi politik akan membicarakan bagaimana politik menentukan aspek-aspek ekonomi dan bagaimana institusi ekonomi mempengaruhi politik. Kedua aspek ini berhubungan satu sama lain⁴⁵. Kita dapat melihat contoh yang dihadapi oleh negara-negara di dunia terutama negara berkembang yang mengalami permasalahan ekonomi yang belumlah tuntas. Begitu pula dengan negara-negara maju selain mempertahankan hegemoni ekonomi politiknya juga bagaimana melakukan ekspansi ideologi ekonomi maupun politik ke negara-negara lainnya di dunia. Dalam banyak indikator, kemajuan ekonomi akan mempengaruhi kualitas demokrasi suatu negara. Demikian pula sebaliknya. Bahwa demokrasi yang berkualitas akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dalam faktanya, kondisi ekonomi dunia justru membangun sebuah sistem ekonomi yang timpang. Pasalnya kebijakan ekonomi yang dominan adalah ekonomi yang menjadikan pemodal sebagai pengendali utama, dengan pasar bebas sebagai kendaraannya.

Negara maju dengan segala modal dan korporasinya, menjebak semua negara untuk masuk dalam perangkat neoliberalisme yang diusungnya. Konsep ekonomi ini bukannya menciptakan keadilan ekonomi, melainkan hanya menjebak pada permasalahan ekonomi yang tak berkesudahan. Negara maju yang selalu mengampanyekan tentang perlunya menegakan nilai-nilai demokrasi, malah menjadi penghambat

⁴⁵ Mawardin. *Prospek Hubungan Bilateral Indonesia-Israel dalam Perspektif Ekonomi Politik*. (Makassar: Unhas, 2011), hal. 46

karena akumulasi kekayaan ekonomi terkonsentrasi pada mereka. Negara-negara berkembang yang kaya akan hasil alam justru mengalami penderitaan ekonomi memprihatinkan. Ini bertolak belakang dengan agenda yang selalu digemakan oleh negara-negara maju untuk menegakan nilai-nilai demokrasi, justru mereka sendiri yang melanggarnya. Pasalnya dengan model kebijakan ekonomi politik ini membuat kualitas ekonomi yang berpengaruh pada kualitas demokrasi, menjadi lebih buruk. Dominasi peran modal dan pasar serta keberadaan korporasi sebagai pemain utama, secara tidak langsung dapat mempengaruhi dan mengendalikan arah politik yang ada.

Tidak jauh berbeda dengan Didik J. Rachbini (2006), lebih memperkenalkan pendekatan ekonomi politik baru. Menurutnya, ekonomi politik baru yakni bagaimana memahami realitas politik berdasarkan analisis yang dianalogikan individu sebagai aktor. Lebih lanjut dia menjelaskan individu adalah makhluk yang egois serta memiliki kepentingan atas pilihan-pilihannya. Pilihan-pilihan ini kemudian diupayakan secara maksimal untuk dicapai demi kepentingan dirinya karena merupakan hak miliknya. Dengan hak milik ini manusia menjadi makhluk ekonomi untuk memiliki apa saja yang diinginkan⁴⁶.

Jika dianalisa lebih dalam merupakan sebuah konsep ekonomi politik yang sangat mengagung-agungkan kebebasan individu. Sama

⁴⁶Didik J. Rachbini. *Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hal. 31

halnya dengan bagaimana neoliberalisme dalam menjalankan agenda-agendanya. Pasar menjadi wadah pertarungan yang harus dibebaskan dari intervensi apapun termasuk negara demi melindungi aktor individu (swasta). Maka lebih lanjut lagi, *Didik J. Rachbini* menyebutkan dalam pendekatan ekonomi politik, terbuka untuk memahami bagaimana peran negara dalam kegiatan ekonomi termasuk dalam sistem pasar bebas⁴⁷.

Dari beberapa pandangan terkait ekonomi politik pada dasarnya menjelaskan adanya kaitan antara politik dan ekonomi. Dua dimensi integral yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Ekonomi mempengaruhi politik, demikian juga politik mempengaruhi ekonomi.

E. Kerangka Pemikiran

Fenomena globalisasi telah membuat pergerakan ekonomi maupun politik semakin cepat. Globalisasi jika ditelisik lebih dalam, bukanlah sesuatu yang bebas nilai. Dalam perspektif ekonomi politik, sesungguhnya globalisasi memiliki kepentingan sebagai kendaraan sebuah proyek besar, yakni neoliberalisme.

Banyak yang memahami struktur kekuasaan yang beralaku seolah sesuatu yang terberi (*given*). Jarang yang melihat, struktur kekuasaan memiliki pengaruh terhadap sistem ekonomi maupun politik. Di sini penulis melihat dalam sebuah konsep ekonomi terdapat kepentingan politik di

⁴⁷ *Ibid*, hal. 32

dalamnya, demikian juga sebaliknya. Kemudian lebih dikenal dengan perspektif ekonomi politik.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keunikan dan keindahan alam yang cukup bagus, salah satunya adalah wisata alam. Salah satu destinasi wisata itu adalah terdapat di Wakatobi. Wakatobi merupakan daerah kepulauan yang berada di ujung Sulawesi Tenggara memiliki keindahan laut dan bawah laut yang cukup menggiurkan. Di daerah kepulauan ini terdapat 750 dari total 850 spesies koral yang ada di dunia. Lebih dari 112 jenis karang dari 13 famili. Kekayaan ikan yang dimiliki taman nasional ini sebanyak 93 jenis. Tidak hanya itu, perairan Wakatobi juga dikenal sebagai taman bermain bagi paus-paus sperma yang melintas dua samudra, pasifik dan hindia. Fakta-fakta ini menjadikan para investor swasta baik lokal maupun asing, menjadikannya sebagai sasaran investasi.

Dari perspektif global, di tengah badai revolusi dan ketidakstabilan beberapa negara-negara kawasan membuat negara tersebut menjadi rawan untuk dikunjungi wisata dari berbagai mancanegara. Tentunya ini akan menjadi peluang bagi Indonesia termasuk Wakatobi di dalamnya untuk dikunjungi para wisatawan dari beberapa negara yang mengalami kestabilan dan kebangkitan ekonomi. Juga, tentunya wisatawan domestik sendiri. Alasan inilah yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Indonesia umumnya dan Wakatobi khususnya. Bahkan

banyak yang memprediksi kebangkitan ekonomi akan terjadi di negara-negara yang memiliki banyak destinasi wisata.

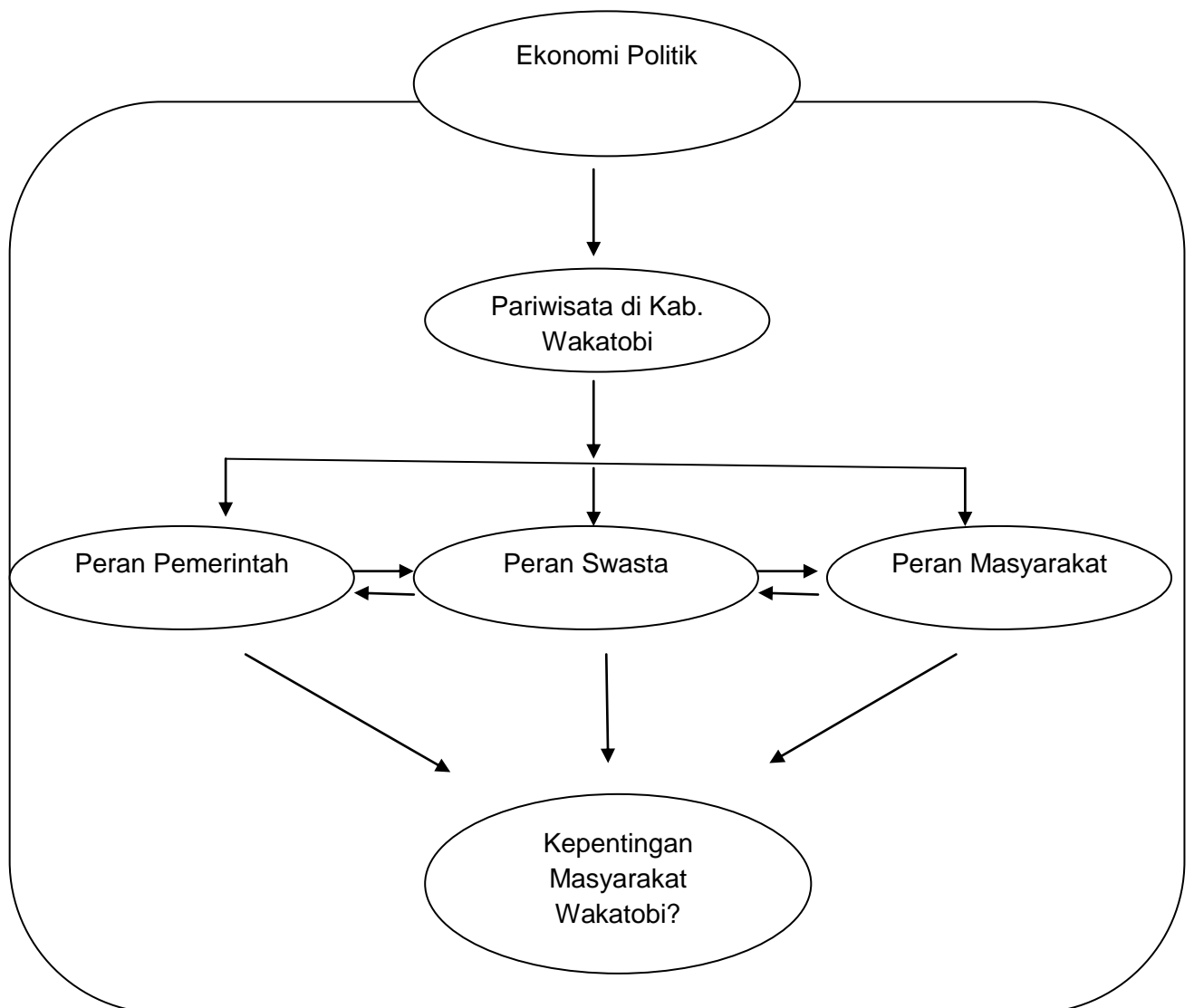
Secara makro pertumbuhan ekonomi mungkin akan terjadi dengan baik, namun tidak serta merta secara mikro pertumbuhan ekonomi akan merata. Di tengah arus globalisasi terlebih di babak perpolitikan Indonesia yang memasuki era desentralisasi, kekuasaan modal memegang peran yang sangat besar. Termasuk ketika desentralisasi ini terjadi di Kabupaten Wakatobi yang memiliki keindahan wisata yang cukup diperhitungkan dalam skala nasional maupun internasional.

Di banyak daerah di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, seolah tidak memiliki manfaat bagi masyarakat setempat. Pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta baik nasional maupun internasional. Ditambah lagi dalam pembagian hasil pengelolaan (keuntungan) tidak memihak kepada masyarakat bahkan hanya lebih menguntungkan kepada pemilik industri saja.

Realitas ini akan coba disamakan dengan kekayaan alam berupa keindahan wisata di Wakatobi. Akan dilihat tentang konsep pengelolaannya. Tentang peran pemerintah dalam pengelola pariwisata sehingga mampu memberikan kesejahteraan ekonomi. Demikian juga dengan masyarakat setempat, akan dilihat bagaimana perannya dalam mengelola kekayaan alam untuk kesejahteraan bersama. Sangat memungkinkan juga akan diketahui siapa aktor yang berperan dalam

pengelolaan pariwisata Wakatobi, selain pemerintah dan masyarakat dalam hal ini pihak swasta. Dari penjelasan ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut.

SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Dasar Penelitian

Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu fenomena sosial secara lebih dalam untuk mengetahui keadaan objek penelitian yang sesungguhnya. Metode penelitian ini umumnya akan memperoleh data deskriptif dari hal yang diamati. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu objek penelitian yang tengah berlangsung pada saat studi maupun sebelumnya. Penelitian yang akan dilakukan akan memberikan gambaran mengenai pengelolaan pariwisata di Kabupaten Wakatobi dalam perspektif ekonomi politik.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Wakatobi serta balai taman nasional Wakatobi yang kebetulan bertempat di Kota Baubau. Balai taman nasional Wakatobi ini, memang hadir semenjak Wakatobi masih tergabung dalam Kabupaten Buton dan Kota Baubau menjadi lokasi balai ini.

Hal yang menjadi pertimbangan untuk memilih Kabupaten Wakatobi sebagai fokus penelitian adalah Wakatobi merupakan daerah pariwisata yang memiliki keindahan alam yang cukup diperhitungkan baik

dalam skala nasional maupun internasional. Itu terbukti dengan diberikan predikat sebagai *Taman Nasional Wakatobi* oleh pemerintah Indonesia dan *Cagar Biosfer Dunia* oleh UNESCO sebagai badan yang bernaung di bawah PBB. Sebagai cagar biosfer dunia, predikat ini hanya diberikan pada delapan daerah di Indonesia, salah satunya di Wakatobi.

Secara geografis wakatobi adalah Kabupaten yang terdiri dari gugusan pulau besar yakni Wanci, Kaledupa, Tomia dan Binongko. Keempat pulau masing-masing terdiri dari dua kecamatan yang memiliki keunikan wisata sendiri-sendiri. Penulis akan meneliti tentang konsep pengelolaan pariwisata di Kabupaten Wakatobi yang akan dilihat dalam perspektif ekonomi politik. Penelitian dilakukan pada bulan Maret hingga April, tahun 2014.

C. Informan

Informan merupakan sumber utama dalam melakukan penelitian. Informasi yang disampaikan oleh informan akan menjadi data utama (*primer*) dalam penelitian. Dalam menentukan informan tentunya adalah sampel yang akan dipilih berdasarkan kategori-kategori tertentu disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Informan yang penulis wawancarai adalah pihak taman nasional Wakatobi, dinas pariwisata dan kebudayaan, BPS Wakatobi, Ketua serikat buruh di Kab. Wakatobi, masyarakat Wakatobi, Pengelola Hoga resort serta beberapa pengelola dive center di Kabupaten Wakatobi.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari lapangan atau data pokok yang harus didapatkan. Misalnya diperoleh dari hasil wawancara langsung. Dalam pengumpulan data ini penulis akan melakukan wawancara dengan para stakeholder dan masyarakat Wakatobi terkait bagaimana konsep pengelolaan pariwisata di Wakatobi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka atau data penunjang lainnya. Data ini dapat diperoleh dari buku-buku, dokumen atau data-data lain yang terkait termasuk hasil penelitian yang pernah ada terkait bagaimana studi ekonomi politik dalam pengelolaan pariwisata. Data ini kemudian akan diolah untuk digunakan dalam mendukung informasi primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap kondisi yang menjadi sasaran penelitian. Tujuan utama dari teknik

ini adalah agar peneliti dapat memahami secara mendalam terkait perilaku, kebiasaan dan kondisi lapangan.

b. Wawancara mendalam (*deep interview*)

Peneliti akan melakukan wawancara langsung terhadap informan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Wawancara antara peneliti dan informan dilakukan secara langsung kemudian mengajukan beberapa pertanyaan atau mendiskusikan sesuatu yang menjadi masalah penelitian. Terkait wawancara, tentunya peneliti akan fleksibel dalam melakukannya termasuk teknik-teknik tertentu yang dikondisikan dengan situasi lapangan nantinya. Terpenting adalah tujuan utama yakni memperoleh informasi yang di inginkan bisa tercapai. Informan kemudian memberikan jawaban atau respon sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Metode ini dikenal dengan teknik wawancara (*deep interview*).

c. Studi pustaka

Studi pustaka adalah sumber data tertulis atau dokumen-dokumen tertentu yang dianggap perlu. Studi pustaka juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan yang tertulis. Penulis membaginya menjadi dua kategori yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga/perorangan atas nama lembaga yang terkait dengan penelitian dalam hal ini studi ekonomi

politik dalam pengeolaan pariwisata. Sumber tidak resmi adalah dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh individu dengan tidak mengatasnamakan lembaga tetapi dalam kaitan dengan penelitian. Dokumen tidak resmi ini bisa dijadikan sumber pustaka penelitian melainkan atas nama individu.

F. Teknik Analisis Data

Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa penellitian ini menggunakan metode kualitatif. Dimana data yang terkumpul akan dianalisa dengan pendekatan yang lebih terjalin baik sebelum, selama hingga setelah penelitian selesai dilakukan. Model analisa data ini dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan beserta verifikasi data. Ketiga unsur ini selalu saling menjalin dan kait mengkait satu sama lain.

Tentunya selama proses penelitian berlangsung, akan banyak data-data yang diperoleh. Untuk lebih mempermudah pengelolaan dan analisa maka sangat diperlukan penyederhanaan terhadap data-data yang dianggap perlu sehingga data lebih terfokus. Di sinil dilakukan reduksi data. Reduksi data merupakan proses mengeliminasi, memilah, menyederhanakan atau mengelompokan data-data yang dianggap perlu untuk tujuan penelitian. Pada tahap ini akan dilakukan peringkasan, pengkodean atau pemilahan. Hal ini dimaksudkan agar hasil peneltian lebih terfokus dan memiliki batasan yang jelas. Proses ini akan dilakukan sejak awal penelitian ketika data sudah didapatkan hingga hasil penelitian

telah terakumulasi secara total.

Data yang dikumpulkan dan diorganisasikan dengan baik, selanjutnya disajikan. Dalam penelitian kualitatif data disajikan dalam bentuk narasi. Pada tahap penyajian data penulis akan mengelompokan data berdasarkan kelompok informan, sehingga diketahui beberapa informasi dari informan berdasarkan pokok masalah dan sumber (informan). Narasi ini juga dapat didukung dengan skema, bagan atau tabel pendukung jika diperlukan. Sajian data yang dilakukan bertujuan untuk memahami bagaimana studi ekonomi politik dalam pengelolaan pariwisata di Wakatobi hingga dampak yang ditimbulkannya dalam hal ini bagaimana bisa menyebabkan terjadinya migrasi penduduk Wakatobi ke luar Wakatobi sendiri.

Terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses ini dapat dilakukan setelah sajian data yang telah dilakukan. Untuk verifikasi dapat dilakukan dengan pengulangan (*review*) terhadap data-data yang telah ada. Terkait kesimpulan, juga dapat dilakukan dengan berdiskusi kembali dengan pihak-pihak yang dianggap berkompeten dan perlu terutama dosen pembimbing.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan gambaran umum mengenai lokasi penelitian. Gambaran umum lokasi penelitian diperlukan untuk memudahkan memahami lokasi penelitian.

A. Geografis

Kabupaten Wakatobi adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara geografis, Wakatobi terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan di antara 5.000 – 6.250 Lintang Selatan (sepanjang ± 160 km) dan membentang dari Barat ke Timur diantara 123.340 - 124.640 Bujur Timur (sepanjang ± 120 km). Secara geografis, Kabupaten Wakatobi di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Banda, di sebelah Selatan dengan Laut Flores, di sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda dan sebelah Barat berbatasan dengan Laut Flores. Kabupaten Wakatobi memiliki luas wilayah daratan ± 823 km² atau hanya sekitar 4,3 persen dari total wilayah Kabupaten Wakatobi secara keseluruhan. Sisanya merupakan wilayah perairan laut yang luasnya mencapai ± 19.200 km². Kabupaten Wakatobi terdiri dari 8 Kecamatan yaitu Binongko, Togo Binongko, Tomia, Tomia Timur, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Wangi-Wangi, dan Wangi-Wangi Selatan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia (UU No.32 tahun 2004). Kepala Desa dipilih secara langsung oleh masyarakat di desa tersebut.

Kelurahan adalah suatu wilayah yang dipimpin oleh seorang lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan atau daerah kota di bawah kecamatan (UU No.32 tahun 2004). Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota Pada tahun 1995 Pemerintah RI melalui Menteri Kehutanan menetapkan Wakatobi sebagai Taman Wisata Alam Laut (SK Menteri Kehutanan RI Nomor 462/KPTSII/ 1995). Hal ini ditetapkan mengingat Kepulauan Wakatobi merupakan salah satu wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati laut yang terlengkap di Dunia.

Selanjutnya pada Tahun 1996 ditingkatkan statusnya menjadi wilayah Konservasi dengan status Taman Nasional (SK Menteri Kehutanan RI Nomor 393/KPTS-VI/1996, Tanggal 30 Juni 1996 dan ditetapkan berdasarkan SK Menhut Nomor 7651/KPTSII/2002 tanggal 19 Agustus 2002. Wakatobi terletak pada pusat segit tiga karang dunia (Coral Triangle Center), memiliki jumlah keanekaragaman hayati kelautan tertinggi di dunia yakni 750 jenis karang dari 850 spesies karang dunia, 900 jenis ikan dunia dengan 46 divecites teridentifikasi (salah satunya Marimabuk), 942 spesies ikan, 90.000 Ha terumbu karang, karang Atol

Kaledupa dengan panjang 48 km dan merupakan karang Atol terpanjang di Dunia (Operation Wallacea, 2006).

B. Topografi

Topografi adalah keadaan muka bumi pada suatu kawasan atau daerah.

- a. Puncak adalah bagian paling atas
- b. Gunung/pegunungan
- c. Lereng adalah bagian gunung/pegunungan/ bukit yang letaknya diantara puncak sampai lembah
- d. Lembah adalah daerah rendah diantar dua gunung/ pegunungan atau daerah yang mempunyai kedudukan lebih rendah dibanding daerah sekitarnya.
- e. Hamparan adalah bagian atau sisi bidang tanah yang Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaanny sebagai hutan tetap Lokasi desa terhadap kawasan hutan dibedakan menjadi:
 1. Di dalam kawasan hutan adalah desa yang terletak di tengah atau dikelilingi kawasan hutan, termasuk desa enclave. Enclave adalah pemilikan hak-hak pihak ketiga di dalam kawasan hutan yang dapat berupa permukiman dan atau lahan garapan
 2. Di sekitaran kawasan hutan adalah desa yang wilayahnya berbatasan langsung dengan kawasan hutan atau sebagian wilayah desa berada dalam kawasan hutan

3. Di luar kawasan hutan adalah desa yang wilayahnya tidak berbatasan langsung dengan kawasan hutan.

Desa pesisir adalah desa atau kelurahan yang memiliki wilayah berbatasan langsung dengan garis pantai/laut dengan sumber kehidupan masyarakatnya bergantung pada potensi laut. Desa bukan pesisir adalah desa yang tidak berbatasan langsung dengan laut atau tidak mempunyai pesisir. Desa bukan pesisir terdiri atas daerah lembah/ daerah aliran sungai, daerah lereng/punggung bukit, dan desa dataran.

C. Pemerintahan

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wakatobi menjelaskan secara administrasi, kabupaten Wakatobi terbentuk sejak tahun 2003. Wakatobi dimekarkan dari Kabupaten Buton yang dibentuk berdasarkan UU No. 29 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Bombana, Wakatobi, dan Kolaka Utara di Prov. Sulawesi Tenggara. Namun, Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Wakatobi secara resmi dimulai pada tanggal 9 Januari 2004.

Pejabat Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi berturut-turut Sarifudin Safaa, S.Sos (2004- 2005), Mahufi Madra, SE (2005-2006), Ir. Hugua dan Ediarto Rusmin BAE (2006-2011), serta Ir. Hugua dan Arhawi Ruda, SE (2011-2016). Visi Pemerintah Kabupaten Wakatobi sebagaimana tercantum dalam Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wakatobi

2012 – 2016 yaitu *“Terwujudnya Surga Nyata Bawah Laut di Pusat Segitiga Karang Dunia”*

Pada visi Kabupaten Wakatobi Tahun 2012- 2016 terdapat tiga kata kunci atau pokok visi, yaitu Surga nyata, Bawah laut, dan Pusat segi tiga karang dunia. Penjelasan dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Surga nyata* adalah perwujudan kesejahteraan dan kemakmuran baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan hidup serta daya saing daerah yang didukung oleh situasi ketertiban dan ketentraman umum yang kondusif.
- b. *Bawah laut* adalah perwujudan kemanfaatan dan kelestarian atas potensi sumberdaya bawah laut dan perairannya khususnya dalam hal kelautan, perikanan, pariwisata, dan lingkungan/kawasannya.
- c. *Pusat segi tiga karang dunia* adalah aktualisasi posisi geostrategis Wakatobi, yakni pada pusat segitiga karang dunia yang mempunyai keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Dalam upaya mewujudkan *“Surga Nyata Bawah Laut di Pusat Segi Tiga Karang Dunia”*,

Memperhatikan perubahan paradigma dan isu-isu strategis serta kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka ditetapkan misi pembangunan Wakatobi tahun 2012-2016, sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

2. Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam.
3. Meningkatkan kualitas dan daya dukung infrastruktur wilayah.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan public dan tata kelola pemerintahan.
5. Mengembangkan situasi yang kondusif bagi kehidupan masyarakat yang inovatif.

Sistem pemerintahan di Indonesia didasarkan pada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif (trias politica) Kekuasaan legislatif di Wakatobi dipegang oleh Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kab. Wakatobi. Anggota DPRD dipilih melalui pemilu dan dilantik dalam masa jabatan lima tahun. Jumlah anggota DPRD Kab. Wakatobi periode 2009-2014 sebanyak 25 orang.

Lembaga eksekutif di Wakatobi terdiri dari pada bupati, wakil bupati, dan satuan kerja pemerintahan daerah. Bupati dan wakil bupati dipilih secara langsung oleh rakyat dan dilantik dalam masa jabatan lima tahun Lembaga Yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Lembaga yudikatif hanya berkantor di Jakarta.

Susunan pemerintahan kabupaten Wakatobi adalah Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Dinas, Badan, Kantor, serta Sekretariat Kecamatan, dan Desa. Pemerintahan daerah juga berkoordinasi pula dengan Kantor Kementrian di daerah, lembaga negara setingkat kementrian di daerah, lembaga pemerintahan non kementrian di daerah.

Dinas-dinas terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda Dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan umum, Pertambangan, Dan, Energi, Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Asset Daerah, Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan & Peternakan, Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, pemakaman dan Pemadam Kebakaran, Kependudukan Dan Catatan Sipil.

Badan-Badan terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan pelatihan, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Lingkungan Hidup, Badan enanggulangan Bencana Daerah, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian, Peternakan dan Kehutanan, dan Inspektorat.

Kantor terdiri dari kantor Rumah Sakit Umum Daerah, kantor Satuan Polisi pamong Praja, Kantor Perpustakaan Daerah, Pengolahan Data Elektronika dan Arsip, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah, Kantor Penghubung, dan Kantor Dewan Korpri. Kantor Kementrian di daerah terdiri dari Kantor

Kementrian Agama, Badan Konservasi Sumber daya Alam (Kementrian kehutanan), Kantor Penyelenggaraan Pelayanan Pelabuhan (Kementrian Perhubungan), Kantor Kesehatan Keselamatan Pelabuhan (Kementrian Kesehatan) Lembaga negara setingkat kementrian di daerah terdiri dari Kejaksaan Negeri, Kepolisian Resor, Perwira Penghubung Kodim 1413 Buton, Dankosal Angkatan Laut Lembaga pemerintahan non kementrian di daerah antara lain Badan Pusat Statistik, Badan Pertanahan Nasional, Badan Urusan Logistik.

D. Industri kepawisataan

Wakatobi yang merupakan akronim dari nama empat pulau dalam gugusan kepulauan Wakatobi. Ke empat pulau itu adalah Wangi wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko. Sebelumnya Wakatobi hanya dikenal sebagai daerah kepulauan tukang besi karena dahulu bahkan hingga sekarang masih ditemukan para pengrajin besi yang membuat beberapa karya seperti parang dari bahan dasar besi. Namun sekarang kepulauan ini telah berubah menjadi daerah pariwisata.

Berbagai keunikan yang dimiliki oleh Wakatobi. Dimana terdapat 750 dari total 850 spesies koral yang ada di dunia. Lebih dari 112 jenis karang dari 13 famili. Kekayaan ikan yang dimiliki taman nasional ini sebanyak 93 jenis. Tidak hanya itu, perairan wakatobi juga di kenal sebagai taman bermain bagi paus-paus sperma yang melintas dua samudra, pasifik dan hindia. Fakta-fakta ini menjadikan pemerintah wakatobi menggunakan visi surga nyata bawah laut di pusat segitiga karang dunia. Hal inilah yang

menjadikan Wakatobi semakin memiliki daya tarik tersendiri bagi para investor maupun para wisatawan baik nasional maupun mancanegara. Tidak mengherankan Wakatobi mendapatkan label sebagai salah satu taman nasional di Indonesia dan melalui penetapan UNESCO menjadi salah satu cagar biosfer dunia.

Hal ini yang menjadi daya tarik bagi para pemilik modal serta yang memiliki kemampuan *entrepreneur* untuk membangun usaha di bidang kepariwisataan. Data yang terhimpun dalam dinas pariwisata dan kebudayaan Wakatobi, terdapat kurang lebih sepuluh usaha pariwisata di Wakatobi baik dalam skala modal yang besar maupun yang kecil. Kesepuluh itu adalah Tomia dive center, Tondiono dive center, Hoga DC, Mawaddah DC, Wakatobi dive trip, Raka dive trip, Waha Tourism center, Wakatobi dive resort, Patuno resort dan Opwall (Operation Wallacea) atau oleh masyarakat di Wakatobi lebih dikenal dengan Pulau Hoga resort. Dari kesepuluh ini, dua diantaranya di kelolah oleh pemilik modal besar oleh pihak swasta yakni PT Wakatobi Dive Resort (WDR) dan Patuno Resort. Kemampuan modal yang besar serta manajemen perusahaan yang modern membuat kedua industri ini menjadi industri yang berskala internasional. Selebihnya adalah dikelolah langsung oleh masyarakat dengan skala modal yang kecil.

E. Balai Taman Nasional Wakatobi

TNW adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan. Di awal pembentukannya, Unit Pelaksana Teknis Balai TNW adalah Unit Taman Nasional Kepulauan Wakatobi setingkat eselon IV.a berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 185/Kpts-II/1997. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 6186/Kpts-II/2002, Unit TNKW sebagai Institusi Pemerintah setingkat Eselon IV.a ditingkatkan statusnya menjadi Balai TNKW setingkat Eselon III.a, dipimpin oleh Kepala Balai yang keberadaannya dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal PHKA dengan tugas "melaksanakan pengelolaan ekosistem kawasan taman nasional dalam rangka konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku".

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.29/Menhut-II/2006 ditetapkan perubahan nama Taman Nasional Kepulauan Wakatobi menjadi Taman Nasional Wakatobi. Taman nasional Wakatobi memiliki Visi dan Misi mengacu pada misi dan visi Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen Kehutanan.

Visi :

“Terwujudnya TNW yang mantap, dinamis dan lestari serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah secara berkelanjutan”.

(Mantap dari aspek kawasannya, dinamis dari aspek pengelolaannya, lestari dari aspek sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya).

Misi :

1. Mempertahankan status kawasan yang telah ditata batas secara fisik baik batas kawasan maupun zonasinya, memiliki status hukum yang jelas, sistem pengelolaan yang mantap dan dinamis, memperoleh pengakuan dan dukungan baik dari pemerintah Kabupaten Wakatobi dan masyarakat.;
2. Mempertahankan keutuhan, kualitas dan daya dukung SDAHE kawasan TNW dan terjaminnya sistem penanganan limbah yang baik, yang dapat memberikan manfaat bagi perikanan berkelanjutan dan pariwisata bahari pada zona pemanfaatan pariwisata dan kawasan disekitarnya dan untuk pengembangan pendidikan dan penelitian kelautan serta tergali dan termanfaatkannya potensi jasa lingkungan dan wisata alam.
3. TNW dikelola oleh organisasi yang mantap yang memiliki SDM yang profesional, sarpras yang memadai, sistem pengelolaan adaptif dan didukung pendanaan berkelanjutan.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakatobi merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten ini memiliki pemandangan bawah laut yang cukup indah untuk diperhitungkan dalam skala nasional maupun internasional. Dengan segala keunikannya sehingga Wakatobi ditetapkan sebagai bagian dari *taman nasional* di Indonesia serta oleh UNESCO sebagai *cagar biosfer* dunia. Berbeda dengan kabupaten lain yang ada di Sulawesi Tenggara, keunikan ini hanya dimiliki oleh Kabupaten Wakatobi. Alasan inilah menyebabkan Wakatobi dijadikan sebagai *icon* pariwisata Sulawesi Tenggara. Terlebih kebanyakan kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara merupakan daerah pertambangan, yang logikanya tidak akan sejalan dengan logika pelestarian. Pertambangan identik dengan eksplorasi serta 'pengrusakan' alam sedang pariwisata identik dengan pelestarian alam.

Sebagai *icon* pariwisata, perlu dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah sebagai *stakeholder* yang paling bertanggung jawab dalam penyelenggaraan negara, memiliki kewajiban yang lebih dalam mengembangkan potensi alam (pariwisata) yang ada. Apalagi era amanah desentralisasi agar setiap pemerintah daerah untuk lebih memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Di samping pemerintah, peran kepentingan lain juga sangat diperlukan. Pemerintah

tidak dapat bergerak sendiri karena selain kompleksitas permasalahan yang harus dihadapi dalam proses pembangunan, juga terdapat elemen masyarakat lain yang perlu dilibatkan partisipasinya.

Secara garis besarnya terdapat tiga elemen penting dalam menjalankan roda pemerintahan yakni pemerintah, swasta dan masyarakat. Keefektifan tujuan penyelenggaraan negara apabila didukung oleh sinergitas yang proporsional ketiga komponen ini.

A. Peran Pemerintah

Pemerintah merupakan representasi dari negara yang diamanahkan oleh rakyat melalui mekanisme 'kontrak sosial' (pemilu). Mekanisme ini dimaksudkan agar pemerintah memainkan peran penting dalam memenuhi hak-hak sosial rakyatnya. Dalam perekonomian, pemerintah bertanggung jawab atas pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus dapat melihat potensi yang dimiliki oleh daerah maupun masyarakatnya, kemudian dimanfaatkan untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakat yang dipimpinnya.

Dalam konteks Wakatobi, pemerintah memiliki peran yang penting dalam memanfaatkan potensi alam yang dimiliki oleh daerah ini. Wakatobi yang memiliki potensi wisata yang baik, akan menjadi sarana penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mewujudkan itu, pemerintah harus semaksimal mungkin mendukung pengembangan potensi alam ini. Apalagi dalam era reformasi, Wakatobi telah menjadi

daerah pemekaran baru yang diharapkan dengan potensi alam berupa pariwisata dapat menjadi alasan untuk menciptakan kemakmuran yang menyeluruh bagi masyarakat di Kabupaten ini.

1. Pembangunan Bandara Udara

Banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah (pusat dan daerah) dalam hal pengembangan pariwisata. Tentunya hal utama yang dilakukan adalah mengembangkan infrastruktur yang mendukung segala aktivitas kepariwisataan, salah satunya bandara udara. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Ali Ma'ruf, salah satu pejabat dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Wakatobi:

“.....Sangat jelas bahwa infrastruktur bandara udara adalah hal yang penting bagi kemajuan ekonomi apalagi Wakatobi merupakan daerah pariwisata. Dengan bandara udara para wisatawan akan mudah masuk dan keluar Wakatobi. Karena alasan inilah sehingga bandara udara di Wakatobi dihadirkan⁴⁸”

Infrastruktur merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan jika menginginkan pembangunan ekonomi yang baik. Infrastrukturnya yang mempermudah pergerakan barang, jasa serta manusia sehingga perputaran uang bisa terjadi dengan begitu cepat. Sebagaimana oleh Meiningtyas Dwi Hidayatika (2007) menjelaskan infrastruktur ekonomi termasuk jalan, bandara udara, listrik, telekomunikasi dapat mengintegrasikan kegiatan perekonomian sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi⁴⁹. Oleh karena itu salah satu indikator dalam

⁴⁸ Wawancara 28 April 2014

⁴⁹ Meiningtyas Dwi Hidayatika. *Peran Infrastruktur.....* (Jakarta: FE UI, 2007), hal. 19

melihat maju tidaknya ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari seberapa baik dan layak infrastruktur yang dimilikinya.

Meskipun sampai sekarang jalan raya, listrik, transportasi antarpulau masih memprihatinkan namun pemerintah lebih mengutamakan pembangunan bandara udara. Tidak dapat dimungkiri, bandara udara merupakan hal yang krusial bagi keluar masuknya secara cepat manusia kesuatu daerah. Terlebih jika pemerintah Wakatobi menginginkan lonjakan wisatawan karena moda transportasi yang baik merupakan faktor yang sangat penting. Di satu sisi, jika dikomparasikan antara bandara dan kurangnya perhatian terhadap transportasi laut yang menghubungkan penduduk yang tersebar di Kepulauan Wakatobi, maka kita akan melihat dua hal yang kontras. Transportasi laut sebagai simbol masyarakat ekonomi kelas menengah kebawah dan bandara sebagai simbol ekonomi kelas atas. Padahal mayoritas penduduk Wakatobi masih lebih menggunakan transportasi laut dibanding bandara udara.

Sebenarnya, sebelum mekar dari Kabupaten Buton, Kabupaten Wakatobi telah memiliki bandara udara. Bandara ini bukanlah milik pemerintah melainkan milik swasta yakni salah satu resort di Wakatobi yang dimiliki oleh pengusaha asing asal Swiss (PT WDR). Resort ini menyewah tanah-tanah milik masyarakat lokal untuk membangun bandara udara. Pasalnya saat itu tidak ada transportasi yang layak untuk mempermudah para wisatawan masuk berkunjung ke resortnya. Dengan kemampuan finansial yang besar sehingga mereka berhasil membuka

keterisolasian resort dari dunia luar. Sayangnya bandara udara ini hanya digunakan untuk kepentingan bisnis semata. Pihak resort tidak mengizinkan penggunaan bandara untuk penerbangan sipil. Sehingga untuk membantu mobiltas manusia untuk keluar masuk Wakatobi selain tujuan wisata, tidak terjadi. Efek lainnya, ekonomi masyarakatpun akan sulit berkembang.

Padahal sebagai daerah pariwisata yang membutuhkan kunjungan wisatawan, mengharuskan sarana yang mempermudah aksesibilitasnya. Tanpa ada sarana tersebut sebuah daerah akan terisolasi dari dunia luar sehingga perekonomian serta informasi akan sulit berkembang. Kondisi inilah yang menyebabkan pemerintah membangun bandara udara alternatif di Ibu Kota Kabupaten, untuk melayani penerbangan sipil. Dengan hadirnya bandara setidaknya mobilitas manusia untuk masuk dan keluar Wakatobi menjadi cepat terjadi.

2. Promosi

Selain bandara udara, hal yang tidak kalah pentingnya adalah mempromosikan segala potensi unggulan yang dimiliki Wakatobi, terutama pariwisata. Sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Dili, kepala promosi dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Wakatobi: *“.....Tentunya Kami menawarkan potensi unggulan yang dimiliki*

Wakatobi, dalam hal ini pariwisata agar lebih dikenal oleh masyarakat luas baik nasional maupun internasional⁵⁰”

Berbagai promosi dilakukan, misalnya dengan melaksanakan pameran dan *even-even*, baik yang berskala nasional maupun internasional. Misalnya pada tahun 2012 sail wakatobi digelar, dimana Wakatobi sebagai tuan rumah. Sail ini dihadiri bukan hanya pihak-pihak yang ada di dalam negeri melainkan juga di beberapa negara lain. Melalui momentum ini Wakatobi semakin memperkenalkan diri dengan berbagai potensi yang ada, termasuk menghadirkan keunikan budaya yang dimiliki. Meskipun sail setiap tahun digelar diberbagai daerah, misalnya untuk tahun ini rencanakan di Raja Empat, Papua namun dalam mekanismenya setiap daerah wisata termasuk Wakatobi akan dikunjungi (disinggahi) oleh kapal-kapal yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Secara otomatis peserta sail, akan kembali lebih mengenal Wakatobi.

Kegiatan lainnya juga agar Wakatobi lebih dikenal adalah pada tahun 2007 mengadakan “seminar tentang tradisi lisan”. Kegiatan yang berskala internasional ini dihadiri berbagai pihak serta akademisi dari beberapa negara. Seminar ini diklaim sebagai prestasi tersendiri, karna harusnya kegiatan berskala internasional seperti ini dilakukan oleh pihak Provinsi Sulawesi Tenggara, namun kabupaten Wakatobi berhasil melakukannya. Kegiatan ini memang sengaja diadakan untuk mengundang perhatian khusus termasuk media untuk lebih

⁵⁰ Wawancara 28 April 2014

memperkenalkan Wakatobi ke dunia internasional. Apalagi menyangkut kebudayaan dan kearifan lokal suatu bangsa.

Cara lain yang juga dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengadakan beberapa lomba (kompetisi). Hal yang pernah dilakukan adalah mengadakan lomba foto bawah laut. Dengan lomba ini, hasil dari pemotretan akan dipublikasikan. Secara tidak langsung publikasi atau kompetisi foto ini menjadi cara lain sehingga keindahan laut Wakatobi semakin dikenal oleh masyarakat luas. Apalagi hari ini, media menjadi entitas yang sangat krusial dalam pembentukan opini (promosi) atas sesuatu. Bahkan sesuatu yang kurang bagus akan sangat mudah dipoles menjadi sesuatu yang lebih menarik.

Melihat pentingnya peran media di era modern ini, pemerintah Wakatobi tidak tinggal diam. Apalagi persaingan global semakin mengemuka dalam memenangkan pertarungan ekonomi. Tidak hanya dalam skala nasional, misalnya antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Antara Kabupaten/Provinsi dengan Kabupaten/Provinsi lainnya. Melainkan juga antar negara yang memiliki potensi keindahan alam dengan segala keunikannya. Oleh karena itu, jika media tidak digunakan maka suatu daerah akan ketinggalan jauh dalam pembangunan dibanding daerah lain yang memanfaatkan peran media. Faktor inilah yang membuat pemerintah Wakatobi lebih gencar menggunakan media dalam melakukan promosi.

Berbagai iklan digunakan untuk memperkenalkan Wakatobi ke masyarakat Indonesia hingga ke dunia internasional. Media elektronik, cetak atau brosur-brosur dan sejenisnya, namun yang paling spektakuler adalah menggunakan dunia perfilman. Pemerintah Wakatobi menggunakan film sebagai langkah yang cukup ampuh dalam mengenalkan secara jelas dan gamblang keindahan yang dimiliki oleh Wakatobi. Apalagi film memiliki kemampuan menghipnotis para khalayaknya dengan audio-visual yang dimiliki. Bertebaranlah film-film yang disebar diberbagai jejaring media sosial terutama di *you tube*. Selain *you tube*, yang jarang dilakukan oleh pemerintah daerah lain adalah membuat film kemudian dikomersilkan bekerja sama dengan jaringan bioskop-bioskop di seluruh Indonesia. Kita mengenal film "*The mirror never lyes*" yakni sebuah film tentang Wakatobi yang mengangkat khazanah kehidupan unik masyarakat Bajo di Wakatobi. Dengan Film ini, apalagi diperankan oleh artis-artis nasional dan ditayangkan melalui bioskop-bioskop di Indonesia, menjadikan Wakatobi lebih dikenal sehingga ketertarikan untuk berkunjung ke Wakatobi semakin besar.

Dalam proses pembangunan dalam aspek apapun, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah juga butuh kerja sama dengan berbagai *stakeholder* atau siapapun yang berkepentingan di situ. Dalam pengembangan pariwisata, pemerintah Wakatobi pernah melakukan kerja sama dengan pemerintah Bali. Tepatnya pada tahun 2013, kedua daerah ini melakukan kerja sama dalam hal promosi pariwisata. Namun ketika

2014, kerja sama ini dievaluasi kembali, hingga akhirnya tidak bisa dilanjutkan. Karena menurut pihak dinas pariwisata Wakatobi, kerja sama antara kabupaten dibidang promosi seperti ini, tidak bisa dilakukan. Kerja sama semacam ini harus terjadi dalam lintas pemerintah Provinsi .

Promosi kepariwisataan bukan hanya untuk mendatangkan para wisatawan, melainkan juga untuk menggugah kehadiran para pemilik modal untuk menanamkan modalnya di Wakatobi, karena dalam membangun perekonomian peran pemerintah tidak cukup. Butuh bantuan atau peran pihak lain terutam investor dalam hal pendanaan. Kehadiran investor-investor ini diharapkan memberikan efek bagi pertumbuhan ekonomi. Selain kehadiran investor, promosi ini diharapkan menjadikan geliat pengembangan pariwisata semakin terasa sehingga dapat melahirkan *multy effect* bagi partisipasi masyarakat lokal.

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam negara demokrasi, terdapat dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Pemerintah sebagai representasi dari negara dan masyarakat sebagai kelompok non negara. Kedua unsur ini harus berjalan bersama serta saling melengkapi satu sama lain. Negara tidak bisa berjalan sendiri, karna membutuhkan masyarakat untuk membantu melaksanakan program-programnya. Kehadiran masyarakat yang 'kuat', juga dapat menjadi alat kontrol pemerintah agar tidak menyimpang dari tujuan penyelenggaraan negara. Demikian juga masyarakat yang tidak

bisa berjalan sendiri tanpa pemerintah. Terlebih pemerintah melalui mekanisme pemilihan umum (kontrak sosial) telah dipercayai sebagai wakil yang dapat mengurus dan membantu pemenuhan hak-hak masyarakat.

Pemerintah Wakatobi menyadari hal ini. Dalam pengembangan pariwisata, pemerintah juga melakukan kerja sama dengan masyarakat. Salah satu langkah yang diambil adalah memberikan pelatihan atau bantuan. Misalnya pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan sumber daya manusia. Pelatihan-pelatihan terkait bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata. Hal ini dikatakan oleh Bapak Ali Ma'ruf, salah satu pejabat dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Wakatobi:

“Cara kami untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, adalah dengan mengadakan pelatihan-pelatihan terkait pengembangan pariwisata, misalnya pelatihan menjadi pemandu wisata⁵¹”

Dari pelatihan-pelatihan itu itu bukan hanya program pemerintah daerah, melainkan banyak dari pemerintah pusat. Misalnya terdapat beberapa desa wisata yang digagas oleh kementerian pariwisata. Tapi sayang, desa wisata ini mengalami penyusutan jumlah. Sebelumnya pada tahun 2013 terdapat tujuh desa wisata dan pada tahun 2014 akhirnya menyusut menjadi empat desa wisata⁵². Di sinilah pelatihan-pelatihan peningkatan SDM terkait kepariwisataan di lakukan. Di sana pula terdapat

⁵¹ Wawancara, tanggal 28 April 2014

⁵² Keterangan Bapak Ali Ma'ruf salah satu pejabat dinas pariwisata dan kebudayaan Wakatobi, dalam wawancara 28 April 2014

pelatihan-pelatihan usaha kecil menengah bagi masyarakat. Meskipun hal ini masuk kurang maksimal dan kurang dirasakan oleh masyarakat Wakatobi secara umum.

Selama ini sering ditemukan, masyarakat diposisikan sebagai kelompok yang pasif dalam pembangunan. Mereka hanya dijadikan objek rekayasa untuk tujuan pembanguna saja. Padahal masyarakat adalah entitas yang aktif sehingga diperlukan peran sertanya. Masyarakat tidak boleh diposisikan sebagai objek pembanguna yang pasif. Masyarakat harus dilibatkan baik secara langsung maupun tidak. Apalagi yang tahu pasti kebutuhan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri. Sehingga gagasan-gagasan yang lahir dari masyarakat serta keterlibatan langsung menjadi hal yang mutlak, jika ingin menciptakan ekonomi yang partisipatif dan merata.

4. Mendukung Sanggar Seni dan Budaya

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah juga membantu dalam pembangunan sanggar-sanggar seni budaya. Bahwa kepariwisataan tidak akan lepas dari kebudayaan. Keduanya merupakan dua hal yang integral, tidak dapat dipisahkan. Meskipun Wakatobi terkonsentrasi pada wisata bawah laut namun *multy effect* terhadap kebudayaan sangat erat. Bahkan keduanya saling menopang satu sama lain. Para wisatawan yang datang berkunjung tidak cukup hanya melihat

keindahan bawah laut saja. Mereka akan lebih puas, jika lebih mengeksplorasi keindahan daratan dalam hal ini budaya.

Sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Dili, kepala promosi pariwisata Kab. Wakatobi:

“.....Kami menyadari hal itu sehingga kami juga mendukung keberadaan seni dan budaya, meskipun kami menyadari masih belum maksimal⁵³”

Kebudayaan mencakup banyak hal. Fakta di lapangan menunjukan, kecenderungan pemerintah adalah lebih pada bagaimana mendukung sanggar seni budaya terutama pada tarian daerah. Dalam promosi wisata, tarian daerah berikut lagu daerah menjadi hal yang penting. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Apalagi kebudayaan adalah identitas sebuah daerah. Para wisatawan akan lebih menyukai keunikan yang berbeda dengan identitas yang dimilikinya. Maka sangat berasalan jika kebudayaan menjadi perhatian khusus.

Telah banyak kali pemerintah Wakatobi melakukan pameran dalam dan di luar negeri, dengan mempromosikan segala kebaikan yang ada di Wakatobi termasuk beberapa kebudayaan berupa tarian daerah yang ada. Muhammad Dili kembali mengungkapkan:

“.... Kami sering mengadakan pameran termasuk pertunjukan budaya. Misalnya belum terlalu lama ini kami mengadakan promosi budaya termasuk pariwisata di gedung senayan, Jakarta. Juga di

⁵³ Wawancara 28 April 2014

Australia dengan membawa beberapa tarian daerah yang merupakan simbol kebudayaan Wakatobi, tak terkecuali pariwisata⁵⁴”

Harus diakui bahwa melakukan promosi melalui pameran-pameran, akan memberikan *multy effect*. Sebab pameran akan menyertakan peran kebudayaan. Misalnya sanggar-sanggar atau komunitas seni budaya masyarakat lokal juga akan diikuti sertakan. Komunitas-komunitas ini digunakan untuk menampilkan identitas kebudayaan yang dimiliki Wakatobi. Kita tahu bersama segala keunikan budaya yang terdiri dari tariran daerah, lagu daerah, makanan tradisional dan lainnya, akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung selain berwisata bawah laut.

Melihat peran dan sinergitas budaya terhadap pariwisata, maka pemerintah juga melakukan kerja sama dengan masyarakat lokal untuk pengembangan budaya. Di Wangi-Wangi sebagai Ibu Kota Kabupaten Wakatobi terdapat beberapa sanggar-sanggar budaya dan seni yang ada dan mendapat bantuan dari pemerintah. Lebih lanjut Muhammad Dili mengatakan:

“..... Karena kami sadar, kami tidak dapat bergerak sendiri. Maka kami bekerja sama dengan masyarakat untuk mengembangkan seni dan budaya untuk lebih membantu promosi pariwisata. Karenanya kami juga memberikan insentif-insentif demi mendukung keberadaan sanggar-sanggar ini⁵⁵”

Di lapangan geliat dalam pengembangan budaya tidak begitu terasa. Bahkan tanpa bantuan pemerintah pun mereka akan sendirinya menghidupkannya. Misalnya di Ibu Kota Kabupaten Wakatobi, terdapat

⁵⁴ Wawancara 28 April 2014

⁵⁵ Wawancara 28 April 2014

salah satu tradisi kebudayaan yang bernama 'kabuea'. Tradisi ini biasanya dilakukan dalam momentum-momentum yang sudah ditetapkan secara turun temurun. Lagi pula jika dilihat lebih dalam lagi, sanggar seni budaya ini terkesan diskriminasi. Peralnya, sanggar-sanggar seni budaya ini hanya berada di Ibu kota kabupaten Wakatobi sedangkan di kecamatan lain di luar Pulau Wangi-Wangi (Ibu kota Kabupaten), tidak mendapatkan bantuan sehingga sangat jarang bahkan tidak ada kelompok-kelompok seni budaya seperti itu.

5. Peran Taman Nasional Wakatobi (TNW)

Taman nasional Wakatobi merupakan sebuah wilayah khusus yang memiliki keanegaraman hayati yang cukup unik, sehingga kehadirannya adalah untuk melakukan fungsi konservasi terhadap kekayaan hayati di dalamnya. Taman nasional wakatobi berada di bawah naungan atau perpanjangan tangan dari Kementrian Kehutanan Republik Indonesia. Secara historis, taman nasional hadir melalui SK. Menhut RI No. 7651/Kpts-II/2002. Hal ini bukanlah tanpa alasan, melainkan berangkat dari keunikan yang dimiliki oleh bawah laut wakatobi. Wakatobi memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Terdapat 750 dari total 850 spesies koral yang ada di dunia. Lebih dari 112 jenis karang dari 13 famili. Kekayaan ikan yang dimiliki taman nasional ini sebanyak 93 jenis. Tidak hanya itu, perairan wakatobi juga di kenal sebagai taman bermain bagi paus-paus sperma yang melintas dua samudra, pasifik dan hindia. Sebelum label ini diberikan, telah mengalami proses yang cukup panjang,

dari Survey Penilaian Potensi Sumberdaya Alam Laut Wakatobi tahun 1987 (Surat Dirjen PHPA Tanggal 9 tahun 1987) hingga akhirnya pada tahun 2002 melalui SK kementrian kehutanan tersebut.

Dengan keunikan itu, maka tugas taman nasional adalah melakukan konservasi agar ekosistem serta keunikan bawah lautnya tetap terjaga. Konsep ini akan sejalan dengan konsep pariwisata, karena paradigma pariwisata adalah paradigma keindahan dan pelestarian. Jika suatu destinasi wisata kurang menarik maka destinasi wisata itu akan ditinggalkan pengunjungnya.

Dalam perannya dalam pengembangan pariwisata, taman nasional memiliki andil yang cukup besar. Taman nasional melakukan konservasi sehingga bermanfaat bagi pelestarian ekosistem bawah laut. Namun konservasi tidak hanya bermakna pada perlindungan saja. Konservasi menurut taman nasional adalah mencakup tiga fungsi yakni perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Lafasah, kepala perlindungan dan pengawetan TNW:

“Secara garis besarnya tujuan dari keberadaan taman nasional wakatobi ini adalah konservasi yakni untuk menjalankan fungsi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan⁵⁶.”

Untuk menjaga kerusakan atau ancaman maka fungsi perlindungan memainkan peran yang penting. Dalam strategi perlindungan, pihak taman nasional Wakatobi melakukan pemetaan wilayah atau sistem

⁵⁶ Wawancara Jumat, 4 April 2014

zonasi terhadap wilayah laut. Zonasi ini diharapkan agar ada pembagian wilayah kerja sesuai dengan fungsinya masing-masing, sehingga tidak ada tumpang tindih antar wilayah satu dan lainnya. Apalagi melihat berbagai keindahan bawah laut Wakatobi yang masih tergolong alami, maka perlu ada pelestarian. Selain itu dalam pengembangan ekonomi, pariwisata menjadi potensi alam tumpuan Kabupaten Wakatobi. Belum lagi nelayan atau masyarakat lainnya yang memanfaatkan laut untuk kepentingan ekonominya, serta berbagai kepentingan lainnya.

Melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Nomor. SK.149/ IV-KK/2007, taman nasional dibagi menjadi beberapa zona. Masing-masing zona tersebut adalah Zona Inti (ZI), Zona Perlindungan Bahari (ZPB), Zona Pariwisata (ZPr), Zona Pemanfaatan Lokal (ZPL), Zona Pemanfaatan Umum (ZPU), dan Zona Khusus/ Daratan (*Land Zone*)⁵⁷. Dari ke-6 zona tersebut, Zona Inti (ZI), Zona Perlindungan Bahari (ZPB), dan Zona Pariwisata (ZPr). Zonasi-zonasi ini berfungsi sebagai pembatasan bagi aktivitas-aktivitas agar sesuai dengan peruntukannya. Misalnya zona pemanfaatan umum dimanfaatkan sebagai wilayah yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja dan untuk keperluan apa saja selain pengrusakan. Zona pariwisata diperuntukan untuk kegiatan pariwisata misalnya penyelaman. Sebagaimana dikatan oleh Bapak Lafasah sebagai kepala perlindungan dan pengawetan TNW:

⁵⁷ <http://wakatobinationalpark.com> (Website resmi Taman Nasional Wakatobi)

“Secara umum, sistem zonasi ini dibagi beberapa bagian diantaranya yakni zona inti, pemanfaatan umum, pariwisata. Setiap zona memiliki aturan khusus dalam pemanfaatan. Misalnya pariwisata diprioritaskan untuk tujuan pariwisata sedangkan aktivitas nelayan seperti penangkapan ikan tidak bisa dilakukan. Aktivitas nelayan hanya bisa dilakukan di zona khusus juga misalnya salah satunya di zona pemanfaatan umum⁵⁸”

Kelima zona ini memiliki tujuan masing-masing secara berbeda. Untuk mendukung perkembangan pariwisata, sengaja dilakukan pemetaan wilayah khususnya zona pariwisata. Di zona ini, ekosistem bawah laut terutama terumbu karang dan ikan cukup bagus untuk memuaskan bagi para wisatawan. Apalagi secara geografis, Wakatobi memiliki wilayah yang cukup strategis. Memiliki posisi yang merupakan pertemuan arus sehingga lalu lintas hewan-hewan laut terutama berbagai jenis ikan, sangat mudah terjadi. Berbagai jenis ikan inilah yang merupakan daya tarik tersendiri bagi destinasi pariwisata di Wakatobi. Apalagi menurut Bapak Lafasah kepala bagian perlindungan dan pengawetan:

“Sebagai salah satu tujuan wisata, Wakatobi lebih baik dibanding beberapa daerah lain. Bahkan yang sering disebut oleh kebanyakan orang sekalipun, seperti Raja Empat di Papua. Karena jika terumbu karang, semua daerah wisata bawah laut, bisa dikatakan semua hampir memiliki keindahan yang sama. Namun, berbagai jenis ikan akan menjadi pembeda dan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Nah, disinilah keunikan yang dimiliki oleh Wakatobi. Arus air yang cukup dinamis sehingga kita dapat menyaksikan berbagai pergerakan jenis-jenis ikan termasuk ikan paus yang melintas antara dua samudra yakni Samudra Pasifik dan Hindia. Sedangkan destinasi pariwisata Raja Empat tidak lebih baik dalam hal keberadaan ikan karena arus laut Raja Empat cenderung stagnan⁵⁹”

⁵⁸ Wawancara, Jumat 4 April 2014

⁵⁹ Wawancara, Jumat 4 April 2014

Selain pembagian zona agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemanfaatan laut, taman nasional wakatobi juga memiliki tugas untuk menjaga kelestarian ekosistem bawah laut dari ancaman manusia dalam hal ini orang-orang yang melakukan penangkapan ikan dengan pemboman, bus serta penangkapan dengan alat tangkap lain yang membahayakan keanekaragaman hayati. Serta menjaga beberapa biota laut yang dilindungi, semisal ikan napoleon. Karena jenis ikan mulai mengalami degradasi jumlah.

Fungsi perlindungan ini saling mendukung dengan fungsi (tujuan) berikutnya yakni pengawetan. Dalam fungsi ini, pihak taman nasional wakatobi melindungi beberapa hal yang penting bagi kelestarian ekosistem bawah laut. Diantaranya adalah menjaga penangkapan ikan secara berlebihan (*over fishing*).

Ketiga adalah fungsi pemanfaatan. Kebanyakan orang menganggap taman nasional wakatobi hanya melakukan konservasi agar kelestarian bawah laut terus terjaga atau konservasi hanya dimaknai sebatas perlindungan saja. Dalam pandangan taman nasional wakatobi, konservasi tidak hanya perlindungan. Konservasi dapat dimaknai juga sebagai pemanfaatan, pemberdayaan terhadap masyarakat hingga pendidikan.

Dalam fungsi pemanfaatan, taman nasional wakatobi melakukan beberapa hal yang dapat membantu masyarakat dalam merespon pariwisata. Misalnya taman nasional Wakatobi menggarap lima desa konservasi di Wakatobi. Tidak hanya itu, taman nasional wakatobi juga melakukan membuat komunitas pecinta alam di tingkat masyarakat, pelatihan *guide* dan pelatihan penyelamanan. Dengan ini masyarakat setempat tidak hanya pasif dalam menyambut perkembangan pariwisata namun diharapkan masyarakat dapat terlibat langsung terutama dalam partisipasi di bidang ekonomi.

Keberadaan taman nasional Wakatobi merupakan hal yang baik. Konservasi sebagai alasan keberdaannya, bukan hanya sebatas perlindungan seperti kebanyakan orang memahaminya. Konservasi juga melingkupi pemanfaatan serta pemberdayaan masyarakat. Diharapkan akan menjadikan kelestarian serta keindahan bawah laut tetap terjaga serta masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Terpenting adalah akan menjadi penyokong keberadaan industri pariwisata di Wakatobi.

B. Kepentingan Swasta

Dalam menjalankan program-program pembangunan, negara tidak bisa berjalan sendiri. Sekuat apapun sebuah negara pasti membutuhkan pihak lain dalam menjalankan tujuannya. Selain masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, juga swasta yang memiliki kepentingan

yang sama. Apalagi di era globalisasi, semua dunia terhubung semakin cepat. Pergerakan barang, jasa, informasi hingga manusia terjadi sedemikian cepat.

Dalam suasana globalisasi seperti ini, kita mulai terseret masuk kedalam mekanisme yang diciptakannya. Sistem ekonomi negara-negara di dunia tak terkecuali Indonesia mulai terintegrasi dalam sistem ekonomi global. Sementara sistem ekonomi yang berkuasa dalam arus globalisasi adalah mekanisme pasar bebas. Banyak yang mengidentikannya dengan neoliberalisme. Seperti yang dikatakan Mansour Fakih (2008), neoliberalisme pada substansinya adalah sama dengan kapitalisme. Keduanya menyandarkan kinerjanya pada mekanisme pasar bebas⁶⁰.

Keterhubungan wilayah satu dengan yang lainnya, konsep ekonomi ini juga semakin diadopsi oleh pemerintah Indonesia. Tidak hanya di pusat bahkan di daerah-daerah pun mengalami hal yang sama. Neoliberal ini kemudian semakin mendapatkan tempat ketika kebijakan otonomi daerah digulirkan. Melihat momentum dan peluang ini, aktor-aktor utama dalam sistem neoliberal tidak tinggal diam. Aktor-aktor dalam hal ini adalah pihak swasta mulai melakukan upaya-upaya ekspansi ekonomi dengan segala cara. Dengan target menguasai kekayaan alam yang ada di suatu daerah. Hal ini diperjelas oleh Ahmad Erani Yustika (2009), menurutnya dalam neoliberal akan menguat peran modal atau swasta (korporasi) dalam

⁶⁰ Mansour Fakih. *Jalan Lain, Manifesto Intelektual Organik*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 192

mempengaruhi aspek lain lainnya dan pasar akan menjadi instrument tunggal dalam perekonomian⁶¹.

Kasus ini terjadi pada Kabupaten Wakatobi. Swasta atau pemodal menjadi pemain utama, akan dibiarkan berkompetisi secara bebas karena dalam prinsipnya segala hambatan harus disingkirkan. Negarapun kian mengalami degradasi fungsi. Negara yang harusnya bisa menjadi aktor utama untuk mengurus ekonomi rakyatnya, harus diminimalisasi. Bagi penganut paham ini, keterlibatan lebih jauh negara dalam pasar justru akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi.

Wakatobi yang memiliki kekayaan wisata, telah masuk dalam mekanisme ini. Kini para pemodal besar (swasta) mulai menguasai tempat-tempat strategis untuk tujuan wisata. Hal itu dapat dilihat bagaimana konsep pengelolaan kedua perusahaan milik swasta lokal maupun asing yang kini tengah bercokol di Wakatobi untuk menguasai kekayaan alam berupa pariwisata. Keduanya adalah PT WDR (Wakatobi Dive Resort) dan Patuno Resort.

1. PT WDR (Wakatobi Dive Resort)

Sistem ekonomi yang terbuka membuat siapa saja untuk bebas bertarung dalam persaingan ekonomi. Demikian halnya dalam berinvestasi atau melakukan ekspansi usaha. Logika ini membuat para pemodal besar memiliki peluang besar untuk memenangkan persaingan

⁶¹ Ahmad Erani Yustika. *Ekonomi Politik, kajian teoritis dan analisis empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. xi

ekonomi, sedangkan masyarakat dengan modal kecil sangat sulit untuk bisa bersaing dengan pemodal besar, apalagi untuk mendapatkan labah yang lebih besar. Ditambah lagi dengan minimnya peran negara dalam perekonomian membuat para pemodal besar lebih leluasa dalam berekspansi untuk menanamkan modal serta memperluas usahanya.

Hal ini terjadi salah satunya di Pulau Tomia, Kabupaten Wakatobi. Di pulau ini salah satu destinasi wisata yang cukup diperhitungkan adalah pantai *Onemoba a*. Destinasi wisata ini telah dibangun sebuah industri wisata, PT WDR (Wakatobi Dive Resort) asal Swiss. Perusahaan pariwisata ini sebenarnya lahir sebelum adanya Kabupaten Wakatobi. Yakni sejak wakatobi masih berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Buton. Kemudian tahun 2003 Kabupaten Wakatobi mekar dari kabupaten Buton.

Pantai yang semula sebagai ruang publik setelah adanya korporasi menjadi ruang privat yang sulit untuk dijangkau oleh masyarakat setempat. Aset negara ini kemudian menjadi aset swasta. Tentang konsep pengelolaan destinasi wisata ini, Ahmad Erani Yustika (2009) menjelaskan dalam pandangan sempit, privatisasi merupakan pemindahan aset milik negara kepada swasta sedangkan dalam arti yang luas privatisasi dapat diartikan terjadinya pemindahan pengelolaan perusahaan milik negara kepada swasta tanpa terjadi pemindahan

kepemilikan⁶².

Pengusaha asal Swiss yang bernama Mr. Lorenz ini telah menjadi pemilik (pengelola) utama destinasi wisata di pantai ini. Korporasi ini melakukan privatisasi atas aset publik yang dimiliki oleh Wakatobi. Kini ruang publik kini menjadi ruang privat. Jika sebelumnya masyarakat dengan bebasnya berwisata di tempat ini, kini hal seperti itu tidak bisa lagi dilakukan melainkan harus sesuai prosedur manajemen PT WDR.

Sebelum dijadikan lokasi resort tanah-tanah tersebut adalah milik beberapa keluarga masyarakat setempat. Tapi tanah-tanah ini disewakan kepada PT WDR dengan beragam harga. Masyarakat hanya menikmati keuntungan pada sewa atas tanah ini, itupun hanya para pemilik tanah saja. Masalah lain yang muncul adalah peta konflik yang dihadirkan oleh PT WDR dalam proses peminjaman tanah ini.

Dalam diskusi dengan salah satu pemilik tanah, La Syahwari mengatakan:

“PT WDR ini membuat peta konflik atas tanah. Para pemilik tanah yang umumnya dimiliki oleh keluarga yang terdiri dari beberapa anggota keluarga tapi dalam proses peminjamannya, PT WDR hanya melakukan perjanjian peminjaman dengan beberapa anggota keluarga saja karena kami sebagai salah satu pemilik tanah tidak pernah terlibat dalam transaksi pinjam meminjam itu. Hal ini membuat kami saling mencurigai satu sama lain. Tak jarang dari kami terjadi konflik terbuka⁶³”

⁶² Ahmad Erani Yustika. *Ekonomi Politik, kajian teoritis dan analisis empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 186

⁶³ Wawancara, 13 april 2014

Dalam banyak kasus di Indonesia terutama pada era desentralisasi, konflik tanah menjadi pemandangan yang lumrah. Terutama konflik antara pemilik tanah yakni masyarakat lokal dan perusahaan yang dengan segala cara agar bisa menguasai tanah. Biasanya perusahaan-perusahaan masuk kesuatu wilayah atas kerja sama dengan penguasa lokal (elite politik). Keduanya melakukan kerja sama untuk menguasai sumberdaya ekonomi maupun politik. Apalagi dengan sistem demokrasi liberal yang berbiaya mahal, semakin membuat pengusaha dengan perusahaan-perusahaannya menggunakan uang untuk membantu kemenangan salah satu elite politik dengan deal-deal politik yang sudah disepakati. Dimana keduanya akan sama-sama diuntungkan. Setelah sang elite politik duduk di tahta kekuasaan, janji terhadap penguasa akan diimplementasikan. Fenomena yang dapat dilihat adalah semakin luasnya ekspansi usaha para pengusaha (pemilik modal) dengan segala kemudahan yang diperolehnya. Meskipun kadang rakyat harus dirugikan, termasuk tanah-tanah mereka harus dilepas baik secara paksa maupun 'cara halus'.

Ketika konflik tanah ini muncul, PT WDR justru semakin diuntungkan karena akan lebih berkonsentrasi pada pengembangan usaha korporasi dan akumulasi kekayaan semakin besar. Masyarakat pemilik tanah hanya terfokus pada konflik antara anggota keluarga, yang saling menuding satu sama lain terhadap manipulasi perjanjian atas tanah. Sementara PT WDR telah memiliki legitimasi atas tanah karena telah mendapat bukti transaksi

perjanjian atas nama seluruh keluarga pemilik tanah, meskipun surat perjanjian itu dimanipulasi oleh sebagian pemilik tanah saja karena tidak melibatkan seluruh pemilik tanah.

PT WDR memiliki segala fasilitas dan infrastruktur pendukung lainnya dalam hal pengembangan profit perusahaan. Semua fasilitas ini telah telah berstandar internasional. Pengelolaan resort ini pun cukup eksklusif karena selain cukup jauh dari pemukiman masyarakat Tomia juga sistem pengelolaannya yang cukup tertutup. Di dalam area resort masyarakat tidak bebas masuk apalagi untuk terlibat secara langsung dalam pengelolaan pariwisata demi pengembangan ekonominya.

Infrastruktur lain yang mendukung pengembangan perusahaan ini adalah adanya bandara Maranggo. Bandara ini dimiliki secara pribadi oleh PT WDR yang terdapat di Pulau Tomia. Dengan menyewah tanah warga, bandara ini dibangun untuk memudahkan transportasi masuk ke destinasi wisata yang disediakan PT WDR. Bandara ini bukanlah bandara milik pemerintah, melainkan milik PT WDR sehingga pesawat yang masuk hanya dibatasi untuk wisatawan yang masuk ke pantai *Onemoba a* saja, dimana PT WDR ini berada. Sedangkan penerbangan sipil yang mempermudah mobilitas ekonomi masyarakat Wakatobi tidak dipersilahkan masuk. Wajar jika tahun 2007 pendapat yang dihasilkan oleh PT WDR sekitar sepuluh kali pendapatan asli daerah (PAD)

Wakatobi⁶⁴, karena dengan konsep pengelolaan yang monopoli seperti ini semua keuntungan hanya masuk ke kantong pengelolanya saja yakni pihak swasta asing.

Jika konsep pengelolaan sudah monopolis dan eksklusif seperti ini dengan kata lain kue ekonomi akan lebih banyak masuk dalam kantong pemilik saham (pengusaha). Masyarakat lokal yang harusnya lebih banyak diuntungkan justru hanya menjadi pelaku pasif yang menyaksikan gelagat para pemodal dalam mengeksploitasi kekayaan alam di daerahnya.

2. Patuno Resort

Patuno resort merupakan salah satu perusahaan swasta yang berada di Ibu kota Kabupaten Wakatobi, Pulau Wangi-wangi. Nama Patuno diambil dari sebuah nama desa di Pulau ini yang memiliki pantai yang cukup indah. Pantai ini kemudian diberi nama dengan pantai 'Hugua'.

Selain nama pantai, kata 'Hugua' juga merupakan nama bupati Wakatobi yang berkuasa untuk dua periode yakni sejak tahun 2006 hingga 2016 nanti. Tentunya ada alasan kenapa nama pantai tersebut, sama dengan nama seorang Bupati yang tengah berkuasa. Sebelumnya pantai itu tidak memiliki nama demikian. Kebanyakan orang lebih mengenalnya pantai patuno karena berada di desa patuno. Semua masyarakat menjadikannya sebagai ruang publik untuk bisa diakses oleh

⁶⁴ La Ode Aydin M. *Strategi Pengelolaan Pariwisata Bahari Secara Terpadu dalam Rangka Pendapatan Asli Daerah Wakatobi*. (Jakarta: UT, 2011)

siapa saja tanpa harus membayar. Tapi kini ruang publik itu, telah berubah menjadi ruang privat karena telah dimiliki secara pribadi (privatisasi) atas nama pribadi oleh bupati Hugua.

Terkait pemindahan aset publik menjadi aset pribadi (privatisasi), Coen Husain Pontoh (2005) menjelaskan salah satu doktrin negara neoliberal adalah adanya privatisasi dimana adanya tatanan dunia baru yang dikendalikan oleh pasar dan kekuatan modal, sebuah tatanan yang bergerak meninggalkan peran negara⁶⁵. Hal ini sejalan dengan lemahnya peran negara. Sementara pemodal besar semakin mudah berekspansi untuk menanamkan pengaruh ekonominya. Dengan kata lain dengan modal yang besar, sehingga siapa saja bisa menguasai apa saja.

Sesungguhnya hal itu senafas dengan peraturan daerah (perda) pemerintah Wakatobi nomor 4 tahun 2006 tentang retribusi izin usaha industri dan usaha perdagangan⁶⁶. Perda ini menjelaskan semua orang/badan usaha baik lokal, nasional maupun asing dibebaskan berkompetisi untuk membuka usaha industri dan perdagangan barang maupun jasa. Pemerintah memberikan ruang kepada siapa saja untuk menanamkan modalnya tanpa ada perlindungan yang lebih kepada masyarakat lokal. Padahal memberikan kebebasan tanpa ada pembatasan yang jelas, pemodal akan lebih leluasa berekspansi.

⁶⁵Coen Husain Pontoh. *Malapetaka Demokrasi Pasar*. (Yogyakarta: Resist Book, 2005), hal. x-xi

⁶⁶<http://www.wakatobikab.go.id/regulasi/1/>

Oleh karena itu, wajar jika tanah-tanah di sekitar pantai atau pantai sendiri telah dibeli dari masyarakat dengan kekuasaan uang dan secara tidak langsung didukung oleh otoritas jabatan (kekuasaan) yang dimiliki oleh pribadi seorang Bupati sendiri. Masyarakat yang seharusnya menjadi pemain penting dalam pengelolaan, tidak memiliki kuasa apa-apa. Hanyalah pemilik modal besar akan mampu meraup manfaat yang besar atas kekayaan alam yang ada. Bagi pemilik modal yang kecil terlebih yang tidak ada akan kalah dalam persaingan dalam pasar yang bebas ini. Demikian juga negara yang idealnya terlibat untuk berperan serta dalam pengelolaan aset-aset publik, hanya membiarkan begitu saja gelagat pemilik modal.

Pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan PT WDR yang ada di pulau Tomia. Jika patuno resort dimiliki secara pribadi oleh bupati Wakatobi, Hugua yang merupakan 'putra daerah' maka PT WDR dimiliki oleh pihak asing yakni oleh Mr. Lorenz asal Swiss. Selain itu tanah-tanah dalam patuno resort telah dibeli dan dimiliki secara pribadi untuk selamanya oleh Hugua sedangkan tanah-tanah yang berada di dalam PT WDR hanya dipinjam dalam jangka waktu tertentu. Namun dalam konsep pengelolaan, keduanya tidak berbeda.

Dahulu, sejak awal-awal Kabupaten Wakatobi mekar dari Kabupaten Buton, Pak Hugua sebagai Bupati pertama selalu melempar wacana tentang sebuah nasionalisme. Penulis masih ingat, sang Bupati pernah berkata:

“..... Masa daerah kita dikuasai oleh orang luar negeri (asing)!!!⁶⁷”

Pernyataan itu diarahkan pada perusahaan (resort) milik asing, PT WDR. Pernyataan tersebut terkesan sinis, seolah mengajak kita agar bisa berdaulat secara penuh dari pengaruh asing dalam bidang ekonomi. Sepintas wacana ini cukup nasionalis dan visioner, namun setelah berjalannya pemerintahan Wakatobi dengan dipimpin bapak Hugua hingga sekarang maka pernyataan itu dalam prakteknya bermakna politis. “Raja kecil” ini justru ingin membangun konstruksi berpikir agar siapa saja bisa menguasai sumber daya alam di Wakatobi asalkan bukan orang asing. Maka hadirilah patuno resort dengan kepemilikan atas nama pribadi dengan watak yang sama saja dengan PT WDR.

Patuno resort telah menjadi bukti bahwa raja-raja kecil menjadi penguasa baru di era desentralisasi. Jika di zaman orde baru, terjadi sentralisasi kekuasaan ekonomi dan politik di kekuasaan pusat, kini desentralisasi tidak jauh berbeda. Desentralisasi hanya menggeser dan menyebarkan kekuasaan secara terpusat pada penguasa-penguasa lokal di setiap daerah. Bupati Wakatobi yang berkuasa yang telah masuk pada masa dua periode jabatan ini tidak tinggal diam melihat kekayaan alam yang ada di Wakatobi. Pariwisata yang merupakan kekuatan utama, menjadi komoditas yang sangat strategis untuk dikuasai.

⁶⁷ Kalimat yang dilontarkan bapak Bupati Hugua dalam sebuah diskusi

Di banyak daerah praktek semacam ini lumrah terjadi. Elite-elite lokal saling berebut untuk menguasai politik maupun ekonomi. Dengan memanfaatkan sistem ekonomi yang mengaut pasar bebas dimana kekuasaan modal adalah yang paling memegang kendali, maka para elite lokal ini mendapatkan peluang yang besar. Terlebih para elite lokal umumnya adalah mereka yang sudah dahulu memiliki finansial yang besar atau sebagai pengusaha. Kalaupun belum memiliki finansial yang lebih, maka melalui mekanisme demokrasi liberal para elite lokal bekerja sama dengan pengusaha untuk memenangkan kontestasi politik. Setelah itu mereka membagi-bagi jatah untuk menguasai segala potensi alam yang strategis ada di suatu daerah. Terjadilah privatisasi yakni sumber daya alam yang merupakan kepemilikan umum diubah menjadi kepemilikan pribadi (swasta). Inilah neoliberalisme yang telah menjadi pemandangan tak jarang ditemukan dalam momentum desentralisasi, tak terkecuali di Wakatobi. Sebagai mana yang diungkapkan Sufrin seorang warga Wakatobi yang tinggal tidak jauh dari Patuno Resort:

“Kapitalisme atau neoliberalisme dimana penguasaan secara pribadi atas sumber daya alam oleh segelintir orang di Wakatobi menjadi pemandangan yang mudah dilihat. Itu dapat dilihat dengan keberadaan PT WDR dan Patuno Resort. Parahnya untuk Pulau Wangi-wangi yang merupakan Ibu Kota Kabupaten, bukan pihak asing yang melakukannya. Melainkan oknum pejabat penting dalam Kabupaten Wakatobi sendiri dalam hal ini seorang pribadi Bupati⁶⁸”

Fakta semacam ini secara gamblang memberikan pemahaman bahwa keuntungan hanya akan masuk pada kantong sang pemilik resort.

⁶⁸ Wawancara Sabtu, 25 April 2014

Negara dan masyarakat harusnya menjadi pemain utama dalam pengelolaan ini, cenderung pasif. Tidak ada konsep yang proporsional dalam pengelolaan. Konsep pengelolaan yang monopolis justru meminggirkan hak-hak masyarakat lokal sebagai pemilik utama kekayaan alam di daerahnya. Akhirnya yang paling banyak mendapat manfaat ekonomi di Wakatobi adalah salah satunya Patuno Resort. Rakyat hanya menjadi penonton di negeri (daerah) sendiri. Adapun partisipasi masyarakat hanya sebatas menjadi buruh-buruh yang sangat mudah mengalami pemutusan hubungan kerja. Hampir semua yang menjadi buruh di resort ini masih tergolong sebagai buruh-buruh kontrak⁶⁹.

Sebagaimana yang penulis jelaskan diawal tulisan sebelumnya bahwa patuno resort berada di sebuah pantai yang dinamai dengan nama seorang Bupati yang tengah berkuasa yakni Pantai Hugua. Pantai yang sebelumnya merupakan ruang publik yang terbuka bagi siapa saja untuk menikmati pemandangan yang di dalamnya, kini telah berubah menjadi ruang privat. Jika sebelumnya masyarakat bisa datang berkumpul dan juga sebagai sarana untuk bersosialisasi, kegiatan semacam ini tidak bisa lagi dilakukan tanpa seizin petugas pengelola resort. Bahkan masyarakat yang tinggal di sekitar resort (masyarakat desa Patuno), agak sulit untuk masuk ke dalam pantai. Apalagi untuk mengetahui kondisi serta

⁶⁹ BPS Wakatobi 2013. Dari keseluruhan karyawan yang berjumlah 70 orang, semuanya adalah pegawai kontrak. Saat melakukan penelitian oleh pihak BPS Wakatobi, data ini belum diinput dalam website resminya.

transparansi dalam pengelolaannya. Wa Leja seorang Ibu rumah tangga, tinggal di sekitar patuno resort yang penulis temui mengungkapkan:

“Saya sendiri tidak pernah masuk ke dalam semenjak pantai itu (baca: pantai hugua), sejak dijadikan resort pribadi oleh pak Hugua (bupati Wakatobi) karena mungkin kita dianggap akan mengganggu keadaan di dalam. Pengelolaannya tertutup, apalagi tanah-tanahnya sudah dibeli secara pribadi oleh pak bupati Hugua sendiri”⁷⁰

Keberaaan bandara Matohara menjadi cara yang baik untuk lebih mendukung keberadaan resort sang bupati. Letak bandara yang berada di Ibu kota Kabupaten secara langsung menjadi penopang bagi kemajuan pariwisata. Melalui bandaralah aksesibilitas menuju Wakatobi terlebih menuju Patuno resort mudah terjadi.

Sebenarnya tidak masalah dengan dibangunnya bandara udara, malah perlu diapresiasi karena dengan bandara arus keluar dan masuknya manusia akan semakin mudah sehingga menjadi faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun harus ada keadilan yakni antara kemudahan mobilitas manusia lewat udara dan laut. Secara geografis, Wakatobi adalah Kabupaten kepulauan yang terdiri dari beberapa Pulau kecil. Harusnya transportasi laut menjadi hal yang krusial untuk diperhatikan secara penuh oleh pemerintah daerah. Pasalnya, ada ketidakadilan dalam menyediakan kemudahan layanan transportasi kepada masyarakat. Sejak awal-awal keberadaan bandara, sudah menjadi rahasia umum bawah ada subsidi yang diberikan kepada salah satu maskapai penerbangan agar lebih memepermudah keluar masuknya

⁷⁰ Wawancara Sabtu 25 April 2014

manusia kedalam dan luar Wakatobi. Sedangkan transportasi laut belum maksimal dalam dukungan oleh pemerintah. Seperti dikatakan oleh Sarwan, salah seorang warga sekaligus pemerhati masyarakat Wakatobi:

“Sudah menjadi rahasia umum bahwa di awal-awal bandara ini dibuat, agar orang-orang mudah datang ke Wakatobi maka salah satu maskapai penerbangan diberikan subsidi. Padahal yang hanya bisa naik pesawat adalah masyarakat ekonomi menengah keatas. Harusnya masyarakat ekonomi lemah seperti saya, diperhatikan dengan diberikan subsidi bagi transportasi laut minimal transportasi antarpulau di Wakatobi. Selain itu transportasi antara pulau ini juga belum semua ada. Misalnya ada kasus yang memiriskan belum lama ini terjadi di salah satu pulau kecil (pulau Runduma) yang ada dalam di Kecamatan Tomia. Ada bayi yang meninggal karena kurang mendapat pelayanan kesehatan dan membutuhkan transportasi ke Ibukota Kabupaten namun transportasi laut itu sangat sulit didapatkan⁷¹”

Melihat hubungan bandara udara dan patuno resort cukup bermakna politis. Bandara terkesan mendukung keberadaan patuno resort sehingga tamu-tamu wisatawan akan mudah mengaksesnya. Konsep pengelolaan yang eksklusif dan monopolis justru keuntungan yang besar hanya dimiliki oleh sang pemilik resort dalam hal ini pribadi Bupati sebagai salah satu “raja kecil” di Wakatobi.

Selain itu di antara beberapa resort yang ada, Patuno Resor terkesan mendapat perlakuan yang lebih dibanding resort yang lainnya. Jika Hoga resort yang dikelola langsung oleh masyarakat tidak mendapatkan pasokan listrik dari pemerintah serta PT WDR yang milik asing ini juga tidak mendapat pasokan listrik, maka Patuno Resort mendapat pasokan listrik dari pemerintah. Masyarakat yang tinggal

⁷¹ Wawancara Senin 7 April 2014

disekitar PT WDR pun sampai hari ini belum mendapat listrik dari pemerintah. Demikian pula dengan banyak daerah di Wakatobi yang belum mendapat listrik langsung dari PLN. Hal ini memberikan gambaran bahwa pemerintah belum maksimal membangun infrastruktur kelistikan bagi masyarakat secara umum. Padahal listrik di era dunia yang serba teknologi adalah sebuah keniscayaan.

C. Kepentingan Masyarakat

Tujuan awal dari desentralisasi adalah terjadinya pemerataan ekonomi. Setelah selama ini 32 tahun Indonesia berada dalam era sentralisasi, rakyat tidak secara merata memperoleh keadilan ekonomi bahkan politik. Pusat pembangunan berada di lingkaran kekuasaan pusat. Kue pembangunan pun hanya tersebar disekitaran koroni-kroni penguasa orde baru. Banyak daerah-daerah di Indonesia terutama di luar Jawa mengalami stagnasi pembangunan. Banyak rakyat belum mendapat keadilan ekonomi karena adanya monopoli sumberdaya alam oleh pemerintah pusat. Daerah hanya dijadikan tempat eksploitasi segala kekayaan alam bagi pemerintah pusat.

Pasca reformasi 1998, orde baru jatuh dari tahta kekuasaannya. Saat itu rakyat Indonesia terus bersuara untuk meminta keadilan. Pasalnya banyak sumberdaya alam yang ada di setiap daerah tapi kesajateraan bagi masyarakat di sekitarnya tidak kunjung terwujud. Sebagai implementasinya, terjadilah pembentukan daerah-daerah baru.

Kewenangan pun diberikan lebih besar dibanding sebelumnya. Kini setiap daerah memiliki wewenang untuk mengurus daerahnya sendiri tanpa harus melalaui izin pemerintah pusat.

Jika dilihat kebijakan pasca reformasi ini cukup baik untuk menciptakan pemerataan ekonomi bagi masyarakat. Tapi dalam prakteknya tidak jarang banyak daerah-daerah yang menyeleweng dari tujuan awalnya. Masyarakat daerah yang harusnya lebih banyak mendapat manfaat atas kelimpahan sumber daya alam, malah terpinggirkan. Pada prakteknya, adanya monopoli atau penguasaan secara pribadi atas kekayaan alam tersebut. Masyarakat daerah tidak ada bedanya, mereka tetap menjadi penonton di daerah sendiri. Tidak jauh berbeda dengan orde baru karena desentralisasi justru melahirkan raja-raja kecil di setiap daerah. Rakyat hanya menjadi pelayan bagi raja-raja kecil. Bahkan watak monopoli ekonomi hanya berpindah dari pusat seperti halnya di era orde baru menuju daerah-daerah di era desentralisasi. Masyarakat lokal hanya mendapat imbas yang sedikit, malah hanya menjadi buruh di daerah sendiri. walaupun masyarakat lokal ikut berpartisipasi, jika dibandingkan dengan pemilik-pemilik modal yang besar tergolong masih sangat minim.

1. Menjadi Buruh Resort

Bagaimanapun juga setiap perusahaan membutuhkan karyawan (buruh) demi keberlangsungan perusahaannya. Tahun ini direncanakan akan ada satu lagi resort. Resort ini juga tidak berbeda dengan dua resort

lainnya (PT WDR dan Patuno resort) yakni dikuasai secara pribadi oleh mantan wakil Bupati Wakatobi periode 2006-2011. Harusnya wakil rakyat yang bertugas menjadi pengabdian bagi rakyatnya, justru menjadikan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri.

Jika dilihat secara dalam, tidak salah jika dikatakan konsep yang pengelolaan telah dikuasai oleh rezim neoliberal. Dimana salah satu ciri neoliberal adalah terciptanya kepemilikan individu atas kepemilikan umum (publik). Padahal dalam konstitusi kita UUD 1945 pasal 33, jelas mengatakan bahwa bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Melihat kalimat ini, harusnya penguasaan atas kekayaan alam tetap berada pada negara. Bukan berarti kita menolak swasta (lokal dan asing), tapi kekuasaan swasta harus dikontrol dan dibatasi. Negara harus terlibat secara tegas dalam persoalan pengelolaan kekayaan alam yang strategis. Tapi dalam prakteknya negara sebagai 'macan ompong' yang tidak memiliki kekuasaan apa-apa, selain hanya terlibat dalam pembuatan regulasi yang banyak tidak pro kepada rakyatnya. Inilah negara neoliberal.

Ketika pemodal telah diberikan kebebasan besar untuk masuk dalam perekonomian Indonesia, tak terkecuali di Wakatobi maka secara bertahap kedaulatan ekonomi masyarakat mulai terkikis. Dalam mekanisme neoliberal yang mengagungkan kebebasan pasar hari ini, negara dipaksa untuk tunduk dalam mekanisme pasar. Negara

(pemerintah) hanya bertugas menjaga agar pasar tetap bekerja sebagaimana mestinya, melalui instrument regulasi. Bagi negara neoliberal, terlibat lebih dalam dalam pasar atau perekonomian justru akan bertentangan dengan prinsip neoliberal itu sendiri. Bahkan pertumbuhan ekonomi akan mengalami hambatan.

Kondisi ini memaksakan masyarakat hanya menjadi pemain pinggiran. Masyarakat dengan modal yang kecil tidak akan mampu bertarung dalam kompetisi ekonomi dengan pemodal besar. Dalam kasus Wakatobi, hal itu sangat mudah ditemukan. Pengelolaan pariwisata oleh beberapa resort, hampir semua dikuasai oleh swasta baik lokal maupun asing. Apalagi untuk masuk dalam dunia *entrepreneur*, tidak hanya bermodal keinginan. Melainkan harus memiliki keterampilan serta yang tak kalah pentingnya adalah modal. Belum lagi, tidak semua masyarakat Wakatobi memiliki pengetahuan atau kesadaran untuk berniaga.

Bapak Sarwan, salah satu pemerhati Wakatobi yang juga masyarakat Wakatobi sendiri mengungkapkan:

“.....Sebenarnya kami masyarakat Wakatobi berkeinginan untuk membuka usaha yang berhubungan dengan kepariwisataan, tapi sangat banyak dari kami masyarakat Wakatobi yang tidak memiliki modal dan keterampilan entrepreneur⁷²”

Kondisi inilah yang masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat Wakatobi. Mereka ingin membuka usaha, tapi keterbatasan modal menjadi kendala utama. Sedangkan pemerintah belum sungguh-sungguh

⁷² Wawancara Senin 7 April 2014

membangun perekonomian berbasis kerakyatan dengan memanfaatkan *multy effect* dari kehadiran pariwisata. Tidak mengherankan masyarakat Wakatobi untuk terlibat dalam pengelolaan pariwisata, akhirnya hanya bekerja sebagai buruh. Maklum saja hanya itu peran yang paling mudah dilakukan meskipun sampai hari ini perlakuan terhadap buruh dan kesejateraanannya masih belum bisa terwujud sesuai yang diharapkan.

Realitas ini memaksakan lahirnya gerakan buruh di salah satu resort yakni PT WDR. Organisasi buruh ini merupakan satu-satunya organisasi buruh yang ada di Wakatobi. Lahir pada tahun 2011 ini, karena melihat adanya kesewenang-wenangan pihak perusahaan juga secara tidak langsung adalah pemerintah yang terkesan selalu pro kepada perusahaan. Misalnya sering terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang sering terjadi sebelum tahun 2011 yakni sebelum organisasi buruh ini terbentuk. Juga sebelum tahun itu upah yang diterima buruh di bawah upah minimum regional (UMR). Serta beberapa perlakuan diskriminasi lainnya baik sebelum organisasi buruh ini terbentuk sampai sekarang.

Ahmad Ode Tarani selaku ketua serikat buruh PT WDR mengungkapkan:

“Sebelum tahun 2011 dalam hal ini belum ada serikat buruh di Wakatobi, banyak kesewenang-wenangan terjadi. Pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak sering dialami oleh buruh bahkan sebelum tahun itu upah yang diterima buruh di bawah upah minimum regional (UMR). Begitupun hingga saat ini, misalnya ketika melakukan aksi. Tanpa sebab, tiba-tiba pihak resort yang meminta bantuan kepolisian daerah setempat

*melakukan menangkap terhadap beberapa orang buruh dengan alasan penyerobotan*⁷³”

Tidak jauh berbeda dengan banyak tempat di Indonesia. Desentralisasi selalu meminggirkan hak-hak masyarakat lokal. Kekayaan alam hanya lebih menguntungkan pemilik modal yang besar. Negara atau pemerintah tidak memiliki peran yang besar malah membiarkan diskriminasi terhadap masyarakat lokal terjadi. Masyarakat lokal hanya menjadi penonton dan mendapatkan imbas yang sedikit. Peran mereka pun kadang hanya diminimalisasi hanya sekadar buruh-buruh. Itupun untuk kasus Wakatobi masih banyak buruh yang belum mengalami perlakuan yang adil. Hingga peringatan *may day*, 1 Mei 2014 yang barusan dilewati, mereka terus turun menyuarakan aspirasinya. Padahal banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah selain menjadikan masyarakat lokal menjadi buruh. Dengan memberikan modal usaha yang merata serta insentif lain sehingga dapat berpartisipasi lebih jauh, selain hanya menjadi buruh.

2. Membangun Dive Center

Mansour Fakhri (2009) mengatakan konsep ekonomi neoliberal sangat percaya pada pasar. Hak-hak individu begitu dihargai sehingga dibiarkan berkompetisi sebebaskan-bebasnya, antara pemilik modal besar melawan modal kecil. Di satu sisi negara tidak memiliki peran yang besar dalam melakukan intervensi sehingga pertarungan ekonomi selalu dimenangkan

⁷³ Wawancara, Senin 14 April 2014

oleh kelompok pemilik modal besar⁷⁴. Semua individu memiliki hak yang sama dalam pasar. Negara tidak dibiarkan untuk campur tangan lebih jauh kecuali dalam hal regulasi. Tidak peduli zaman berganti, karena hingga era reformasi yang bertujuan untuk lebih mensejahterakan ternyata tidak terjadi. Penguasaan ekonomi atas sumber daya alam yang strategis selalu dimenangkan oleh pemilik modal yang besar. inilah hukum pasar bebas, siapa yang bermodal besar maka dia akan selalu menang. Sedang yang bermodal sedikit akan kalah atau hanya mendapat hasil yang sedikit pula. Meskipun bertentangan dengan konsep keadilan.

Konsep ini ternyata berlaku dalam pengelolaan pariwisata di Wakatobi. Sebagaimana peraturan daerah pemerintah Wakatobi nomor 4 tahun 2006 tentang retribusi izin usaha industri dan usaha perdagangan⁷⁵. Dalam perda ini menjelaskan semua orang/badan usaha baik lokal, nasional maupun asing dibebaskan berkompetisi untuk membuka usaha industri dan perdagangan barang maupun jasa. Pemerintah memberikan ruang kepada siapa saja untuk menanamkan modalnya tanpa ada perlindungan yang lebih kepada masyarakat lokal. Padahal memberikan kebebasan tanpa ada pembatasan yang jelas, sangat berpotensi merugikan masyarakat lain. Kebebasan tanpa ada timbal balik yang adil, justru adalah sebuah kesalahan. Karena dalam banyak fakta para pemodal besar hanya lebih memikirkan agar lebih banyak menghasilkan

⁷⁴ Mansour Fakihi. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. (Yogyakarta: INSISTPress, 2009), hal. 192-193

⁷⁵ <http://www.wakatobikab.go.id/regulasi/1/>

profit perusahaan dibanding memperhatikan kesejateraan masyarakat setempat.

Kompetisi ekonomi itu bisa dilihat di Wakatobi, dalam pengelolaan pariwisatanya. Para pemodal besar sudah lebih cepat menguasai lokasi-lokasi strategis sebagai tempat destinasi wisata. Umumnya mereka berasal dari kalangan yang memiliki modal yang cukup besar. Hal ini akan sejalan dengan kualitas resort yang dibangunnya.

Tidak mau kalah, beberapa kelompok masyarakat membangun jasa-jasa penyelaman (dive center). Tentunya jika dibandingkan dengan resort yang ada, dive center tersebut sangatlah jauh tertinggal. Rata-rata mereka hanya menyediakan jasa untuk penyelaman dan kadang juga ekowisata lainnya. Untuk jasa penginapan, mereka hanya menyediakan *home stay* dengan kualitas yang sederhana. Tamu wisatawan yang hadir pun berasal dari kalangan ekonomi menengah. Berbeda dengan resort-resort yang dikelola secara swasta tersebut dimana pengunjungnya adalah mereka yang berasal dari kalangan ekonomi ke atas. Di Wakatobi sendiri dive-dive center tidak begitu menjamur. Dalam daftar usaha resort atau dive center kepariwisataan hanya sepuluh buah resort/dive center, tiga buah resort dan tujuh lainnya adalah dive center dengan konsep yang masih sederhana dan modal yang masih minim. Selain itu dive center ini dikelola langsung oleh masyarakat⁷⁶.

⁷⁶ Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Wakatobi

Beberapa dive center ini pun masih minim bahkan tidak sama sekali mendapat perhatian dari pemerintah. Sebagaimana dikatakan oleh salah satu pemilik dive center, Bapak Budianto:

“Selama kami ada sejak tahun 2009 dengan modal yang masih minim, kami hanya bergerak sendiri. Sampai sekarang pemerintah tidak memberi bantuan”⁷⁷

Jika pemerintah maksimal dalam memberi pelayanan kesejateraan pada masyarakatnya, harusnya usaha-usaha kecil menengah demikian mendapat insentif yang cukup termasuk modal usaha. Apalagi jika tidak ingin kalah dalam kompetisi dengan pemilik modal besar, yakni dua resort besar PT WDR dan Patuno Resort. Penulis melihat pemerintah belum begitu intens menciptakan pemerataan ekonomi bagi masyarakat. Padahal amanah reformasi yang telah melahirkan desentralisasi mengharuskan peran pemerintah yang lebih dalam memberdayakan masyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya dimakanai sebagai entitas yang pasif dalam pembangunan. Masyarakatlah yang harus memainkan peran aktif dalam pembangunan terutama di bidang ekonomi yang selama ini terpinggirkan oleh sentralisasi orde baru.

3. Pulau Hoga Resort

Kepentingan masyarakat juga ternyata ada pada resort Pulau Hoga (Hoga Resort). Di Wakatobi hanya satu resort yang dikelola secara partisipatif oleh masyarakat. Selain dive-dive center yang skala modalnya

⁷⁷ Wawancara dengan Budianto, salah satu pemilik dive center. Tanggal 17 April 2014

cukup sedikit dan jumlahnya masih minim, juga terdapat Hoga resort yang berada di Pulau Hoga. Pulau ini berada di sebelah barat Pulau Kaledupa Kabupaten Wakatobi meskipun secara administrasi, Pulau Hoga masih masuk dalam wilayah Kaledupa. Keberadaan pulau hoga sebagai lokasi resort bermula dari ekspedisi nusantara beberapa ilmuwan. Ekspedisi itu menjelajahi empat pulau sehingga tiba pada kesimpulan untuk merekomendasikan agar pulau hoga, yang terletak dalam wilayah administrasi pulau Kaledupa untuk dijadikan salah satu destinasi wisata.

Pengelolaan diberikan kepada salah satu LSM asing, Operation Wallacea. Tapi Wallacea tidak secara total terlibat dalam pengelolaan resort. Pihak Wallacea memberikan peran kepada masyarakat lokal. Wallacea tidak berniat mencari keuntungan seperti umum yang terjadi para pemilik modal lainnya. Artinya tidak ada monopolisasi dalam pengelolaan. Ada keadilan dan partisipasi yang terbangun dalam pengelolaan resort ini.

Mulanya Pulau Hoga tidak memiliki penghuni bahkan tidak ada masyarakat yang memiliki tanah di pulau ini. Ketika adanya inisiasi dari pihak Wallacea untuk menjadikannya sebagai lokasi resort, sehingga masyarakat dianjurkan agar terlibat langsung dalam pengelolaan. Masyarakat yang mendiami pulau Kaledupa kemudian berinisiatif untuk mendirikan kemudian mendirikan vila-vila sebagai akomodasi bagi para

tamu-tamu resort. Artinya pemilik resort bukanlah LSM Wallacea melainkan masyarakat lokal sendiri.

Kepala pengelola Pulau Hoga, Bapak Jufri mengatakan:

“.....Kami sangat berterimakasih pada pihak Wallacea yang melibatkan bahkan pernah menyerahkan sepenuhnya kepada kami masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata ini. Padahal jika mereka berniat untuk menguasai sendiri, sangat mudah. Apalagi sebelumnya kami tidak mengetahui potensi wisata ini dan juga kami tidak memiliki kemampuan dalam pengelolaannya. Untung Wallacea membantu tidak berpikir seperti itu”⁷⁸

Berbeda dengan pemilik modal asing maupun nasional. Umumnya jika mengetahui ada potensi alam yang strategis, maka segera melakukan upaya-upaya untuk menguasainya. Kekuatan finansial para pemilik finansial ini dengan mudah masuk menguasai segala potensi alam yang strategis tersebut. Apalagi didukung oleh mekanisme pasar bebas (neoliberalisme) yang permisif pada peran swasta (pemilik modal) yang lebih dalam mengendalikan ekonomi. Pasar akan dibiarkan bergerak sendiri dengan sedikit kontrol bahkan tidak ada dari negara. Padahal secara konstitusi maupun etika negara diwajibkan terlibat langsung dalam memberikan pemerataan serta partisipasi ekonomi masyarakatnya. Jika logika neoliberal ini tetap digunakan maka siapa yang memiliki modal yang besar maka dialah yang akan memenangkan pertarungan ekonomi, sedang modal yang kecil akan kalah.

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Jufri, Kamis 24 april 2014 kepala pengelola Resort Hoga

Meskipun demikian, penulis sangat mengapresiasi Wallacea dalam melihat potensi wisata ini. Mereka atau orang-orang yang terlibat dalam organisasi ini tidak berhasrat untuk mengumpulkan pundi-pundi ekonomi untuk kepentingan pribadinya. Padahal sangat mudah bagi mereka untuk melakukannya. Faktor yang dapat menghambat semisal gerakan masyarakat sipil (*civil society*) saat itu maupun sekarang yang menentang konsep neoliberal pun sangat lemah. Mereka justru mempersilahkan kepada masyarakat lokal sebagai pemain utama dalam pengelolaan ini. Mereka hanya membantu dalam urusan-urusan tertentu misalnya dalam manajemen pengelolaan serta pelatihan yang terkait pengembangan pariwisata lainnya. Juga dalam hal promosi, Wallacea membantu melakukannya kepada calon pelanggan terutama bagi wisatawan luar negeri.

Sebenarnya Pulau Hoga bukan hanya memprioritas untuk menikmati keindahan bawah laut, melainkan pada tujuan studi. Apalagi jika dibandingkan dengan keindahan destinasi lainnya di Wakatobi, pulau hoga masih kalah bersaing. Pulau hoga hanya lebih cenderung pada bagaimana destinasi ini menjadi tempat studi penelitian. Sehingga tamu-tamunya pun kebanyakan dari kalangan pelajar atau mahasiswa terutama yang datang dari luar negeri (manca negara).

Umumnya para wisatawan yang berkunjung adalah wisatawan mancanegara yang datang secara berkelompok pada musim libur sekolah

untuk belajar meneliti sekaligus berwisata. Saat inilah wisatawan diresort ini mengalami puncak kunjungan yakni pada bulan juli hingga agustus.

“Rata-rata para wisatawan berkunjung pada bulan juli hingga agustus. Pada bulan inilah, wisatawan datang dalam jumlah yang paling banyak dibanding bulan-bulan lain. Mereka tidak hanya berwisata melainkan juga melakukan studi”⁷⁹

Perairan sekita pulau hoga memang cukup unik dibanding beberapa tempat di Wakatobi. Di sekitar pulau ini memiliki bioata laut yang banyak dijadikan objek peneltian. Sehingga tidak mengherankan hanya di destinasi wisata ini yang menjadi pilihan wisatawan untuk berwisata sekaligus belajar. Dengan kata lain para pelajar atau mahasiswalah yang mendominasi berkunjung ditempat ini. Biasanya pihak kampus atau kelompok pelajar atau mahasiswa yang datang telah melakukan kontak dengan pihak Wallacea sebelum mereka berkunjung ke pulau ini. Setelah pembicaraan selesai dengan pihak Wallacea, kemudian pihak walacea berkordinasi dengan pihak pengelolah lapangan pulau hoga yakni masyarakat setempat.

Penulis melihat, konsep pengelolaan pariwisata di Pulau ini cukup merakyat dan egaliter. Selain pengelolaannya diserahkan langsung pada masyarakat lokal juga dalam manajemen penerimaan tamu cukup adil. Setiap wisatawan yang datang tidak bebas memilih tempat tinggal (*home stay*) mana yang akan ditempati. Mereka harus melalui kordinasi dengan

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Jufri, Kamis 24 april 2014 kepala pengelolah Resort Hoga

kordinator pengelola lapangan. Setelah itu, pengelola lapangan memberlakukan sistem penjatahan atau giliran setiap *home stay* yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga kecemburuan sosial dapat teratasi karena setiap orang merasa mendapat keadilan.

Selain konsep pengelolaan yang berbasis pada partisipasi masyarakat, juga berdasarkan pada konsep ekowisata yakni selain berwisata juga dapat menikmati keindahan alam serta kebudayaan lainnya. Meskipun wisata budaya atau tempat yang bersajarah sesekali dilakukan oleh wisatawan. Mereka masih lebih cenderung menikmati keindahan bawah laut dan studi penelitian. Apalagi perhatian pemerintah terhadap pengembangan wisata daratan dan pengembangan budaya, masih sangat kurang. Semua tetap diserahkan pengelolaannya pada masyarakat lokal. Pihak LSM Wallacea yang notabene adalah LSM asing pun tidak mengambil keuntungan bisnis pada pengelolaan resort ini. Seperti yang dikatakan Bapak Jufri:

“Merekakan LSM, mereka hanya membantu masyarakat dalam pengelolaan potensi alam ini bahkan membantu ekonomi masyarakat”⁸⁰

Memang tidak dapat dimungkiri, banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) hari ini yang telah menyimpang dari tujuan awalnya. Sebagaimana kita ketahui bersama latar belakang hadirnya LSM adalah untuk membantu peran negara dalam pembangunan. Justru sekarang, tidak sedikit LSM yang hanya terjebak pada pencarian keuntungan

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Jufri, Kamis 24 april 2014 kepala pengelola Resort Hoga

pribadi bagi oknum-oknum penggiatnya. Tapi tidak untuk Wallacea yang masih konsisten dengan tujuannya yakni membantu dalam pemberdayaan masyarakat. Bahkan resort di Pulau Hoga ini sudah pernah diserahkan secara total dalam pengelolaannya kepada masyarakat lokal tapi ternyata oleh masyarakat diserahkan kembali kepada pihak Wallacea. Alasannya masyarakat belum memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam manajemen dan pengelolaan lainnya. Sebagaimana Bapak Jufri mengungkapkan:

“Pihak Wallacea sebenarnya sudah menyerahkan secara total pengelolaannya kepada kami. Tapi kami menyerahkan kembali kepada mereka. Karena kami belum mampu mengelolanya dengan baik. kami masih kekurangan sumberdaya manusia⁸¹”

Hal ini yang menjadi keluhan masyarakat. Mereka tidak memiliki kemampuan manajemen serta berbagai keterampilan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan resort. Masyarakat mengeluhkan kualitas *home stay* yang kurang baik karena minimnya dana. Demikian juga pelatihan-pelatihan manajemen serta keterampilan teknis lainnya semisal pelatihan pemanduan penyelaman. Jika keterampilan-keterampilan ini dimiliki maka masyarakat akan semakin mudah mengelola resort di pulau hoga ini. Melihat pentingnya hal ini, justru pemerintah tidak memiliki inisiatif untuk mengatasi masalah mereka meskipun hal ini sudah selalu disuarakan. Padahal pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mendukung dan membantu dalam peningkatan partisipasi ekonomi

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Jufri, Kamis 24 april 2014 kepala pengelola Resort Hoga

masyarakatnya. Wajar saja ketika resort ini diserahkan secara total oleh pihak walacea, masyarakat menyerahkannya kembali karena masyarakat belum siap untuk itu.

Ketika penulis bertanya tentang peran pemerintah, pihak Resort Hoga cukup sinis. Seperti yang disinggung di atas, bahwa kualitas *home stay* dan sumber daya manusia terkait pengembangan ekonomi pariwisata, masih sangat kurang. Mereka menginginkan pemerintah memberikan bantuan berupa pelatihan-pelatihan terhadap pengelola resort hoga yang nota bene adalah masyarakat lokal sendiri. Padahal jika pemerintah ingin membangun pengelolaan ekonomi yang berbasis kerakyatan, maka harusnya insentif yang lebih serta pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia terhadap pengelola pulau hoga dapat diberikan.

Lebih lanjut Bapak Jufri mengatakan:

“Kami masih sangat membutuhkan bantuan pemerintah. Terutama bagaimana agar kualitas home stay yang kami miliki, menjadi lebih baik. Juga agar kami dapat mengelola sendiri resort ini dengan sumber daya manusia yang mumpuni. Karena terus terang saja, jika dibandingkan dengan resort-resort lain (PT WDR dan Patuno Resort), kualitas resort kami jauh ketinggalan⁸²”

Tidak hanya kondisi di atas. Masalah lain yang muncul adalah terjadi persaingan pengunjung antara resort terutama resort hoga yang dikelola oleh masyarakat lokal dan Patuno resort yang dikelola swasta.

⁸² Wawancara dengan Bapak Jufri, Kamis 24 april 2014 kepala pengelola Resort Hoga

Dengan infrastruktur yang lebih memadai dan sumber daya manusia yang lebih baik, tentunya menjadi faktor pendukung kemajuan sebuah perusahaan (resort). Patuno resort memiliki kemampuan akan hal itu. Bukan hanya *home stay* yang berkualitas baik bahkan berkelas internasional. Listrik serta kapal-kapal pesiar khusus yang membawa tamu-tamu wisatawan untuk menjelajahi lautan wakatobi. Tidak dapat dimungkiri terjadi benturan kepentingan karena tamu-tamu Patuno resort datang ke wilayah resort hoga dengan fasilitas kapal-kapal pesiarnya.

Jika sebelumnya, untuk menikmati Hoga resort harus datang langsung ke Pulau Hoga. Hal ini tidak mesti lagi. Tamu-tamu dari resort yang memiliki kualitas resort yang lebih baik dalam hal ini PT WDR dan Patuno resort, dengan mudah datang dengan kapal-kapal pesiar mereka untuk menikmati keeksotisan bawah laut sekitar Pulau Hoga. Mereka bisa datang menyelam di wilayah Pulau Hoga dan setelah menyelam mereka dibawa kembali untuk menginap di resor yang lebih baik itu. Tidak harus lagi menginap di *home stay* milik Hoga resort. Maklum saja, karena kualitas resort pulau hoga masih belum begitu baik jika dibandingkan dengan dua resort lain di Wakatobi dimana dikelola dengan modal yang besar yakni PT WDR dan Patuno resort.

Tidak dapat disangkal, hal ini menjadi masalah tersendiri. Hal ini dikeluhkan oleh Bapak Jufri:

“Kami juga sudah pernah mengatakannya agar tidak saling mengganggu. Baiknya, agar setiap yang ingin menyelam di sekitar Pulau

Hoga agar menginap di home stay milik hoga resort. Tapi itulah persaingan, kami hanya bisanya menyarankan saja. Apalagi kami memiliki modal yang lebih sedikit dibanding mereka⁸³”

Persaingan yang tidak melibatkan intervensi negara akan membuat keadilan akan sulit tercipta. Para pemilik modal kecil tidak akan lebih baik memberikan pelayanan kepada wisatawan. Para pemilik modal besarlah yang berpeluang besar memberikan pelayanan yang berkualitas bagi wisatawan. Seperti halnya Giersch (dalam Revrison Baswir, 2009) bahwa neoliberal akan membiarkan individu berkompetisi secara bebas dipasar. Konsekuensinya pemilik modal besar akan mengalahkan modal yang kecil⁸⁴. Peran negara dalam konsep neoliberal tidak begitu penting. Konsekuensinya para pemodal kecil akan kalah bersaing. Agar keadilan itu bisa terwujud, negara sangat diperlukan intervensinya untuk menciptakan regulasi yang lebih adil tapi hal itu tidak terjadi. Tapi dalam kasus di atas hingga sekarang intervensi itu belum dilakukan oleh negara. Pemodal besar terus melakukan ekspansi hingga ke wilayah-wilayah kerja resort lainnya. Jika terus dibiarkan maka industri-industri di bidang kepariwisataan yang bermodal kecil lainnya dengan sendirinya, secara perlahan akan kalah dalam persaingan.

D. Implementasi terhadap Kepentingan Masyarakat Wakatobi

Globalisasi telah mengantarkan peradaban manusia semakin modern. Teknologi semakin bermunculan dengan peralatan yang canggih. Sistem

⁸³ Wawancara dengan Bapak Jufri, kepala pengelola Resort Hoga, Kamis 24 april 2014

⁸⁴ Revrison Baswir. *Bahaya Neoliberalisme*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) Hal. 2

ekonomi maupun politik juga tak kalah ekspansifnya. Bahkan budaya yang merupakan identitas suatu bangsa, secara perlahan terkikis. Terjadi tsunami ideologi besar (dominan) yang mencakup seluruh sektor kehidupan hingga negara pun tak kuasa untuk membendunginya.

Dalam pandangan Coen Husain Pontoh (2005), menjelaskan bahwa neoliberalisme merupakan sebuah kendaraan yang mengusung globalisasi. Dengan demikian keduanya adalah bagian integral yang tidak dapat dipisahkan⁸⁵. Fenomena globalisasi ini dijadikan oleh banyak pemilik kepentingan untuk menjalankan agenda-agendanya. Termasuk bagaimana menyalurkan sistem ekonomi dan politik yang liberal. Sistem yang mengajak semua negara untuk masuk dalam sebuah pasar yang bebas (*free market*). Ketika negara telah masuk kedalam sistem ini, perannya secara perlahan akan dikurangi. Karena bagi mekanisme pasar bebas, negara yang terlalu turut campur justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Jika dilacak kebelakang, sesungguhnya sistem ini mulai sedemikian bekerja sejak orde baru berkuasa. Reformasi sebagai momentum untuk mengevaluasi segala kesalahan orde baru, justru masih belum melaksanakan amanah ini. Dimana sentralisasi merupakan sistem kekuasaan terpusat sehingga pertumbuhan ekonomi pun hanya dinikmati oleh segelintir orang di pusat kekuasaan. Kue pembangunan tidak

⁸⁵ Coen Husain Pontoh. *Malapetaka Demokrasi Pasar*. (Yogyakarta: Resist Book, 2005), hal. x

menyebar secara merata dan adil ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Daerah hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan pundi-pundi ekonomi dengan mengeksploitasi kekayaan alam padanya. Ironis, karena di daerah yang memiliki kekayaan alam itu justru kurang merasakan manfaatnya.

Kepahaman akan realitas ini, desentralisasi digulirkan. Berdirilah banyak daerah-daerah otonomi dengan wewenang yang lebih besar dari sebelumnya. Setiap daerah diberikan kebebasan untuk mengelola daerahnya dengan segala potensi yang ada. Setiap masyarakat diharapkan mengambil peran dalam proses pembangunan. Masyarakat lokal kian dekat dengan pemimpin di daerah sehingga memudahkan untuk melakukan sinergitas keduanya.

Salah satu daerah itu adalah Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Daerah yang memiliki kekayaan pariwisata, menjadi potensi ekonomi yang layak diperhitungkan. Apalagi banyak kalangan yang memprediksi, pertumbuhan ekonomi yang cepat akan terjadi pada tempat-tempat yang memiliki keindahan pariwisata. Jika dikontekskan dengan Wakatobi yang memiliki kekayaan pariwisata, maka sangat diharapkan menjadi keberkahan ekonomi bagi masyarakat Wakatobi sendiri. Di satu sisi jika kekayaan wisata ini tidak mampu dikelola dengan baik dan adil, maka tidak akan membawa keberkahan bahkan akan menjadi bumerang bagi masyarakat sendiri. Fenomena ini sering ditemukan di daerah-daerah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah namun hanya segelintir orang yang menikmatinya.

1. Dominasi PT WDR dan Patuno Resort

Dalam kepariwisataan, tidak dapat dimungkiri Wakatobi telah banyak dikenal, terutama oleh para penikmat wisata alam. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari peran promosi yang dilakukan pemerintah Wakatobi yang begitu massif. Kepopuleran Wakatobi tidak membuat para investor untuk menutup mata. Apalagi persaingan ekonomi begitu sengit yang mendapat tempat ketika sistem pasar bebas diberlakukan. Berlomba-lombalah bagi siapa saja yang memiliki kemampuan finansial yang lebih serta keterampilan *entrepreneur*, untuk meluaskan ekspansi ekonomi.

Di tengah kemampuan negara yang belum mampu terlibat secara penuh dalam perekonomian, memberikan peluang besar bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Beberapa industri pariwisata yang skala besar pun hadir yakni PT WDR dan Patuno Resort. Keduanya masing-masing dikelola secara monopoli dan eksklusif berturut-turut oleh pengusaha asing dan lokal. Dengan kemampuan modal yang besar akan sejalan dengan kualitas resort yang baik, bahkan keduanya telah masuk dalam jajaran resort yang bertaraf nasional bahkan internasional.

Jika dicermati keduanya merupakan dua kekuatan besar yang tengah bersaing di Wakatobi untuk mengumpulkan profit yang sebesar-besarnya. Sementara masyarakat yang tidak memiliki modal hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Kalaupun ada masyarakat yang memiliki modal untuk membangun industri di bidang pariwisata hanya dalam skala

menengah ke bawah. Secara kuantitas terlebih kualitaspun masih tergolong minim. Ditambah lagi ketidakpahaman serta keterampilan dalam dunia *entrepreneur*, kurang dimiliki oleh masyarakat daerah.

Dalam UUD 1945 tepatnya pasal 33 menyatakan bumi air dan segala kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk hajat hidup orang banyak⁸⁶. Jika dikontekskan dengan dua perusahaan besar, PT WDR dan Patuno Resort maka konsep pengelolaan keduanya bertentangan dengan pasal ini. Rakyat yang harusnya menjadi pemegang kedaulatan ekonomi, realitasnya tidaklah demikian. Justru yang terjadi adalah masyarakat lokal tidak kuasa berhadapan dengan hasrat monopoli ekonomi, bahkan hanya menjadi buruh-buruh di kedua perusahaan ini. Modal besar yang dimilikinya dengan mudah menguasai lokasi-lokasi strategis untuk pengembangan industri wisatanya. Selain itu, keduanya mampu meningkatkan kualitas pelayanan sehingga lebih memuaskan para wisatawan. Modal yang besar ini pula menjadi faktor dalam memenangkan persaingan ekonomi baik dengan dive center yang dimiliki masyarakat lokal di Wakatobi termasuk Hoga resort yang memiliki modal kecil, maupun dengan industri-industri wisata lain yang ada di Indonesia bahkan mancanegara.

⁸⁶ UUD 1945 merupakan konstitusi negara RI. Salah satu pasal terkandung dalam konstitusi ini yang mengatur tentang perekonomian adalah pasal 33. Pasal ini merupakan prinsip dasar dalam membangun perekonomian Indonesia yang adil untuk memberikan kemakmuran bagi rakyatnya.

Sangat wajar jika tahun 2007 pendapat yang dihasilkan oleh PT WDR sekitar sepuluh kali pendapatan asli daerah (PAD) Wakatobi⁸⁷, karena dengan kualitas resort yang sangat baik serta konsep pengelolaan yang monopoli seperti ini semua keuntungan hanya masuk ke kantong pemilik modal (saham) saja yakni pihak swasta asing.

Perlu diketahui PT WDR merupakan jajaran resort papan atas. Umumnya pengunjungnya adalah wisatawan mancanegara dengan kondisi keuangan yang cukup besar. Bagi wisatawan yang ingin masuk memanfaatkan jasa wisata perusahaan ini butuh waktu tunggu selama tiga tahun, bahkan karena keindahan yang cukup memukau di tempat ini maka membuat duta besar Amerika Serikat, Cameron Home pernah menginap dan menyelam di tempat ini⁸⁸. Apalagi menurut pihak Taman nasional Wakatobi sebagaimana penulis jelaskan di atas, serta pengakuan dari banyak wisatawan yang pernah berkunjung bahwa Wakatobi memiliki spot-spot penyelaman yang cukup indah dibanding tempat-tempat lain di Indonesia, misalnya saja seperti yang selalu santer dipromosikan yakni Raja Empat di Papua.

Konsep pengelolaan keduanya tidak jauh berbeda. Perbedaannya adalah Jika PT WDR dikelola oleh pihak asing dengan menyewah tanah-tanah milik masyarakat lokal. Maka Patuno Resort merupakan milik pribadi

⁸⁷ La Ode Aydin M. *Strategi Pengelolaan Pariwisata Bahari Secara Terpadu dalam Rangka Pendapatan Asli Daerah Wakatobi*. (Jakarta: UT, 2011)

⁸⁸ Hasirun Ady. *Ayo Jalan-Jalan Ke Wakatobi*. (Makassar: Pustaka Refleksi, 2011) Hal. 56-57

Bapak Hugua selaku Bupati Wakatobi sejak 2006 hingga 2016 nanti. Dengan bantuan kekuasaannya sehingga mempermudah melakukan privatisasi secara menyeluruh dengan membeli tanah-tanah milik masyarakat lokal secara pribadi. PT WDR dan Patuno Resort ini merupakan simbol adanya “raja-raja kecil” layaknya orde baru yang sentralistik. Aset daerah yang strategis ini menjadi mesin pendulang uang bagi pemiliknya. Masyarakat yang harusnya menjadi pemain utama justru tidak mendapat porsi yang layak.

Melihat realita ini, Bapak Sarwan salah satu pemerhati Wakatobi yang juga masyarakat Wakatobi sendiri mengungkapkan:

“.....Sebenarnya hanya ada dua kekuatan besar yang berperan dalam pariwisata di Kabupaten Wakatobi yakni PT WDR dan Patuno Resort. Keduanya bersaing untuk lebih memperkaya diri”⁸⁹

Sejatinya era reformasi hari ini akan membawa wajah baru bagi perekonomian masyarakat di daerah-daerah yang notabene memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun reformasi masih gagal mencapai tujuannya karena secara sistem kita masih belum melakukan reformasi secara menyeluruh. Akhirnya reformasi dibajak oleh para oligarki pemodal. Sebuah kelompok kecil yang memiliki modal besar sehingga mampu menguasai aset-aset strategis suatu daerah.

Terkait pembajakan reformasi oleh para kapital, Eko Prasetyo (2004) menjelaskan bahwa para pemodal besar akan menjadi pemain utama

⁸⁹ Wawancara Senin 7 April 2014

dalam mengendalikan pasar atau transaksi-transaksi ekonomi sedangkan fungsi negara akan diperkecil. Inilah yang disebut dengan neoliberalisme sebagai upaya membatasi negara untuk mengatur perekonomian⁹⁰. Disaat negara sudah dibatasi fungsinya secara otomatis, negara kurang memiliki tanggung jawab terhadap nasib ekonomi rakyatnya. Kemiskinan pun semakin merajalelah karena pemerataan ekonomi tidak seimbang. Jurang kepemilikan ekonomi semakin lebar karena kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang dan mayoritas rakyat berada pada keprihatinan ekonomi.

Sebagaimana yang penulis jelaskan di atas bahwa inilah yang terjadi pada pengelolaan pariwisata di Wakatobi. Persaingan dalam pasar yang bebas selalu dimenangkan oleh pemodal besar. Negara yang harusnya menjadi pemain utama dalam menciptakan kedaulatan ekonomi pada rakyat justru abai. Seperti yang penulis jelaskan sebelumnya, selain Hoga resort dan beberapa dive center yang dimiliki oleh beberapa kelompok masyarakat, terdapat resort lain yang berskala besar dikelola secara privat dan eksklusif yakni PT WDR dan Patuno resort. Partisipasi masyarakat lokal kedua resort ini hanya sebatas menjadi buruh-buruh. *Multy effect* yang diharapkan menyebar bagi kesejahteraan masyarakat akan sulit terwujud justru efek ekonomi yang besar tetap hanya dimiliki oleh pemilik resort saja. Dalam pengelolaan yang privat tersebut, masyarakat tidak diizinkan untuk membangun usaha di dalam area

⁹⁰ Eko Prasetyo. *Islam Kiri*. (Yogyakarta: INSIST Press, 2004), hal. 111

industri pariwisata, sehingga konsep pengelolaan yang partisipatif pun tidak terjadi.

Realitas ini memaksakan, rakyat hanya menjadi buruh-buruh di kedua industri itu. Masyarakat lokal yang harusnya mendapatkan manfaat yang lebih justru kurang mendapatkannya. Tujuan desentralisasi untuk menciptakan partisipasi yang lebih bagi masyarakat lokal, hanyalah retorika yang sulit untuk diimplementasikan. Belum lagi menurut pengakuan Ahmad Ode Tarani, ketua serikat buruh di salah satu Resort bahwa sering terjadi diskriminasi atas hak-hak buruh.

“Misalnya sebelum adanya organisasi buruh yang didirikan tahun 2011, sering ditemukan pemutusan hubungan kerja sepihak (PHK). Belum lagi adanya upah di bawah standar upah minimum regional (UMR). Saat melakukan aksi demonstrasi pun, sering ada upaya pengagresan oleh pihak perusahaan. Isu yang dilemparkan macam-macam, salah satunya adalah buruh-buruh melakukan penyerobotan. Sehingga, beberapa anggota kami ditangkap oleh kepolisian setempat⁹¹”

Penciptaan lapangan kerja melalui tenaga kerja seperti buruh-buruh sebenarnya tidak menjadi masalah. Namun, reformasi bukan hanya meminta itu. Selain kesejahteraan dan pemenuhan atas hak-hak buruh, juga masyarakat secara umum harus dilibatkan partisipasi aktifnya dalam pemanfaatan kekayaan alam secara proporsional dan berkeadilan. Justru yang terjadi, tidak berbeda dengan era sebelum reformasi (sentralisasi) dimana partisipasi masyarakat daerah kurang begitu mendapat tempat. Di satu sisi peran pemerintah juga tidak memuaskan. Padahal di Kabupaten

⁹¹ Wawancara 14 April 2014

Wakatobi, sektor pariwisata merupakan tumpuan besar bagi perekonomian masyarakat lokal. Pemerintah harusnya menyiapkan segala sesuatunya untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan atas pariwisata serta *multy effect* lainnya. Keluhan-keluhan masih saja hadir di tengah masyarakat. Terkait modal, penciptaan lapangan kerja serta pelatihan-pelatihan sumber daya manusia dalam merespon keberadaan pariwisata dan efek lainnya, pemerintah belumlah maksimal dalam memberikan dukungan.

Tidak sampai di situ, kasus tanah yang dipinjam oleh salah satu perusahaan masih meninggalkan masalah. Penulis telah menjelaskan sebelumnya bahwa pihak perusahaan sengaja menciptakan peta konflik antara pemilik tanah. Menurut banyak anggota pemilik tanah, banyak tanah-tanah yang dipinjam tanpa persetujuan seluruh pemilik tanah. Padahal tanah-tanah milik masyarakat lokal tersebut dimiliki secara kekeluargaan oleh banyak anggota keluarga. Hal ini muncul saling kecurigaan antar anggota keluarga pemilik tanah. Bahwa ada kongkalikong antara sebagian anggota keluarga lain dengan pihak perusahaan untuk memberi pinjaman atas tanah, sementara pihak anggota keluarga yang lain tidak dilibatkan. Artinya ada ketidaktransparansi dalam prosedur pinjam meminjam ini. Melihat hal ini, Ahmad Ode Tarani yang selaku ketua buruh serta salah satu pemilik tanah yang juga merasa dirugikan dalam prosedur peminjaman ini, mengungkapkan:

“Ini ada diskriminasi atas peminjaman tanah. Saya selaku anggota keluarga pemilik tanah tidak tahu secara utuh bagaimana proses peminjaman ini terjadi. Pihak perusahaan hanya meminjam pada sebagian pemilik tanah saja tanpa sepengetahuan pemilik tanah yang lain. Oleh karena itu, saya berniat akan menempuh jalur hukum⁹²”

Hal inilah yang sampai hari ini, masih menyisakan masalah. Tanah yang merupakan simbol pemersatu keluarga, menjadi boomerang bagi silaturahmi antara anggota keluarga. Atas nama ekspansi usaha tidak jarang perusahaan-perusahaan tertentu melakukan upaya yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Merusak nilai-nilai kearifan lokal demi hasrat mengakumulasi modal sebesar-besarnya. Tidak hanya di Wakatobi, banyak daerah lainpun sering ditemukan para pemilik modal melakukan apa saja demi mengakumulasi keuntungan yang sebesar-besarnya.

Logika neoliberal demikian jika terus dibiarkan akan merusak tatanan sosial yang ada. Masyarakat lokal yang harusnya menjadi pemegang peran utama dalam perekonomian justru terpinggirkan. Padahal desentralisasi memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi bagi masyarakat yang selama ini kurang mendapatkan jatah ekonomi. Selain itu diharapkan kearifan lokal dapat terus dipertahankan kemudian diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Di satu sisi yang terjadi justru para oligarki pemodal besar menunggangi desentralisasi untuk lebih menancapkan pengaruh ekonominya. Demi memperluas pengaruh ekonomi, tidak jarang apapun dilakukan. Hal inilah yang terjadi di

⁹² Wawancara 14 April 2014

Wakatobi oleh dua pemodal besar, PT WDR dan Patuno resort. Masyarakat lokal yang tidak dan kurang memiliki modal hanya menjadi buruh bahkan penonton di daerah sendiri. Sejatinya masyarakat lokal yang memegang kendali yang besar sehingga partisipasi dan pemerataan ekonomi dalam tercapai.

2. Minimnya Partisipasi Masyarakat Lokal

Selain menjadi buruh masyarakat lokal juga memiliki partisipasi meskipun dinilai masih sangat minim. Pemerintah yang diharapkan sebagai elemen penting yang dapat memberikan bantuan yang lebih malah masih belum maksimal dan tergolong minim. Bentuk partisipasi lain masyarakat lokal selain menjadi buruh adalah membangun usaha-usaha industri dalam hal ini dive center. Memang dalam regulasi dalam hal ini perda Kabupaten Wakatobi mendukung bagi siapa saja untuk membuka usaha dibidang jasa dan perdagangan.

Sebagaimana peraturan daerah (perda) pemerintah Wakatobi nomor 4 tahun 2006 tentang retribusi izin usaha industri dan usaha perdagangan⁹³. Dalam perda ini menjelaskan semua orang/badan usaha baik lokal, nasional maupun asing dibebaskan berkompetisi untuk membuka usaha industri dan perdagangan barang maupun jasa. Hal inilah yang menjadi legitimasi bagi siapa saja termasuk masyarakat untuk membuka usaha di bidang pariwisata. Meskipun jika dicermati perda ini

⁹³ <http://www.wakatobikab.go.id/regulasi/1/>

tidak tegas mengatur secara tegas perilaku industri swasta besar yang berpeluang menghancurkan keberadaan usaha-usaha dengan skala modal kecil.

Dalam hukum neoliberal yang kini dapat dilihat di hampir semua daerah di Indonesia tak terkecuali di Wakatobi, siapa saja bisa berkompetisi dalam bidang ekonomi. Terlebih jika memiliki modal yang besar. Dalam konsep ini, peran negara diminimalisasi agar para pengusaha bebas berkompetisi dalam mekanisme pasar. Dengan kurangnya peran negara inilah, pengusaha sebebaskan-bebasnya melaksanakan agendanya untuk mengakumulasi profit yang sebesar-besarnya. Hal inilah yang menyebabkan pengusaha-pengusaha bermodal kecil akan kalah bersaing. Dalam hukum pasar, pemilik modal besar akan selalu mendapat peluang yang besar dan memenangkan kompetisi ekonomi.

Melalui perda di atas, beberapa dive center milik masyarakat lokal dibangun. Dive center ini umumnya menyediakan jasa-jasa wisata dengan modal yang masih minim. Pemerintah juga masih kurang memberi bantuan bahkan tidak sama sekali. Sebagaimana dikatakan oleh salah satu pemilik dive center, Budianto:

“Selama kami ada sejak tahun 2009 dengan modal yang masih minim, kami hanya bergerak sendiri. Sampai sekarang pemerintah tidak memberi bantuan⁹⁴”

⁹⁴ Wawancara dengan Budianto, salah satu pemilik dive center. Tanggal 17 April 2014

Dive center seperti ini adalah berskala kecil. Fasilitas yang disediakan pun masih tergolong standar. Selain itu, terdapat satu-satunya resort yang dikelola secara langsung oleh masyarakat lokal yakni Hoga Resort. Resort ini diinisiasi oleh salah satu LSM bernama Wallacea. Seperti halnya dive center lainnya, resort ini juga masih membutuhkan bantuan dari pemerintah. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Jufri, kepala pengelola Hoga Resort:

“..... Dalam pengembangan resort kami, kami masih sangat membutuhkan sumberdaya manusia yang baik. Kami berharap pada pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata, namun belum pernah kami mendapatkannya⁹⁵”

Jika membandingkan antara beberapa dive center dan Hoga dengan PT WDR dan Patuno resort, dari segi kualitas sangat jauh berbeda. Pasalnya kedua resort ini, PT WDR dan Patuno resort memiliki modal yang besar serta sumber daya manusia yang mumpuni dalam pengelolaannya. Juga masalah pengembangan sumber daya manusia, pemerintah masih belum begitu maksimal dalam partisipasinya.

Belum lagi jika dilihat dalam partisipasi pengembangan kebudayaan misalnya dalam pengembangan tarian-tarian daerah. Penulis sudah menyinggung sebelumnya, bahwa pariwisata dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling mendukung. Kurangnya kesadaran masyarakat serta masih belum maksimalnya peran pemerintah dalam memacu peran serta

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Jufri, Kamis 24 april 2014 kepala pengelola Resort Hoga

masyarakat dalam pengembangan kebudayaan ini, membuat partisipasi masyarakat dalam sektor ini masih kurang bergeliat.

Bapak Halim, seorang warga Wakatobi pernah mengatakan:

“.....Saya pernah mendengar adanya sanggar seni di Wakatobi, tapi hanya terpusat di Ibu kota Kabupaten saja. Sedangkan sebagian besar bahkan hampir semua kecamatan di Wakatobi belum terlihat, termasuk di kecamatan tempat saya tinggal⁹⁶”

Hal ini dipertegas oleh Bapak Muh. Dili, kepala promosi pariwisata dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Wakatobi:

“..... Untuk mendukung keberadaan pariwisata, tidak bisa dilepaskan dari peran kebudayaan. Memang kami sudah mengembangkan ini tapi jujur saja belum maksimal⁹⁷”

Padahal sinergitas antara pemerintah dan masyarakat merupakan modal utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya partisipasi masyarakat. Demikian pula sebaliknya, masyarakat harus berkolaborasi dengan pemerintah dalam meraih tujuan bersama. Idealnya negara harus memaksimalkan fungsinya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, karna sejatinya konsep pembangunan bukanlah menggunakan paradigma monopoli. Bukan membuat masyarakat pasif menerima segala kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Melainkan diharuskan partisipasi masyarakat sehingga pemerataan ekonomi dapat terwujud secara berkeadilan.

⁹⁶ Wawancara Senin 7 April 2014

⁹⁷ Wawancara 28 April 2014

3. Kepentingan Nelayan

Dalam tataran konsep, retorika kepariwisataan Wakatobi ini cukup baik. Apalagi Wakatobi sebagai daerah pariwisata telah dikenal oleh masyarakat hingga kedunia internasional. Namun seperti yang penulis telah ungkap sebelumnya, pariwisata di Wakatobi lebih dikuasai oleh pihak swasta. Meskipun tidak dapat dimungkiri masyarakat juga memiliki peran walaupun tidak terlalu signifikan.

Di satu sisi dalam partisipasi pemerintah untuk pengembangan pariwisata, tidak selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Kebijakan selalu menemui pro dan kontra. Salah satunya dalam penetapan sistem zonasi yang dilakukan oleh pihak taman nasional Wakatobi. Dalam sistem zonasi ini, ada pembagian beberapa zona yang memiliki fungsi-fungsi tertentu.

Melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Nomor. SK.149/ IV-KK/2007⁹⁸, taman nasional dibagi menjadi beberapa zona. Masing-masing zona tersebut adalah Zona Inti (ZI), Zona Perlindungan Bahari (ZPB), Zona Pariwisata (ZPr), Zona Pemanfaatan Lokal (ZPL), Zona Pemanfaatan Umum (ZPU), dan Zona Khusus/ Daratan (*Land Zone*). Dari ke-6 zona tersebut, Zona Inti (ZI), Zona Perlindungan Bahari (ZPB), dan Zona Pariwisata (ZPr). Zonasi-zonasi ini berfungsi sebagai pembatasan bagi aktivitas-aktivitas agar

⁹⁸ <http://wakatobinationalpark.com> (Website resmi Taman Nasional Wakatobi)

sesuai dengan peruntukannya. Misalnya zona pemanfaatan umum dimanfaatkan sebagai wilayah yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja dan untuk keperluan apa saja selain pengrusakan. Zona pariwisata diperuntukan untuk kegiatan pariwisata misalnya penyelaman.

Di sinilah letak masalahnya. Terdapat kalangan masyarakat terutama nelayan yang masih kurang sepakat dengan pembagian zona ini. Masih banyak pengakuan dari nelayan yang masih kurang paham mengenai batas-batas zona serta bagaimana sistem pemetaan wilayah itu dilakukan. Mengenai mekanisme penetapan zona karena masih banyak nelayan yang tidak tahu. Seperti yang dikatakan oleh La Kore, seorang nelayan Wakatobi:

“Kita masih belum tahu dimana batas-batas wilayah zonasi ini. Sehingga kadang ada beberapa teman-teman nelayan yang melaut di suatu wilayah kemudian mendapat teguran dari petugas pengawas zona-zona ini”⁹⁹

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa belum maksimalnya sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat nelayan terkait batas-batas wilayah yang ditetapkan itu. Dalam mekanisme penetapannya pun belum masyarakat banyak yang tidak tahu. Meskipun oleh pihak taman nasional mengungkapkan telah melakukan sosialisasi. Namun fakta dilapangan seluruh masyarakat terutama nelayan belum sepenuhnya mengetahui perihal tersebut.

⁹⁹ Wawancara, 13 April 2014

Dampak yang terjadi adalah adanya pembatasan beberapa wilayah yang sebelumnya dijadikan lokasi penangkapan ikan dan hasil laut lagi oleh nelayan setempat. Beberapa wilayah pengakpan ikan dan hasil laut lainnya, tanpa sepengetahuan nelayan kurang telah menjadi area pariwisata. Dimana area parwisata hanya bisa digunakan untuk akativitas kepariwisataan dan lainnya kecuali aktivitas pengkapan oleh nelayan. Sementara sesuai yang penulis jelaskan sebelumnya, beberapa kepentingan swasta menjadi dominan dalam pengelolaan pariwisata, misalnya dengan hadirnya beberapa resor milik swasta dengan standar nasional dan internasional, yang dikelolah secara monopoli dan eksklusif.

Memang terdapat beberapa masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan ini. Selain menjadi buruh-buruh yang rentan mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK), juga adanya beberapa dive center dan resort (Hoga Resort) yang dibangun oleh masyarakat sendiri. Dive-dive center serta satu-satunya resort yang dikelolah oleh masyarakat ini pun memiliki kualitas yang rendah. Kualitas yang akan sulit bersaing dengan resort-resort Swasta dengan modal yang besar.

Dalam konteks pembatasan beberapa ruang lingkup aktivitas nelayan oleh sistem zonasi ini, kemudian dijadikan zona aktivitas kepariwisataan maka akan lebih menguntungkan pihak pengelola sendiri. Keterbatasan ruang lingkup nelayan berkonsekuensi pada hasil tangkapan berupa ikan dan hasil laut lainnya. Secara tidak langsung

penghasilan ekonomi nelayan akan berkurang. Dalam tinjauan budaya pun, hak-hak budaya nelayan yang sudah secara turun temurun berkuat dengan lingkungan laut akan tercerabut. Tak bisa dihindarkan, banyak nelayan yang putus asa sehingga berhenti untuk berprofesi sebagai nelayan. Kondisi ini membuat banyak yang bermigrasi keluar Wakatobi untuk mencari kebutuhan ekonominya. Masyarakat lokal yang dahulu menjadi nelayan kini memilih merantau di luar Wakatobi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang “Studi Ekonomi Politik: Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Wakatobi”, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan pariwisata pemerintah memiliki beberapa peran. Peran itu adalah menciptakan bandara udara sebagai infrastruktur dalam mempercepat mobilitas manusia terutama para wisatawan untuk masuk dan keluar Wakatobi. Selain itu melakukan promosi wisata yang didukung dengan kegiatan seni dan kebudayaan. Pihak taman nasional Wakatobi selaku perpanjangan tangan dari kementerian kehutanan juga ikut dalam menjaga kelestarian bawah laut. Hal ini sebagai penopang keberadaan pariwisata karena pariwisata bawah laut selalu sejalan dengan kelestarian bawah laut jika pariwisata tersebut ingin tetap eksist. Terakhir, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal maka diadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan SDM dalam merespon kemajuan pariwisata di Wakatobi meskipun masih tergolong minim.
2. Perkembangan pariwisata ini, merupakan peluang besar bagi investor untuk menanamkan modalnya. Dengan memanfaatkan sistem ekonomi pasar yang sangat mendukung keberadaan

pemodal besar, maka hadirilah PT WDR yang dimiliki oleh pengusaha asing asal Swiss dan Patuno Resort yang dimiliki oleh pribadi bapak Bupati yang sedang berkuasa. Kedua industri pariwisata ini memiliki kualitas yang sangat baik dibanding dive center milik masyarakat. Bahkan keduanya masuk dalam industri wisata yang berskala internasional. Masyarakat juga berpartisipasi dalam merespon pengembangan pariwisata. . Masyarakat dengan kemampuan modal yang tergolong dengan skala modal menengah kebawah, membangun beberapa dive center untuk menyediakan jasa-jasa penyelaman serta wisata dengan sistem ekowisata. Selain itu terdapat Hoga Resort yang merupakan satu-satunya resort yang dikelola oleh masyarakat lokal. keberadaan resort ini lebih dibantu karena dukungan LSM Wallacea. Pemerintah dianggap masih kurang mendukung. Baik dari segi permodalan serta penciptaan lapangan kerja. Retorika pemerintah tentang dukungan pariwisata hanya lebih kepada menguntungkan pemilik modal besar.

3. Jika dilihat secara mendalam yang paling diuntungkan dalam pariwisata di Wakatobi adalah dua kekuatan modal besar yakni PT WDR dan Patuno Resort. Partisipasi masyarakat dalam resort ini hanya menjadi buruh-buruh. Selain itu dalam pengembangan pariwisata oleh dukungan taman nasional yang menjaga kelestarian bawah laut, justru menimbulkan pro dan kontra di

kalangan masyarakat terutama masyarakat nelayan. Sistem zonasi yang diterapkan masih belum diterima secara keseluruhan oleh nelayan. Sering dialami oleh nelayan bahwa wilayah tangkapnya sudah mulai terbatas oleh sistem pemetaan wilayah ini, sedangkan nelayan kepentingan nelayan dalam hal ini wilayah tangkapnya semakin sempit. Selain itu, masih banyak nelayan yang belum paham dimana batas-batas wilayah yang diberlakukan oleh pihak TNW, serta bagaimana mekanisme pemetapannya.

B. Saran

Terdapat dua resort yang pengelolaannya terlalu eksklusif dan privat, perlu ada keterbukaan. Masyarakat harusnya tidak hanya berperan menjadi buruh-buruh. Pihak perusahaan harus lebih terbuka dalam pengelolaan sehingga masyarakat lebih partisipasi dalam pengelolaan bersama. Dalam peningkatan partisipasi masyarakat lokal, pemerintah perlu berperan aktif, terutama pelatihan-pelatihan *entrepreneur* serta pemberian modal. Tidak hanya itu, beberapa dive center serta Hoga Resort tidak boleh luput dari bantuan pemerintah, karena bisa dikatakan pemerintah belum memberikan bantuan yang layak. Terakhir, agar kedaulatan ekonomi dapat tercapai, maka pemerintah harus konsisten untuk menegakan konstitusi dalam hal ini UUD 1945 terutama pasal 33. Melalui pasal ini sehingga raja-raja kecil di daerah akan tersingkir dengan sendirinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ady, Hasirun. 2011. *Ayo Jalan-Jalan Ke Wakatobi*. Makassar: Pustaka Refleksi
- Aydin M, La Ode. 2011). *Strategi Pengelolaan Pariwisata Bahari Secara Terpadu dalam Rangka Peningkatan PAD di Kabupaten Wakatobi*. Jakarta: UT
- Baidhawiy, Zakiyuddin. 2007. *Islam Melawan Kapitalisme*. Yogyakarta: Resist Book.
- Baswir, Revrison. 2009. *Bahaya Neoliberalisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bremmer, Ian. 2011. *Akhir Pasar Bebas (The end of the free market)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Fakih, Mansour. 2009. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press.
- _____. 2011. *Jalan Lain, Manifesto Intelektual Organik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Giddens, Anthony. 1986. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern*. Jakarta: UI-Press.
- Harvey, David. 2009. *Neoliberalisme dan Restorasi kapitalisme*. Yogyakarta: Resist Book.

- Hidayatika, Meiningtyas Dwi. 2007. *Peran Infrastruktur...* Jakarta: FE UI
- Karyono, A Han. (1997). *Kepariwisataaan*. Jakarta: Gramedia
- Lekachman, Robert dan Borin van Loon. 2008. *Kapitalisme teori dan sejarah Perkembangannya*. Yogyakarta: Resist Book.
- Mas'ood, Mochtar. 2008. *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mawardin. 2011. *Prospek Hubungan Bilateral Indonesia-Israel dalam Perspektif Ekonomi Politik*. Makassar: Unhas.
- Prasetyo, Eko. 2004. *Islam Kiri*. Yogyakarta: Insist Press.
- Pontoh, Coen Husain. 2005. *Malapetaka Demokrasi Pasar*. Yogyakarta: Resist Book.
- Rachbini, Didik J. 2006. *Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rais, Amin. 2008. *Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia*. Yogyakarta: PPSK Press.
- Rising, iwan, Arifadi B dan Arifadi Gusma. 2005. *Penguasa Lokal Pilihan Demokrasi Liberal*. Surakarta: Partnership for Local PoliticTransformation.
- Steans, Jill & Pettiford, Lloyd. 2009. *Hubungan Internasional: Perpektif dan Tema*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiono, Muhadi. 2006. *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yoeti, Oka A. (1996). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.

Yustika, Ahmad Erani. 2009. *Ekonomi Politik Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<http://www.wakatobikab.go.id>

<http://wakatobinationalpark.com>